

**PERILAKU PEMILIH BURUH ROKOK
DALAM PILKADA LANGSUNG
DI KABUPATEN KUDUS**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
Pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

**MOHAMMAD SHOLIHIN
NIM. D4 B006036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2009**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa, Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, bahwa tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis merupakan pendapat atau saran yang dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan sumber aslinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kudus,

Yang menyatakan

MOHAMMAD SHOLIHIN

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul :

PERILAKU PEMILIH BURUH ROKOK DALAM PILKADA LANGSUNG DI KABUPATEN KUDUS

Yang disusun oleh Mohammad Sholihin, NIM : D4 B006036
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 5 Juni 2009
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji lain

Drs. TURTIANTORO, M.Si

1. Dr KUSHANDAJANI, MA

Sekretaris Penguji

Drs. AHMAD TAUFIQ, M.Si

2. Dra. FITRIYAH, MA

Semarang, 5 Juni 2009.
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Program

Drs. Purwoko, MS

MOTTO

- *Barang siapa menghendaki dunia, maka dengan ilmu, barang siapa menghendaki akhirat maka dengan ilmu, barang siapa menghendaki dunia dan akhirat, maka dengan ilmu (Al-Hadits)*

- *“Sejarah seorang manusia merdeka tidak pernah tercipta secara kebetulan, melainkan tercipta karena pilihan mereka sendiri” (Eisenhower)*

- *Orang yang kreatif memandang persoalan menjadi sebuah peluang, orang yang tidak kreatif memandang peluang sebagai sebuah persoalan*

- *Kita harus mengubah diri kita sendiri sebelum kita berharap melihat dunia yang berubah (Mahatma Gandhi)*

Kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahku Almarhum Munthoha dan Bunda ku Mastinah, walaupun beliau buta huruf.
2. Istriku tercinta Sunarsih,S.Pd dan kedua buah hatiku tersayang; Suryo Solinar dan Candra Solinar yang dengan ketulusan dan keikhlasannya melepas ayunan langkahku, teriring do'a menyertai perjuanganku menuntut ilmu demi kebahagiaan dan kesejahteraan serta masa depan keluarga.

ABSTRACT

Direct regent election is firstly held in Kudus regency. It had lasted on April 12th 2008.

As we know that Kudus is a city of cigarette industry, thousand of big and small cigarettes factories give jobs to its people. More than a hundred thousand people work in this sector. Most of them are cigarette workers.

The interesting one is that, in this election, each candidate fights over their votes. Moreover, a couple of the candidates took them as the main target. This research intends to know and identify the dominant factors which influence the elector of cigarette workers in the direct regent election of Kudus regency. In the process of data collecting, the writer used a study of literature, interview and observation. To analyze the data, the writer used the descriptive qualitative method.

Based on result of the study, the writer concludes that there are six factors which influence the behavior of the elector of cigarette workers in regent election of Kudus in 2008. *The first factor* is the spokesman of campaign or the team of success. This is mostly influenced by the attitude of cigarette workers who tend to be passive in political activities. Most of them are women whose time is spent for working and doing their house works. They tend to dislike having a conflict, thus their choices in voting depend on people around them. *The second factor* is the intensive or political donation. It is closely related with their pragmatism attitude. Generally, they are not really sure that the regent election will change their future of lives. They have also considered that the political promises of the candidates during the campaign are just common things to attract their sympathies. Therefore, when they distribute some money or anything else to people, it is considered as a common action. They don't consider it as a money politic or selling votes, but it is just a social donation or a form of *poor caring action* and the like. *The third factor* is the candidate profile. They will choose the candidate who they think has good behavior and who is willing to get close and visit the poor people. Most of them have never met nor known the candidates. That's why the dialogue within people and the candidate's personality, it will easily spread out among people and sometimes being out of control. *The fourth factor* is the campaign issue or the candidate's vision and missions. The candidate's vision, missions and promise in their campaign which is too long will not be read, remembered or understood by the workers society. That's why the simple and practical promises here, will be more effective for these will be easily reminded when they are finally elected. *The fifth factor* is the party background of the candidate. Here, the popularity of the party takes important role in making their choice in the election. The candidates of a big and popular party such as PDIP, Golkar, PKB, and PPP have great influence because they have been popular among people. But the solidity of the party influences also takes role in making their consideration. They think that, "How can they manage the government if they can't manage their own parties?" The unsolidity of the party will certainly cause many problems of the

machine of the party. In other words, if the party is unsolid, it can't work well, even less do more to others. *The sixth factor* is the pressure group. Most of the workers are women and they are low class workers who are susceptible of pressure and mobilization. At the beginning, the writer has an opinion that the most dominant pressure group is the worker association since its leader usually has a certain target. Apparently, the workers are not afraid of the worker association but they are afraid of the owners of the company. As a matter of fact, they usually have a neutral stand. The more dominant pressure groups are the 'sabet' around them who try to capture their freedom to determine their own choices. Their limited access of information and economic make them easily to be mobilized.

ABSTRAKSI

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung baru pertama kali untuk kabupaten Kudus. Proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kudus telah berlangsung pada tanggal 12 April 2008.

Semua orang tahu, bahwa Kudus adalah kota industri rokok kretek, tempat dimana ada ribuan pabrik rokok besar dan kecil yang memberi lapangan kerja pada penduduknya. Lebih dari seratus ribu orang bekerja disektor ini. Sebagian besar mereka adalah sebagai buruh rokok.

Yang menarik adalah bahwa dalam pilkada ini suara mereka menjadi rebutan, bahkan salah satu pasangan calon menjadikannya sebagai sasaran utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi factor-faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam pelaksanaan pilkada langsung di kabupaten Kudus. Proses pengambilan data dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara mendalam, observasi langsung, selanjutnya mengelola dan menganalisis data hasil dengan tehnik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam Pilkada Kudus tahun 2008, berturut-turut adalah *pertama* faktor juru kampanye atau tim sukses atau sabet, hal ini sangat dipengaruhi oleh sikap buruh rokok yang cenderung pasif dalam kegiatan politik, sebagian besar mereka adalah kaum wanita, waktunya sebagian besar digunakan untuk bekerja dan mereka cenderung tidak ingin terlibat konflik sehingga suara mereka tergantung orang-orang yang ada di sekitarnya. Faktor *kedua* adalah insentif atau hibah politik atau apapun namanya. Ini sangat erat kaitannya dengan sikap pragmatis saja, mereka kurang percaya apakah Pilkada akan membawa perubahan pada masa depan menjadi lebih baik toh janji politik pada masa kampanye adalah hal yang biasa. Maka kalau saat kampanye mereka membagi – bagikan uang atau lainnya itu adalah hal yang wajar, mereka tidak menganggap itu money politik atau menjual suara tetapi seperti bantuan sosial, kepedulian terhadap masyarakat kecil atau lainnya. Faktor *ketiga* adalah identifikasi calon, mereka akan memilih calon yang menurut kabar perilakunya baik dan mau turun dan berkunjung ke lingkungan masyarakat bawah, sebagian besar mereka belum pernah bertemu apalagi kenal dengan para calon, tetapi perbincangan di masyarakat tentang calon yang aktif berdialog dengan masyarakat sangat berkesan. Demikian juga sebaliknya sedikit saja kelemahan calon tertentu akan cepat berkembang tak terkendali karena informasinya hanya lewat perbincangan. Faktor *keempat* adalah isu kampanye atau visi misi calon. Visi Misi dan janji kampanye calon yang terlalu panjang tidak akan dibaca, diingat dan dimengerti oleh kaum buruh, janji kampanye yang praktis dan bisa ditagih kalau nanti terpilih lebih mengena. Faktor *kelima* adalah identifikasi partai, calon dari partai besar seperti PDIP, Golkar, PKB maupun PPP mempunyai pengaruh karena sudah dikenal tetapi faktor partai yang solid lebih menonjol, bagi mereka bagaimana akan memerintah kalau ngurus partainya saja tidak becus. Partai yang sedang tidak solid juga berpengaruh pada macetnya mesin partai. Faktor

keenam adalah pressure group atau kelompok penekan. Sebagian besar mereka adalah perempuan dan merupakan pekerja kelas bawah, yang sangat rentan pada mobilisasi dan tekanan. Pada mulanya peneliti menganggap kelompok penekan yang paling dominan adalah serikat pekerja karena ketua serikat pekerja punya target, ternyata para pekerja tidak takut pada serikat pekerja yang ditakuti bukan serikat pekerja tetapi pemilik perusahaan, sedangkan pemilik perusahaan berkomitmen netral. Kelompok penekan yang lebih dominan adalah para sabet disekitarnya yang tidak membebaskan mereka berpikir dan menentukan sendiri pilihannya. Keterbatasan terhadap akses informasi dan ekonomi membuat mereka mudah dimobilisasi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SAW atas limpahan rahmad, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul Perilaku Pemilih Buruh Rokok Dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Kudus telah selesai.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Turtiantoro, M.Si yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
2. Drs. Ahmad Taufiq, M.Si yang dengan penuh persahabatan memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya tesis ini.
3. Drs. Purwoko, MS, selaku ketua program pasca sarjana program studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah memberikan kemudahan bagi penyelesaian tesis ini.
4. Para dosen, rekan-rekan mahasiswa, staf administrasi dan semua yang telah membantu penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan selama ini.

Akhirnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini, penulis menyampaikan permohonan maaf. Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Penulis

DAFTAR ISI

- Halaman Judul	i
- Pernyataan Keaslian Tesis	ii
- Halaman Pengesahan/Persetujuan	iii
- Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
- Abstract	v
- Abstraksi	vii
- Kata Pengantar	ix
- Daftar Isi	x
- Daftar Tabel	xii
- Daftar Gambar	xiii
- Daftar Lampiran	xiv
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
Bab II. Telaah Pustaka	
2.1. Kerangka Konseptual	7
2.2. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Wujud Demokrasi Tingkat Lokal	19
2.3. Definisi Konseptual	30
2.4. Definisi Operasional	32
Bab III. Metode Penelitian	
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Populasi dan Sampel	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	35
3.4. Teknik Pemeriksaan dan Kredibilitas Data	37

3.5. Tehnik Analisis Data.....	39
Bab IV. Analisis Data	
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	41
4.1.1. Kondisi Geografis	41
4.1.2. Kondisi Demografis	42
4.1.3. Kondisi Ekonomi	44
4.1.4. Kondisi Sosial Politik	47
4.1.5. Pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah langsung Kabupaten Kudus Tahun 2008	50
4.2. Proses dan Hasil Analisis	68
4.2.1. Buruh Pabrik Rokok	68
4.2.2. Buruh Rokok dan Kegiatan Politik	79
4.2.2.1 Perhatian Kaum Buruh Rokok Terhadap Kegiatan Politik	79
4.2.2.2 Upaya Para Calon Merebut Suara Buruh Rokok.....	81
4.2.3. Fakta Perilaku Pemilih Buruh Rokok.....	87
4.2.4.1 Pemilih yang memberikan suara.....	88
4.2.4.2 Pemilih yang tidak memberikan suara/Golput.....	114
4.2.4. Harapan Kaum Buruh pada Para Kandidat.	122
Bab V. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan.	
5.1. Kesimpulan	129
5.2. Implikasi.....	134
Daftar Referensi	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kudus per Kecamatan tahun 2007.....	42
Tabel 4.2 : Profil Industri Kabupaten Kudus tahun 2007.	44
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasar Pekerjaan tahun 2007.....	45
Tabel 4.4 : Setoran Cukai Kabupaten Kudus.....	47
Tabel 4.5 : Jumlah Perolehan Kursi DPRD Kudus dalam Pemilu 1999...	48
Tabel 4.6 : Jumlah Perolehan Kursi DPRD Kudus dalam Pemilu 2004...	49
Tabel 4.7 : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pilkada 2008.....	53
Tabel 4.8 : Daftar Calon Bupati/Wakil Bupati Pilkada 2008.....	55
Tabel 4.9 : Visi, Misi dan Program Calon dalam Pilkada 2008.....	56
Tabel 4.10 : Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada 2008	62
Tabel 4.11 : Daftar Pemilih Tetap, Suara Sah, Tidak Sah dan Golput	63
Tabel 4.12 : Data Pekerjaan Penduduk Desa Kedungdowo Kaliwungu ...	64
Tabel 4.13 : Data Perolehan Suara Pilkada Desa Kedungdowo	65
Tabel 4.14 : Data Partisipasi Pemilih Pilkada Desa Kedungdowo	66
Tabel 4.15 : Data Pekerjaan Penduduk Desa Tanjungkarang Jati.....	67
Tabel 4.16 : Data Perolehan Suara pilkada Desa Tanjung Karang Jati ...	68
Tabel 4.17 : Data Partisipasi Pemilih Pilkada Desa Tanjungkarang.....	68
Tabel 4.18 : Data Jumlah Buruh Rokok di Kudus	69
Tabel 4. 19 : Data Jumlah Buruh Rokok Industri Besar di Kudus.....	69

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Kabupaten Kudus.....
- Gambar 2. Gambar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pilkada
Kabupaten Kudus Tahun 2008.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jurnal Penelitian Tesis
Lampiran 2. Pedoman Wawancara
Lampiran 3. Ringkasan Hasil Transkrip Wawancara
Lampiran 4. Ijin Penelitian
Lampiran 5. Riwayat Hidup Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung baru pertama kali untuk Kabupaten Kudus. Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kudus telah berlangsung pada tanggal 12 April 2008. Memang Pilkada Kabupaten Kudus sudah kita lewati, akan tetapi banyak catatan menarik yang dapat kita rekam dan kita baca ulang. Meski diakui memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, namun paling tidak peristiwa politik melalui pemilihan yang terbuka, telah memberi rona baru dalam wajah demokrasi di negeri ini.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kudus merupakan tonggak sejarah titik awal dari otonomi secara murni artinya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung membuktikan bahwa demokrasi sudah tumbuh secara murni dilakukan di Kabupaten Kudus.

Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2008 diikuti oleh empat pasangan yaitu : 1. H. Musthofa Wardoyo / H. Budiyo yang dicalonkan oleh PDI P dan Partai Golkar, 2. H.M. Heru Fathoni, SP / Drs. Ngatmin Alimanda yang dicalonkan oleh Partai Demokrat, PNI Marhaenis, Partai Pelopor dan Partai

Karya Peduli Bangsa, 3. Mansyur, SH / H. Agus Darmawan yang dicalonkan oleh PAN, PBR dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru, 4. H.M. Amin Munadjat, M.Si / H. Akhwan, SH yang dicalonkan oleh PKB.

Melihat peta pertarungan dalam Pilkada Kabupaten Kudus dan memprediksi siapa yang bakal menjadi pemenang awalnya cukup sulit untuk dilakukan. Namun setidaknya ada enam variabel yang bisa dijadikan parameter, yaitu *pertama* faktor identifikasi calon (figur yang diusung), *kedua* juru kampanye/sabet, *ketiga* faktor isu kampanye/Visi Misi, *keempat* faktor insentif/hibah politik, *kelima* faktor identifikasi partai dan *keenam* faktor pressure group atau kelompok penekan. Hal ini terkait dengan seberapa jauh hal tersebut mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Melalui hasil Pilkada di Kabupaten Kudus kita harapkan agar seleksi kepemimpinan yang dilakukan partai-partai oleh masyarakat yang selama ini hanya dipilih oleh sekian orang, dengan perubahan mekanisme pemilihan yang ada sekarang, bisa melahirkan pemimpin yang kredibel dan betul-betul untuk menjadi pemimpin yang dapat membangun dalam kualitas yang maksimal dan prima.

Dinamika lembaran politik akan semakin berarti bobot kedaulatan rakyat pola kinerja lembaga-lembaga politik termasuk partai-partai politik, yakni sebuah diskursus yang berbicara soal bagaimana masyarakat memahami sekaligus menghayati setiap tarikan nafas, denyut nadi dan detak jantung rakyat

dalam memberikan mandat kekuasaan. Untuk itu kesiapan infrastruktur politik dan perilaku masyarakat selaku pemilih akan menentukan agenda politik lokal tersebut berlangsung secara demokratis.

Pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kudus yang berlangsung tanggal 12 April 2008, perilaku pemilih sangat sulit diduga, khususnya para buruh rokok di pedesaan. Sebagaimana diketahui Kabupaten Kudus dikenal sebagai daerah industri rokok, secara kasar dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih di Kudus berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 572.353¹⁾ , sedangkan jumlah buruh rokok saja sebanyak 110.000 orang²⁾ , apabila masing – masing membawa satu orang keluarganya saja maka akan diperoleh 220.000 suara atau 38,43 % , sebuah angka jaminan untuk memenangkan perebutan suara.

Hal ini sangat disadari oleh kontestan sehingga ada salah satu pasangan yang berani maju sebagai calon karena mengandalkan suara dari para buruh rokok tersebut, calon tersebut adalah Mansyur As'ad yang berpasangan dengan H. Agus Darmawan dari Partai Amanat Nasional. Dalam kegiatan kepartaian Mansyur adalah sekretaris DPC Partai Demokrat, karena Ketua DPC Partai Demokrat maju sendiri sebagai calon wakil Bupati, maka Mansyur mencari kendaraan sendiri untuk maju sebagai calon Bupati dengan keyakinan memperoleh suara pasti dari kaum buruh rokok.

¹⁾ KPU Kabupaten Kudus.

²⁾ SPSI Kabupaten Kudus.

Walaupun Mansyur As'ad belum begitu dikenal dalam kegiatan politik tetapi ayahnya Mohammad As'ad adalah tokoh yang mempunyai jabatan penting dikalangan serikat pekerja rokok di Kudus juga dikenal luas dikalangan pengusaha rokok selama berpuluh tahun. Jabatan Moh As'ad saat ini adalah Ketua SPSI RTMM (Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia bidang Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman) Kabupaten Kudus, sedangkan Mansyur As'ad saat ini menjabat sebagai Wakil Ketuanya. sehingga Mansyur sangat yakin dapat memanfaatkan jaringan serikat pekerja dan para pemilik pabrik rokok.

Tetapi hasil Pilkada ternyata berbicara lain, pasangan nomor urut 1. H Musthofa Wardoyo / H Budiyono memperoleh suara 133.776 (43,88 %) , pasangan nomor urut 2. HM Heru Fathoni / Ngatmin Alimanda memperoleh suara 18.340 suara (6,02 %), pasangan nomor urut 3. Mansyur As'ad / H Agus Darmawan memperoleh suara 24.346 (7,99 %), sedangkan pasangan nomor urut 4. HM Amin Munadjat / H Akhwan Sukandar memperoleh suara sebanyak 128.393 (42,11 %) sisanya yang lain adalah suara tidak sah dan golput (248.813 atau 43,47 %).

Pilkada tersebut dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. H. Musthofa Wardoyo/H. Budiyono dengan 133.776 suara, sedangkan Mansyur As'ad/H. Agus Darmawan hanya menempati urutan ketiga dengan perolehan suara hanya 24.346. Suara itupun kemungkinan sebagian besarnya adalah milik

H. Agus Darmawan (calon wakil bupati) yang merupakan Ketua DPC PAN Kabupaten Kudus.

Lalu kemanakah suara kaum buruh rokok yang jumlahnya 110.000 ? Penelitian tentang perilaku pemilih buruh rokok di Kudus sangat menarik untuk dilaksanakan. Apa yang sesungguhnya mempengaruhi pilihan kaum buruh rokok dalam Pilkada Kudus tahun 2008. Apa yang menjadi sebab dan pengaruhnya. Hal inilah yang sangat menarik untuk diteliti.

Karena berbagai keterbatasan, maka penelitian ini akan mengambil sampel hanya di dua Kecamatan dan masing masing diambil satu Desa yang merupakan lingkungan buruh rokok, yaitu Desa Kedung Dowo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang tersebut diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Kudus.
2. Apa saja harapan buruh rokok terhadap kandidat pilkada Kabupaten Kudus.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Pertama : Mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam pelaksanaan pilkada langsung di Kabupaten Kudus.
- Kedua : Untuk mengetahui apa yang diharapkan dari kaum buruh rokok dari para cabup/cawabup dalam pilkada langsung.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Landasan teoritis dalam penelitian sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat diakui kebenarannya secara ilmiah, maka pada bab ini diuraikan tentang landasan teoritis yang meliputi kerangka konseptual, pemilihan kepala daerah langsung wujud demokrasi tingkat lokal, definisi konseptual, definisi operasional.

2.1 Kerangka Konseptual

Dalam kaitannya dengan perilaku pemilih di negara demokrasi menurut Afan Gaffar (1992)³⁾ ada dua paradigma model, yaitu model sosiologi dan model psikologi. Pendekatan sosiologi melihat masyarakat melalui status hirarki, pendukung kelompok ini percaya bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang bertingkat dan bahwa pekerjaan dan kedudukan individu berhubungan erat dengan perilaku pemilihan. Pendekatan sosiologi berasumsi bahwa kecenderungan lebih suka pilihan tertentu sebagai kesukaan dalam memberikan suara adalah hasil dari ciri-ciri latar belakang ekonomi sosial seperti pekerjaan, kelas, agama dan lain-lain. Kekuatan struktur ekonomi sosial

³⁾ Afan Ghaffar, “*Javanese Voters*” Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm 4

tradisional di masyarakat pedesaan merupakan perilaku pemilih masyarakat petani.

Paradigma kedua model psikologi ini berkembang sebagai respon atas kekurangan pada paradigma sosiologi dengan memberikan catatan kelemahan kerangka analisa sosiologi terutama dari segi metodologi. Kelas atau status sosial juga sangat penting dalam menjelaskan perilaku pemilihan di pedesaan. Orang yang berkedudukan kaya lebih banyak mempunyai otonomi dalam memberikan suara pada yang disukainya daripada petani miskin, demikian juga orang-orang desa cenderung mengikuti pemimpin mereka karena mereka menghormati dan mempercayainya.

Dua paradigma tersebut hampir sama dengan pendapat Adman Nursal

⁴⁾ bahkan lebih diperjelas dan diperinci, yaitu :

“Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih :

- Pendekatan sosiologis (madzhab Columbia)
- Pendekatan psikologis (madzhab Michigan)
- Pendekatan rasional
- Pendekatan domain kognitif (pendekatan marketing)

Pendekatan Sosiologis :

⁴⁾ Adman Nursal, 2004, “*Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*”, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, , hlm. 54

Telah dikemukakan bahwa struktur tertentu mempunyai kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu. Kognisi yang sama antara anggota subkultur terjadi karena sepanjang hidup mereka dipengaruhi lingkungan fisik dan sosiokultural yang relatif sama. Mereka dipengaruhi oleh kelompok-kelompok referensi yang sama. Karena itu mereka memiliki kepercayaan nilai dan harapan yang juga relatif sama; termasuk dalam kaitannya dengan preferensi politik. Dengan pendekatan ini para anggota subkultur yang sama cenderung mempunyai preferensi yang sama pula.

Menurut madzhab Columbia pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

Pendekatan Psikologis :

Pendekatan sosiologis tidak memuaskan semua pakar politik. Kelemahan pendekatan sosiologis antara lain terletak pada sulitnya mengukur secara tepat indikator kelas sosial, tingkat pendidikan dan agama secara materi patut dipersoalkan, apakah benar variabel-variabel sosiologis seperti status sosial ekonomi keluarga, kelompok-kelompok primer dan sekunder itu memberi

sumbangan pada perilaku pemilih jika ada proses sosialisasi. Untuk itu sosialisasilah yang sebenarnya menentukan bukan karakteristik sosiologis.

Karena kelemahan itu, muncul perilaku pemilih berdasarkan pendekatan psikologis, juga sering disebut madzhab Michigan. Pendekatan ini menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi sikap politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa ada sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politiknya yang diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu – isu dan orientasi terhadap kandidat.

Pendekatan Rasional :

Pada kenyataannya, sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Komunikasi politik dengan substansi dan strategi yang tepat mungkin saja mempengaruhi pilihan seseorang. Perubahan ini meskipun harus melalui usaha yang keras, bukan hal yang mustahil.

Pendekatan rasional itu para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum, menurut pertimbangan dan pikiran yang logis. Pendekatan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu – isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dengan demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil yang penting mendahulukan selamat. Oleh karena itu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, begitu juga mampu menilai calon atau kandidat yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat

didasarkan pada jabatan, informasi, dan pribadi yang populer atas prestasi yang dimilikinya. Menurut Situngkir (Situngkir, Hokki,2004, hlm 75) bahwa pendekatan rasional dilandasi oleh asas manfaat yang akan diperoleh pemilih. Secara sederhana pendekatan ini memilikilangkah-langkah dalam menentukan pilihannya. Pertama, kalkulasi keuntungan total yang diperoleh untuk masing-masing kemenangan kandidat bagi agen pemilih. Kedua, membuat urutan kandidat yang paling menguntungkan hingga yang paling tidak menguntungkan. Ketiga, menentukan pilihan pada yang paling menguntungkan.

Pendekatan Marketing :

Dalam mengembangkan model tersebut mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dalam memprediksi pemilih.

Seymour Martin Lipset (1963)⁵⁾ berpendapat bahwa di dunia demokrasi barat, pemilihan dapat menjadi ungkapan pergolakan kelas demokrasi, kelompok pekerja, dan golongan rendah dari masyarakat yang cenderung mendukung partai haluan kanan.

Di Jawa bagaimanapun merupakan bagian dari dunia ketiga. Strata sosial berdasarkan kelasnya agaknya lebih halus, dan anggapan kelas subyektif belum diketahui oleh orang desa.

⁵⁾ Dalam Afan Ghaffar “ *Javanese Voters* “ hlm. 9

Sulit untuk dipercaya pada model perilaku umum pemilihan di Amerika yang dikembangkan oleh Michigan School, Campbel dan kelompoknya (1966)⁶⁾ ada variabel penting yang menentukan bagaimana orang Amerika lebih suka memberikan suara yaitu partai yang sama, tujuan yang sama dan perilaku kandidat. Di Indonesia, meskipun hasilnya sangat tinggi karena peraturan pemerintah pada saat itu melarang partai oposisi untuk mengkritik pemegang jabatan utama dengan bebas memilih. Pemerintah mendukung orang-orang nasionalis untuk menjadi kandidat.

Karl Jackson Parangin-angin (1980) memberikan analisis orang-orang Sunda di Jawa Barat dalam perlawanan Darul Islam pada tahun 1948-1962 M, analisisnya berdasarkan pada konsep otoritas tradisional yang diperkuat oleh Selo Soemarjan (1963), Koentjoroningrat (1967) Donald Fagg (1958) Hofstede (1971) dan Sarto Kartodirjo (1984)⁷⁾ juga menerapkan konsep ini dalam menganalisa struktur kekuasaan di Indonesia, yang mereka temukan adalah pembentukan fenomena sosial umum di masyarakat jawa. Ada kekuatan yang berpengaruh di belakang kepemimpinan adalah kekuasaan tradisional penduduk desa di Jawa. Seorang analis politik Indonesia Harry Tjan Silalahi menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjelaskan perilaku pemilih di Indonesia adalah

⁶⁾ *ibid*, hlm. 10

⁷⁾ Afan Ghaffar, *op.cit.* hlm. 12

aturan yang berlaku yang dipengaruhi oleh “traditional authority” dengan bentuk-bentuk dari “paternalisme of “bapakisme” (1977)⁸⁾

Traditional authority tersebut dalam bentuk yang ada di masyarakat Jawa dapat berupa lurah atau kepala desa yang merupakan pemimpin formal, juga dalam bentuk pemimpin tidak formal seperti ulama, Kiyai, para guru bahkan dukun-dukun yang ada di desa cukup mempunyai pengaruh. Hal ini senada dengan pendapat Koentjaraningrat⁹⁾

Lurah adalah penghubung antara penduduk desa dan pejabat eselon pemerintah yang lebih tinggi. Lurah sebagai penghubung komunikasi pemerintah dan dunia luar kepada penduduk desa secara umum dan secara individual melalui administrasi desa dan bahkan komunikasi melalui surat dengan pengawasan orang tertinggi selain pemimpin resmi, ada pula pemimpin tak resmi yang posisinya mencakup latar belakang dan pengaruhnya. Bentuk lain dari pemimpin tak resmi adalah mereka yang berdakwah agama, misalnya kiyai atau ulama. Pemimpin tersebut sangat dihormati karena penguasaan mereka akan syariaah agama (hukum Islam).

Pemimpin lain yang juga dihormati di kalangan masyarakat adalah guru. Guru adalah seseorang yang fungsinya sebagai guru spiritual atau bisa disebut sebagai dukun. Dukun dikenal dengan kemampuannya mengobati

⁸⁾ *ibid*, hlm. 13

⁹⁾ *ibid*, hlm. 132

berbagai penyakit bahkan di era modern sekalipun, demikian dukun ini juga berfungsi untuk memecahkan persoalan hidup mereka.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Geertz (1960, p.97) bahwa dukun mempelajari ilmunya dari orang tuanya ataupun dukun lainnya. Dukun cukup berpengaruh dalam penentuan masyarakat untuk memilih pemimpin maupun tidak memilih.

“Dari fenomena tersebut dapat digambarkan bahwa orang-orang dalam memberikan suara pada suatu pemilihan atas dasar kepatuhan mereka terhadap para pemimpin tertentu dalam sebuah desa.”¹⁰⁾

Disamping itu dalam mensukseskan pemerintahan berkaitan dengan perilaku pemilih, menurut John K. White, menyatakan : “Selama 50 tahun belakangan, ada hasrat consensus yang muncul yang menyebutkan bahwa partai politik begitu penting dalam mensukseskan pemerintahan dan ada dua paradigma partai politik yang paling penting yang muncul pada abad ke-20 yaitu pendekatan rasional efisien dan pendekatan tanggung jawab partai”¹¹⁾

Pendekatan rasional : pendekatan ini pertama kali dikemukakan oleh Antony Downs. Pendekatan ini menekankan kegiatan pemilihan partai secara luas dengan berbagai fungsi. Memenangkan pemilu merupakan alasan utama pendirian partai. Pemilih juga bertindak rasional dengan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh kandidat partai politik yang menjadikan

^{10 2)} *ibid*, hlm. 150

¹¹⁾ John K. White, (www.apsanet.org /27 Pebruari 2007 Internet).

pemilihan itu bermanfaat bagi mereka secara pribadi. Sebagai dampak berkurangnya partai politik, pilihan pendekatan Down ini menjadi pilihan para pakar politik.

Adapun pendekatan tanggung jawab partai adalah dalam perkembangan selama abad 20, komite asosiasi pakar politik Amerika menjadi penasihat utama pendekatan partai yang bertanggung jawab. Pada tahun 1950 komite tersebut menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa sistem partai politik yang efektif yang disarankan adalah pertama bahwa partai-partai tersebut mampu mengusung program-program yang telah mereka komitmenkan sendiri, kedua parta-partai tersebut mempunyai cukup hubungan internal untuk mewujudkan program-program tersebut. Partai haruslah dapat menunjukkan pencapaian masalah-masalah kesatuan partai karena hal tersebut memberikan sebuah pilihan yang jelas bagi pemilih dalam kampanye pemilihan umum. Hal tersebut membuat partai politik pemenang mendapat mandate untuk memerintah dan hal tersebut memastikan partai politik sebagai instrument dapat direvolusi secara illegal oleh pemilihnya.

Pendapat lebih lanjut dalam perilaku pemilih pengaruh tim sukses (tim kampanye) cukup dominan. Pendapat tersebut disampaikan oleh US. TIARSA, yang menyatakan : “Sejak demokrasi kita menentukan pejabat politik (Gubernur, Walikota/Bupati, sekarang Presiden) harus melalui proses politik yakni pemilihan. Mau tidak mau calon membutuhkan juru kampanye atau pengumpul suara. Setiap pemilihan bagaimanapun bentuk dan sistemnya pasti

melibatkan orang atau kelompok orang yang bertugas mensukseskan calon yang bersangkutan. Kelompok orang itulah yang melakukan berbagai bentuk trik, kasak-kusuk, berorasi bahkan mungkin saja kampanye dalam bentuk agitasi. Apalagi dalam pemilihan langsung peranan manajemen kampanye semakin dibutuhkan”¹²⁾

Baik dalam pemilu maupun pilkada langsung semua partai politik peserta pemilu/pilkada langsung membentuk badan atau tim pemenangan atau tim sukses. Badan atau tim itulah yang bertanggung jawab atas perolehan suara partai politik maupun para kandidat. Badan/tim itu pulalah yang menentukan langkah-langkah strategis, membuat berbagai yel, membuat isu dan kontra isu, melakukan pendekatan kepada media masa dan materi serta sarana kampanye. Sejak dini mereka menyiapkan para jurkam dengan pembagian wilayah disesuaikan dengan karakter masyarakat di masing-masing wilayah.

Bila dilihat dari segi tanggung jawab dan tata kerja tim sukses, tidak berlebihan ada yang menyebut tim sukses adalah pecalang (di Karawang), jagabaya (di Priangan) dan sabet (di Jawa Tengah).

Tim sukses merupakan pacalang atau jagabaya atau sabet dalam format modern. Seperti juga pecalang/sabet/jagabaya, tim sukses merupakan profesi yang tidak semua orang mampu melakukannya. Tim sukses yang benar-benar professional memiliki jaringan sangat kompleks. Mereka mampu mengakses

¹²⁾ US. Tiarsa R, “Tim Sukses”, www.pikiranrakyat.com/cetak/0504102/07.dat.HTM, Internet, tanggal 27 Februari 2007

hampir semua informasi yang berkaitan dengan potensi pemilih di semua daerah, khususnya di daerah pemilihan (DP) tempat calon dicalonkan.

Ada beberapa tim sukses, baik yang menangani para kandidat, menata manajemen modern. Jauh sebelum pencalonan mereka sudah melakukan pemilihan di berbagai daerah tentang popularitas kandidat. Mereka juga melakukan polling secara acak untuk mendapatkan input awal. Setelah melakukan analisis mereka menentukan strategi kampanye. Mereka membuat jadwal yang harus ditaati secara ketat oleh kandidat. Melalui jaringannya yang sangat luas mereka mampu mengerahkan massa ketika kandidat yang bersangkutan melakukan silaturahmi politik.

Disamping tim sukses yang benar-benar profesional banyak pula “tim sukses jadi-jadian”, perorangan atau kelompok orang mendatangi kandidat. Mereka mengaku punya akses sangat kuat terhadap sejumlah tokoh panutan, melalui tokoh itu tim sukses meyakinkan kandidat, ia akan mampu mengumpulkan sekian ribu suara, karena kandidat yang tengah butuh dukungan, tanpa berfikir panjang, menyambut hangat “bualan manajer tim sukses itu”. Tentunya dengan mudah ia mengeluarkan dana puluhan juta dan berbagai atribut yang mendukung pencalonannya. Justru mereka itulah yang meramaikan pasar kandidat karena yang mereka tangani bukan hanya dua atau tiga orang kandidat. Sama sekali tidak ada larangan orang berprofesi sebagai tim sukses. Di Indonesia belum ada kode etik tim sukses. Seorang manajer tim

sukses bisa juga menangani beberapa orang kandidat dari beberapa partai politik.

2.2 Pemilihan Kepala Daerah Langsung Wujud Demokrasi Tingkat Lokal

Demokrasi adalah konsep yang sangat tua yakni abad ke-6 sebelum masehi sampai dengan pertengahan abad ke-4 sebelum masehi dan dipraktikkan di polis-polis (negara kota) di athena dan sekitarnya. “*People*” dalam konteks Yunani kuno adalah warga negara laki-laki budak, warga pendatang dan wanita tidak tergabung memiliki hak pilih.

“Istilah Demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government of rule by the people*” Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.¹³⁾ Demokrasi di Athena merupakan sebuah contoh demokrasi dimana seluruh warga negara yang memiliki hak pilih menyuarakan secara langsung aspirasinya. *Elected official* tidak memutuskan masalah publik. Bagi orang Yunani kuno, memilih segelintir orang dan kemudian memberinya mandat untuk menentukan kepentingan umum adalah *oligarkhy*. Demokrasi bagi mereka, adalah kesejahteraan dalam memberikan keputusan. Bagi filosof seperti Aristoteles, demokrasi seperti yang kita alami sekarang, dimana kita memilih orang-orang untuk diberi mandat mengurus kehidupan publik bukanlah demokrasi yang sebenarnya.

¹³⁾ Miriam Budiharjo, 1989, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, PT Gramedia, Jakarta, , hlm 50 *ibid*

Sesudah perang Dunia ke II kita melihat gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara. “Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagaimana yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations ad vocated by influential proponents*).¹⁴⁾

Di dalam masyarakat feodal , tanah hanya dimiliki oleh para bangsawan. Sedangkan rakyat jelata dianggap menyewa tanah dan diharuskan memberi upeti atas hasil garapan tanah tersebut. Konsep representasi timbul ketika kalangan rakyat jelata (*peasant*) protes karena kaum bangsawan menaikkan pajaknya (bisanya untuk biaya peperangan), karena tidak mungkin mereka semua bicara satu persatu dengan sang raja, terpaksa aspirasi mereka harus disalurkan lewat wakil-wakilnya (*representatives*). Proses tawar menawar mereka dengam bangsawan kemudian menjadi lembaga perwakilan (*representation*).

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga ini berkembang menjadi salah satu kamar dalam pertemuan negara-negara dalam parlemen tertua di dunia, yaitu *House of Commons* dalam parlemen Inggris.

¹⁴⁾ *ibid*

Pada umumnya orang beranggapan bahwa setelah ikut pemilihan umum mereka telah menentukan jalannya pemerintahan padahal dalam kenyataannya aspirasi rakyat akan selalu mengalami distorsi. Pada demokrasi perwakilan yang kita praktekkan sekarang ini, logikanya 1 orang dipilih untuk mewakili misalnya 400.000 konstituennya. Artinya 1 orang anggota DPR tersebut seharusnya bisa menyerap dan menyuarakan aspirasi dari sejumlah 400.000 orang. Pada prakteknya, kita tidak pernah sekalipun mendengar bahwa secara faktual, aspirasi dari 400.000 orang tersebut diwakilkan kepada wakilnya. Tidak pernah seorang anggota DPR ketika akan membuat undang-undang kembali kepada daerah pemilihan dan menanyakan kepada konstituennya, apakah para pemilihnya itu menyetujui pasal per pasal apa dari rancangan undang-undang yang akan disahkan itu. Realitanya, mereka hanya akan duduk di ruangan sidang dan mengasumsikan bahwa rakyat yang mereka wakili menyetujui apa-apa yang mereka bahas. Suara satu anggota parlemen dianggap sebagai penjelmaan dari suara ratusan ribu pemilihnya. Padahal apabila ditanyakan pada rakyat yang diwakili, belum tentu mereka setuju terhadap apa-apa yang tertulis dalam undang-undang.

Pada zaman demokrasi modern, kelas yang diatur adalah kalangan buruh dan pekerja. Eksploitasi yang dilakukan kalangan elite atas buruh dan pekerja secara jelas diterangkan oleh Marx dalam karya-karyanya yang kurang relevan apabila diterangkan di sini. Yang jelas faktor-faktor *Ruling Class* seperti yang terjadi pada masyarakat feodal tetap dapat ditemukan pada masyarakat

demokrasi modern. Salah satunya adalah faktor keturunan (*hereditary*). Seperti halnya pada masyarakat feodal yang memperoleh status ruler karena keturunan, pada masyarakat demokrasi modern pun banyak dijumpai individu-individu yang memasuki kancah perpolitikan karena hal ini, memang dalam masyarakat demokrasi modern faktor keturunan bukanlah faktor langsung yang menentukan seperti dalam masa feodal. Artinya apabila bapaknya presiden, tidak otomatis anaknya menjadi presiden. Tapi faktor keturunan mengambil bentuk yang lain, yakni timbulnya dinasti-dinasti politik. Hampir di semua negara terdapat dinasti- dinasti politik, seperti dinasti Bhuto di Pakistan, dinasti Aquino di Filipina dan dinasti Sukarno-Wachid di Indonesia.

Demokrasi perwakilan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa distorsi. *Power tends to corrupt* ketika para wakil rakyat sudah duduk di parlemen, maka mereka memiliki kepentingan yang relatif berbeda dari kepentingan mereka yang diwakilinya. Seringkali mereka berpendapat bahwa mereka lebih mengetahui apa yang terbaik untuk para pemilihnya, hal ini akan mendistorsi aspirasi. Namun demikian terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir distorsi aspirasi tersebut. Diantaranya yang menjadi pilar utama demokrasi modern adalah hal-hal berikut ini,

Salah satu warisan penting demokrasi langsung Yunani kuno adalah inisiatif. Masyarakat menentukan sendiri hal-hal apa yang penting bagi mereka dan hal-hal apa yang mereka lakukan.

Jadi masyarakat tidak semata-mata mempercayakan hajat hidup kepada wakil rakyat dan menyerahkan inisiatif pemerintahan bagi mereka. Inisiatif dilakukan di Swiss, baik pada tingkat federal perkotaan (*centional*). Inisiatif juga dilaksanakan di Amerika Serikat baik pada tingkat federal, propinsi maupun kota sejak 1977.

Referendum adalah kunci utama dalam *semi-direct democracy* dan merupakan satu-satunya mekanisme dalam negara demokrasi langsung. Melaksanakan pemerintahan dengan referendum memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, aspirasi rakyat dapat diserap secara jelas oleh penguasa, kerugiannya referendum dapat menciptakan iklim politik yang tidak konsisten. Referendum juga tidak dirasa efisien untuk hal-hal yang bersifat teknis. Oleh karena itu, di banyak negara referendum hanya dibatasi pada masalah-masalah yang sangat fundamental, seperti perubahan konstitusi.

Mekanisme *recall* merupakan pilar ketiga demokrasi modern. *Recall* adalah mekanisme penggantian seorang wakil rakyat dari jabatannya oleh para konstituennya sebelum masa jabatannya usai.

Setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Inilah salah satu perbedaan dasar tatanan demokrasi dengan tatanan politik otoriter dan kediktatoran. Dalam sistem otoriter atau kediktatoran, penyelenggara pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada rakyat.

Penyelenggara pemerintahan menempatkan diri diatas rakyat dan menganggap diri sebagai sumber dari segala tatanan yang berlaku. Seperti

ungkapan *I'Etat Cest Moi* (aku adalah negara). Bukan penguasa yang tunduk kepada rakyat, tetapi rakyat yang harus tunduk pada kehendak penguasa (sistem otoriter).

Sistem pemerintahan adalah suatu pengertian yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan dalam suatu tatanan negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi terdapat prinsip *geen macht zonder veraant wordelijkheid* (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggungjawaban), yang dimaksud pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban terhadap rakyat. Salah satu perbedaan dasar tatanan demokrasi dengan tatanan ekonomi otoriter atau kediktatoran dalam sistem otoriter atau kediktatoran, penyelenggaraan pemerintahan adalah tidak adanya pertanggungjawaban pada rakyat.

Demokrasi merupakan suatu proses pendidikan, bukan suatu yang dapat diciptakan dalam waktu sekejap. Karena itu, betapa penting proses pendidikan dan latihan berdemokrasi, baik pada institusi sosial, ekonomi, budayaa apalagi pada institusi politik. Pendidikan dan latihan berdemokrasi dilakukan baik dalam bentuk kelembagaan maupun proses pengelolaan kelembagaan.

Pemilihan kepala daerah langsung disamping sebagai wahana proses pendidikan berdemokrasi, juga merupakan wujud demokrasi tingkat lokal yang merupakan perubahan besar dalam ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan signifikan terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diantaranya sistem multipartai, pemilu 1999 yang bebas dari intervensi penguasa. Selanjutnya pada pemilu 2004 selain diikuti oleh multipartai, juga dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam sistem pemerintahan lokal proses demokrasi juga terjadi diantaranya tampak pada penerapan prinsip-prinsip otonomi yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Disamping itu setelah berlakunya undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya mengamanatkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 yang lalu. Dengan demikian proses demokratisasi pemerintahan lokal semakin terwujud di daerah-daerah.

Perubahan mendasar diberlakukannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemilihan tidak langsung ke pemilihan langsung oleh rakyat. Implikasi dari perubahan sistem pemilihan tersebut sebagaimana tertuang dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 menyangkut masalah cara atau metode dalam pelaksanaan rekrutmen pejabat politik yang legitimet.

Menurut Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory*, memberi definisi sebagai berikut. Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁵⁾

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga telah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat di berbagai daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan. *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Seperti disebutkan dalam penjelasan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

¹⁵⁾ Joko J. Prihatmoko, 2005, "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung*", *Filosofi Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, LP3M Universitas Wachid Hasyim, Semarang, hlm. 204

Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratannya dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum. Daripada membentuk lembaga penyelenggara baru, maka demi efisiensi, KPU Daerah yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2003 diberi kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk juga diberi kewenangan menyusun semua tata cara yang berkaitan dengan tahap persiapan dan pelaksanaan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Secara umum, gambaran pilkada tidak jauh berbeda dari pilihan presiden secara langsung. Dari 152 pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah, desain pilkada menyerupai pilihan presiden. Yang berbeda antara lain pilkada dilaksanakan KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD (pasal

4). Kemudian daftar pemilih adalah yang terdaftar sebagai penduduk daerah bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP dan telah menetap maksimal enam bulan. Daftar pemilih itu akan divalidasi dengan melibatkan petugas RT dan RW setempat pasal 15 sampai pasal 32). Setiap pemilih akan mendapat kartu pemilih baru yang dibuat oleh KPUD. Dengan demikian kartu pemilih yang dimiliki warga saat pemilu 2004 dan pilihan presiden dinyatakan tidak berlaku.

Semangat undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki pilkada hanya berlangsung satu putaran. Meski demikian kemungkinan dua putaran seperti pilihan presiden tetap terbuka, hanya peluangnya sangat kecil, sebab pemenang tidak diharuskan mengumpulkan suara di atas 50 persen. Jika tidak ada pasangan yang meraih separoh plus satu, pasangan calon yang mendapat suara lebih 25 persen suara ditetapkan sebagai pemenang. Putaran kedua dimungkinkan jika tidak ada satupun pasangan calon yang meraih lebih dari 25 persen suara. Namun peluang itu sangat kecil karena pasangan calon harus didukung partai politik atau gabungan partai politik yang meraih 15 persen dari kursi DPRD. Dengan aturan itu, hanya beberapa partai politik yang bisa menetapkan pasangan calon secara mandiri.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung bila kita melihatnya dari sisi perspektif teoritis dan perspektif praktis dapat diuraikan sebagai berikut :

Dilihat dari perspektif teoritis, pilkada langsung merupakan sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem pilkada langsung, menurut Joko J. Prihatmoko,

“Sistem pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan system sekunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystem*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral proses* dan *electoral law enforcement*. *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menempatkan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral process* dimaksudkan seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pilkada yang bersifat legal maupun teknis. *Electoral law enforcement* yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada baik politis, administrasi maupun pidana”.¹⁶⁾

Secara teoritis ketiga bagian tersebut merupakan hal yang harus dapat dilaksanakan secara serentak dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, baik tentang mekanisme, prosedur maupun tata cara dalam pilkada langsung.

Bila dilihat dari perspektif praktis, bahwa tujuan pelaksanaan pilkada langsung agar dapat memilih pemimpin pemerintahan lokal baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang sesuai dengan kehendak rakyat. Rekrutmen politik lewat penyeleksian rakyat terhadap kandidat yang merupakan figur yang akan dicalonkan menjadi pemimpin mereka baik merupakan pemimpin yang memegang jabatan publik sekaligus jabatan politis. Proses rekrutmennya secara demokrasi partisipatoris

¹⁶⁾ *ibid*, hlm 201

perlu mendapat perhatian. Tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.3 Definisi Konseptual

Konsep dapat diartikan suatu abstraksi suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Penggunaan definisi konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemahaman dengan menggunakan suatu istilah tertentu untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan.

“Perilaku pemilih yang diharapkan adalah ekspresi mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu”¹⁷⁾

Dua ahli perilaku konsumen, Peter dan Olson (1993) dalam Adman Nursal (2004, hml 23) memberi sebuah batasan makna (*meaning*), yakni interpretasi seseorang terhadap stimulus yang berasal dari lingkungannya. Bagaimana sebuah stimulus diinterpretasikan tidak hanya ditentukan oleh stimulus itu sendiri. Makna yang dihasilkan oleh interpretasi itu tergantung pada dan berinteraksi pada pengetahuan, pengalaman dan keyakinan yang tertanam pada benak orang yang melakukan interpretasi. Oleh sebab itu makna yang terbentuk dalam proses interpretasi itu merupakan persepsi.

¹⁷⁾ Adman Nursal, op.cit. hlm : 22

“Dalam literatur Psikologi (misalnya Wirawan, 1999)¹⁸⁾, manusia harus dilihat sebagai subyek yang menentukan perilakunya sendiri. Perilaku ditentukan oleh adanya interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam individu dan faktor lingkungan. Interaksi itu terjadi dalam kesadaran atau kognisi seseorang. Kognisi adalah bagian dari jiwa manusia yang mengarah informasi, pengetahuan, pengalaman, hasrat dan perasaan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri sehingga terjadi simpulan-simpulan yang selanjutnya menghasilkan perilaku”

Pekerja/buruh menurut pengertian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan buruh rokok adalah semua pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan rokok, yang merupakan mayoritas buruh di Kudus.

Dengan demikian yang dimaksud perilaku pemilih buruh rokok adalah ekspresi buruh rokok untuk mendukung dan menjatuhkan pilihannya pada kandidat tertentu dalam pelaksanaan pilkada langsung di Kabupaten Kudus pada tanggal 12 April 2008.

Sedangkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung adalah rekrutmen pejabat politik/publik di daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat/pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana

¹⁸⁾ *ibid*, hlm : 25

yang diatur dalam Undang-undang no. 32 tahun 2004 jo. Perpu no. 3 tahun 2005 dan PP no. 6 tahun 2005 jo. PP no. 17 tahun 2005.

2.4 Definisi Operasional.

Perilaku pemilih buruh rokok dalam pilkada langsung di Kabupaten Kudus dalam suatu arena politik tentunya dapat dipahami dari berbagai aspek, diantaranya faktor- faktor yang mempengaruhi pilihan kaum buruh rokok dan apa harapan –harapan dari kaum buruh terhadap calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilih., karenanya penelitian ini berangkat dari masalah tersebut, kemudian mengambil sampel dua desa di dua kecamatan yaitu Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati dimana terdapat banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh rokok.

Pola perilaku melalui identifikasi terhadap kaum buruh yang menggunakan hak pilihnya disebabkan karena peran para sabet, aspek kompensasi material atau insentif, isu kampanye, identifikasi figur pasangan calon bupati/wakilnya , peran partai pengusung dan pressure group atau kelompok penekan yang berperan dalam kegiatan pemilihan langsung tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu model penelitian dengan mencatat, mendeskripsikan dan menginterpretasikan perilaku pemilih buruh rokok di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati pada Pilkada di Kabupaten Kudus tanggal 12 April 2008. Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”²³⁾

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan.

²³⁾ Kirk dan Miller, Bogdan dan Taylor dalam Moloeng, 2001, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosda Karya, Bandung, , hlm 3

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kaum buruh rokok di desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati karena terdapat beberapa pabrik rokok dan banyak penduduknya yang bekerja sebagai buruh rokok. Studi ini sangat memperhitungkan faktor-faktor kontekstual, sehingga teknik sampling digunakan untuk menarik informasi secara mendetail.

Penelitian ini menggunakan sampel tidak probabilita (*non random sampling*). “Sampel tidak probabilita adalah setiap anggota populasi tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel”²⁴⁾

Memilih sampel ini karena tidak memungkinkan diperoleh daftar populasi yang lengkap di lokasi penelitian. Adapun jenis sampel tersebut kami mempergunakan penarikan sampel secara sengaja dan penarikan sampel bola salju (*snowball sampling*). Penarikan sampel secara sengaja (*purpose sampling*), penentuan sampel cara ini kami terapkan untuk menentukan responden yang tahu persis persoalan yang menyangkut permasalahan penelitian, yaitu tentang perilaku pemilih kaum buruh rokok di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu dan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati. Responden sengaja kami pilih dari masyarakat Desa Kedungdowo dan Tanjungkarang yang bekerja sebagai buruh rokok. Penarikan sampel bola salju (*snowball sampling*). Cara penarikan sampel bola salju ini kami buat menyerupai bola salju. Dimulai dari

²⁴⁾ Ahmad Taufiq, op. cit. hlm. 10

jumlah yang sedikit yang akhirnya menjadi banyak. Penarikan sampel bola salju ini kami lakukan pertama menentukan satu atau beberapa responden kami wawancarai dan responden tersebut berperan sebagai titik awal penarikan sampel. Responden berikutnya ditetapkan oleh petunjuk dari responden sebelumnya, tentunya petunjuk tersebut menyangkut informasi mengenai topik penelitian, kemudian kami mewawancarai responden tersebut dan demikian selanjutnya sampai pada saat dimana kami memutuskan bahwa jumlah responden telah mencukupi. Di dalam pelaksanaan disini kami memilih responden yang dapat secara mudah kami jumpai dan dapat memberikan informasi yang diinginkan yaitu masyarakat yang bekerja sebagai buruh rokok di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu dan Tanjungkarang Kecamatan Jati. Adapun dalam penentuan tokoh itu kriterianya sesuai dengan informasi responden lainnya yang memberikan kriteria tentang ketokohan seseorang. Semakin banyak informasi dari responden tentang ketokohan seseorang semakin kami tentukan kriteria ketokohnya. Jumlah sampel tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi ditentukan di lokasi penelitian. Jika kebutuhan data tercukupi maka penarikan sampel dihentikan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada umumnya pertama wawancara, kedua teknik observasi, ketiga dokumentasi.”²⁵⁾

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

Teknik wawancara; teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam. Wawancara sebagai penuntun peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan. Selanjutnya informan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapatnya tentang sesuatu gejala, fenomena dan situasi. “Hubungan antara peneliti dan topik (*subject matter*), peneliti adalah ko-pencipta jalannya penelitian yang secara khas diperoleh melalui wawancara”.²⁶⁾

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data-data dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini digali dari berbagai sumber data baik primer maupun sekunder.

2. Data primer; mereka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu kaum buruh rokok di desa itu, pimpinan baik pimpinan formal maupun pimpinan informal, tokoh partai politik yang memenuhi karakteristik di Kabupaten

²⁵⁾ Hamidi, 2001, “*Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*”, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm 72

²⁶⁾ Hartono, 2003, “*Bagaimana menulis Tesis*” *Petunjuk komprehensif tentang isi dan proses*”, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 86

Kudus, di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu dan Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus .

3. Data Sekunder; diperoleh dari dokumen seperti peraturan perundang-undangan, data dari KPU, referensi maupun catatan-catatan di Kantor Pemerintahan Desa maupun Kantor Pemerintah Kecamatan.

Adapun sumber data primer diperoleh dari personil yang dianggap mempunyai posisi kunci terhadap suatu peristiwa, fenomena yang diteliti, informan kunci tersebut adalah buruh rokok kebanyakan, Tim sukses dan para sabet, pimpinan sarekat pekerja pabrik rokok, tokoh partai politik, dan tokoh masyarakat.

3.4 Teknik Pemeriksaan dan Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini validitas data diuji dengan menggunakan triangulasi data yakni peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mendapatkan data yang sejenis, sehingga didapat pemahaman lintas data yang menyeluruh. Validitas data akan diperkuat dengan cara *peer debriefing* dan analisis kasus negatif. Untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan empat cara :

a. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas ini merupakan konsep pengganti dari konsep validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Kriteria kredibilitas ini berfungsi untuk melakukan penelaahan data secara akurat agar tingkat kepercayaan

penemuannya dapat dicapai. Adapun teknik untuk menentukan kredibilitas penelitian ini adalah: memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus menerus; triangulasi; membicarakan dengan orang lain; menganalisis kasus negative; menggunakan bahan referensi; dan mengadakan *member check*.

b. Keteralihan (*transferability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh generalisasi. Dalam kualitatif, generalisasi tidak dipastikan. Ini bergantung pada pemakai, apakah akan diaplikasikan lagi atau tidak. Yang jelas, tidak akan terjadi situasi yang sama. Transferabilitas hanya melihat “kemiripan” sebagai kemungkinan terhadap situasi-situasi yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk transferabilitas ini dilakukan dengan uraian rinci (*thick description*).

c. Kebergantungan (*dependability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep *reliability* dalam penelitian kuantitatif. Reliability tercapai bila alat ukur yang digunakan secara berulang-ulang, dan hasilnya *sama*. Dalam penelitian kualitatif, alat ukur bukan benda, melainkan manusia atau si peneliti itu sendiri. Lain daripada itu, rancangan atau desain penelitian terus berkembang. Yang dapat dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengumpulan data sebanyak mungkin selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengukur kebergantungan adalah auditing, yaitu pemeriksaan data yang sudah dipolakan.

d. Kepastian (*confirmability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari konsep “objektivitas” dalam penelitian kuantitatif. Bila pada kualitatif, objektivitas itu diukur melalui orang atau penelitiannya. Diakui bahwa peneliti itu memiliki pengalaman subjektif. Namun, bila pengalaman peneliti tersebut dapat disepakati oleh beberapa orang, maka pengalaman peneliti itu bisa dipandang objektif. Jadi persoalan objektivitas dan subjektivitas dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh seseorang.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga data lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis sehingga dapat menjadi data yang dapat mempunyai makna dan mempunyai arti setelah data tersebut diproses.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan menggambarkan fenomena tertentu secara lebih rinci, sedangkan alasan digunakannya teknik ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetail dan mendalam dari beberapa interaksi dan fenomena sosial terutama yang erat kaitannya dengan variabel-variabel yang diteliti.

Kedua : Analisis deskriptif kualitatif dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan konsep.

Dalam analisis data digunakan beberapa cara :

a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Penelitian ini menggunakan analisis ilmiah tentang isi (pesan) suatu komunikasi secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak dikaji

b. Analisis Sintesis

Dengan Analisis sintesis, dilakukan pemeriksaan secermat mungkin tesa-tesa yang berkembang mengenai perilaku pemilih buruh rokok untuk selanjutnya dicari antitesanya sehingga kemudian muncul tesa baru guna memenuhi tujuan dalam penelitian ini.

c. Analisis Kritis

Penelitian dilakukan secara mendalam dan hati-hati terhadap tesa atau data lain yang telah berkembang saat itu. Dengan cara ini, sangat mungkin ditemukan tesa baru dan tidak mustahil bertabrakan dengan tesa lama, apalagi jika data tersebut didekati dengan fenomenologi.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Kudus terletak antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur, serta 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan.² Kabupaten Kudus berada pada jarak ± 51 Km di sebelah Timur Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang). Untuk menuju Kudus dari Kota Semarang dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan darat, dengan menggunakan kendaraan pribadi atau bus umum.

Secara geografis, Kabupaten Kudus berbatasan dengan beberapa Kabupaten di sekitarnya. Di sebelah Utara, Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

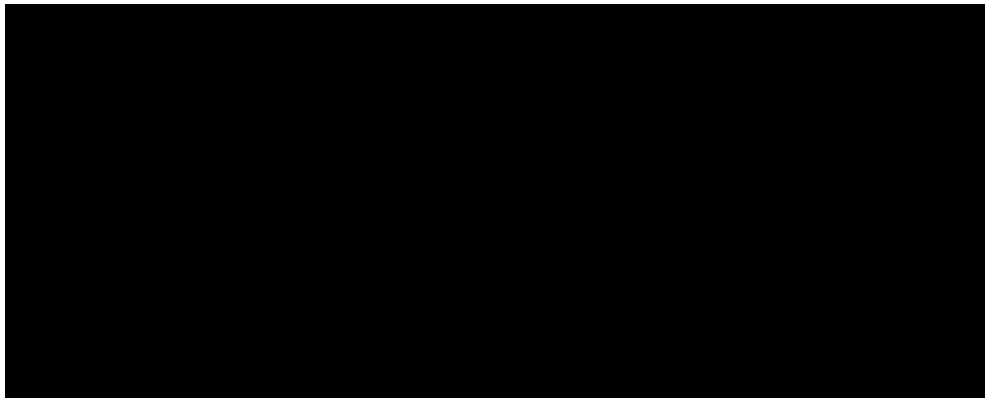
Luas wilayah Kabupaten Kudus sekitar 42.516 Ha, dan berada pada ketinggian rata-rata ± 55 meter di atas permukaan air laut. Secara umum Kabupaten Kudus yang berada di sebelah Selatan kaki Gunung Muria dipengaruhi iklim tropis, dan bertemperatur sedang, berkisar antara 18,3° (C) – 29,6° (C). Kabupaten Kudus bercurah hujan relatif rendah, yaitu rata-rata di bawah 2.000 mm/tahun, dan berhari hujan rata-rata 103 hari/tahun.

² Kudus dalam angka, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 2007.

4.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2005 tercatat sebesar 724.969 jiwa, terdiri dari 366.714 perempuan (50,58%) dan 358.255 laki-laki (49,42%). Berdasarkan penyebarannya, dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, maka jumlah penduduk terbesar secara berturut-turut ada di Kecamatan Kota sebesar 91.858 orang (12,67%), Jekulo 91.275 orang (12,59%) dan Dawe 90.963 orang (12,55%), dan penduduk terkecil jumlahnya ada di Kecamatan Bae 59.163 orang (8,16%).

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kudus Per Kecamatan 2007



Sumber : KPU Kabupaten Kudus

Perlu diperhatikan juga komposisi usia penduduk dewasa. Pada tahun 2007, penduduk dewasa yang berusia 15 – 44 tahun berjumlah 386.981 (52,15%) dan yang berumur 45 – 75 tahun ke atas berjumlah 147.602 (19,89%). Dengan demikian, masyarakat Kudus didominasi oleh penduduk berusia 15 – 44 tahun daripada penduduk yang berumur 45 - 75 tahun ke atas.

Kepadatan penduduk Kabupaten Kudus cenderung meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tercatat pada tahun 1999 kepadatan penduduk Kudus adalah 1.648 orang/Km², pada tahun 2003 kepadatannya adalah 1.705 orang/Km², dan 1.772 orang/Km² pada tahun 2007. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Kota, yaitu 8.773 orang per kilometer persegi dan kecamatan terendah kepadatannya adalah Kecamatan Undaan, yaitu 918 orang per kilometer persegi.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kudus adalah 181.169 rumah tangga. Bila dibandingkan antara jumlah penduduk (753.529) dengan jumlah rumah tangga, maka rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kudus adalah 4,15.

Kepadatan penduduk sering menimbulkan masalah kesehatan. Sejauh ini, masalah kesehatan dipicu oleh beberapa faktor, yakni masalah kesehatan karena kemiskinan dan lingkungan; masalah kesehatan yang berkaitan dengan industrialisasi termasuk pariwisata, makanan dan perilaku; masalah kesehatan yang berkaitan dengan keadaan psiko sosial keluarga dan individu; masalah kesehatan pada kelompok tertentu seperti anak jalanan, pekerja sektor informal, pekerja seks komersial, petugas kebersihan kota, remaja kota, dan kelompok usia lanjut, dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan terjadinya krisis karena bencana banjir, kebakaran, gempa dan lain-lain.

4.1.3 Kondisi Ekonomi

Kudus adalah kabupaten yang berbasis pada bidang usaha industri pengolahan (65.33%) dan perdagangan (24,90%).

Tabel 4.2. Profil Industri Kabupaten Kudus Tahun 2007

No.	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp juta)	Nilai Produksi (Rp juta)
1	Menengah dan besar	86	142.514	3.514.360,08	67.741.008,97
2	Kecil	10.146	42.676	252.812,00	2.615.676,169
Total		10.232	185.190	3.766.172,05	70.356.685,14

Sumber : <http://www.Kuduskab.go.id/>, data diperbaharui 21 September 2007 dan diakses 1 Oktober 2007.

Mengingat dua lapangan usaha tersebut begitu menjanjikan, maka dua lapangan itu menjadi gantungan hidup bagi masyarakat Kudus.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasar Pekerjaan Tahun 2007

Lapangan Usaha	PDRB (jutaan rupiah)	%	Jumlah Penduduk Berdasar Pekerjaan	%
Pertanian	517.311,99	2,42	58.269	16,17
Pertambangan & Penggalan	7.347,51	0,03	1.105	0,31
Industri Pengolahan	13.992.851,76	65,33	150.736	41,82
Listrik, Gas & Air	83.444,04	0,39	1.477	0,41

Bersih				
Bangunan	270.997,53	1,27	34.447	9,56
Perdagangan, Hotel & Restoran	5.332.328,07	24,90	53.070	14,72
Transportasi & Komunikasi	323.498,78	1,51	17.169	4,76
Bank/Lembaga Keuangan	419.347,63	1,96	4.239	1,18
Jasa-jasa	470.201,23	2,20	39.925	11,08
TOTAL	21.417.328,54	100,00	360.437	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kudus tahun 2007

Angka-angka tersebut menjelaskan kepada kita bahwa penduduk Kudus yang menggantungkan hidupnya kepada sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama (150.736 orang atau 41.82%). Kemudian disusul oleh sektor pertanian pada urutan kedua (58.269 orang atau 16.17%), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada rangking ketiga (53.070 orang atau 14.72%).

Pada sisi lain, data menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menyumbangkan 65,33 persen kegiatan ekonomi, dan sektor perdagangan memberi kontribusi sebesar 24,90 persen dari total kegiatan ekonomi Kudus pada tahun 2006. Masih pada tahun yang sama, pendapatan regional per kapita mencapai Rp 15,6 juta, sedang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp 28,9 juta.³

Akan tetapi, mengingat bahwa jumlah perusahaan di Kudus ada sekitar 10.232 unit usaha, maka ini menunjukkan bahwa banyaknya pengusaha dalam

³ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus Tahun 2006, (Kudus: BPS Kabupaten Kudus, 2007).

arti pemilik perusahaan, kira-kira tidak jauh dari jumlah itu. Dari sini dapat dikatakan bahwa warga Kudus sebagian besar bekerja pada sektor usaha milik orang lain, atau dengan kata lain menjadi buruh. Tercatat pada tahun 2005, jumlah buruh berjumlah 114.233 orang, meliputi buruh pada perusahaan rokok sekitar 80.000 orang (70%), dan buruh pada perusahaan bukan rokok berjumlah 34.233 orang (30%).⁴

Besarnya jumlah buruh rokok di atas bisa dimengerti karena secara historis munculnya produk rokok asli Indonesia yang dikenal dengan sebutan rokok kretek ini pertama kali muncul dari Kudus. Secara ekonomis, perkembangan industri rokok kretek di Kudus, mulai dari rokok sebagai kerajinan tangan sampai industri pabrikan, dan tak lepas pula rokok kretek sebagai produk industri rumah tangga khas Kudus.

Industri rokok kretek sebagai produk massal yang menyerap dan melibatkan sejumlah besar tenaga kerja (buruh), sehingga dengan demikian keberadaan industri rokok kretek sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan ekonomi warga masyarakat Kudus.

Harus diakui, bahwa industri rokok memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional dengan setoran cukainya. Setoran Cukai di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 4.4. Setoran Cukai di Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah Rp. (Juta)
----	-------	-------------------

⁴ Sumber : <http://www.Kuduskab.go.id/>, data diperbaharui 23 Juli 2005 dan diakses 1 Oktober 2007.

1.	2006	8.649.030,44
2.	2005	8.379.189,95
3.	2004	6.909.104,42
4.	2003	5.608.687,34
5.	2002	4.841.001,70

Sumber data: BPS tahun 2006

4.1.4 Kondisi Sosial Politik

Kabupaten Kudus memiliki wilayah administratif berupa 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Gebog, Dawe, Jekulo, Bae, Mejobo, dan Undaan. Pada tingkat Desa dan Kelurahan, Kabupaten Kudus memiliki 124 Desa dan 7 Kelurahan, serta memiliki 669 Rukun Warga (RW), 3.397 Rukun Tetangga (RT), dan 371 Dukuh/Lingkungan.

Pemerintahan Kabupaten Kudus memiliki 8.065 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan tingkat pendidikan, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagian besar berpendidikan Diploma dengan 33,6 persen (2.708 orang), SMP/ sederajat 32,6 persen (2.634 orang), berpendidikan Sarjana 22,3 persen (1.798 orang), berpendidikan SD/ sederajat 5,9 persen (475 orang), berpendidikan SMA/ sederajat 4,7 persen (376 orang), dan berpendidikan Pascasarjana 0,9 persen (74 orang). Berdasarkan golongan kepangkatan, PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus terdiri dari Golongan III berjumlah 62,5 persen (5.041 PNS), Golongan III 21,7 persen (751 PNS), Golongan IV 13,6 persen (1099 PNS), dan Golongan I 2,2 persen (174 PNS).

Kehidupan politik di Kabupaten Kudus cenderung stabil dan terkonsolidasi. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari hasil 2 pemilihan umum (pemilu) terakhir, yaitu Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Pada Pemilu 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memiliki 45 kursi. Sebaran perolehan kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kudus Berdasarkan partai politik dalam Pemilu 1999

No.	Partai Politik	Kursi	%
1.	PDIP	15	33,33
2.	PKB	10	22,22
3.	PPP	9	20
4.	PAN	3	6,67
5.	P Golkar	2	4,44
6.	P Keadilan	1	2,22
7.	TNI/Polri	5	11,11
Total		45	

Sumber : Kudus Dalam Angka 2006

Pada tahun 1999 PDIP memperoleh suara terbanyak seiring dengan runtuhnya Golkar karena krisis ekonomi dan politik tahun 1998, massa mengambang mengalihkan pilihannya pada PDIP sebagai perlawanan terhadap orde baru, sedangkan suara PKB adalah cerminan dari pilihan politik warga nahdhiyin (NU) yang mulai berkonsolidasi dengan pimpinan para kyai NU. Para kyai tersebut mempunyai pangaruh yang sangat kuat, di Kudus kulon ada KH Sa'roni Achmadi, KH Ma'ruf Irsyad, KH Ulin Nuha dan lainnya yang memiliki banyak santri dan sangat dipatuhi oleh kyai dan santri lain di pedesaan, apa kata kyai nya itulah yang akan dilakukan, hal ini juga disebabkan

oleh keputusan Gus Dur yang sebelumnya sebagai ketua umum PB NU untuk membuat partai sendiri sebagai wadah penyaluran politik warga NU.

Sedangkan pada Pemilu 2004, DPRD Kabupaten Kudus memiliki 45 kursi, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jumlah perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Kudus Berdasarkan Partai Politik dalam Pemilu 2004

No.	Partai Politik	Suara	%	Kursi	%
1.	PKB	84.171	21,52	9	20
2.	PDIP	58.526	14,97	6	13,33
3.	PPP	42.289	10,81	5	11,11
4.	P Golkar	39.563	10,12	5	11,11
5.	P Demokrat	37.160	9,50	5	11,11
6.	PAN	34.509	8,82	5	11,11
7.	PKS	20.514	5,25	4	8,89
8.	PKPB	13.678	3,50	2	4,44
9.	PBR	13.601	3,48	1	2,22
10.	PPIB	11.572	2,96	1	2,22
11.	PNI Marhaenisme	9.150	2,34	1	2,22
12.	Partai Pelopor	6.470	1,65	1	2,22
Total		391.070	100	45	

Sumber : KPUD Kabupaten Kudus

Sebaran perolehan suara pada pemilu tahun 2004 berubah dengan meningkatnya suara PKB, turunnya suara PDIP, meningkatnya kembali suara Golkar dan naiknya dukungan terhadap partai-partai baru. Turunnya suara PDIP terutama disebabkan karena performa anggota DPRD dari PDIP dianggap kurang berkualitas dan tidak bersih bahkan ketua DPRD periode 1999-2004 Heris Paryono yang berasal dari PDIP terbukti melakukan korupsi

dan dikenai hukuman penjara, pada saat yang sama Golkar yang kemarin dihujat kembali naik secara perlahan karena sebagian masyarakat menganggap masa orde baru kemarin lebih baik dari pada saat dipimpin oleh PDIP, sedangkan masa mengambang yang lain ingin mencoba dengan mendukung partai-partai baru.

Meningkatnya suara PKB adalah seiring dengan berhasilnya konsolidasi warga NU dan kekompakan para kyai untuk menyatukan warga nahdhiyin kedalam PKB yang dipimpin oleh Asrofi Masyito bahkan dapat menarik kembali sebagian warga nahdhiyin yang dahulu bergabung dengan PPP (misalnya kubu KH Abdullah Zaini).

4.1.5 Pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Kudus

Tanggal 12 April 2008

4.1.5.1 Tahapan Pelaksanaan Pilkada

Tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kudus mengikuti tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kudus. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kudus Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008. Secara singkat tahapan-tahapan yang pokok dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008 adalah daftar pemilih yang telah dimutakhirkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai DP.4 (Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilih Pilkada). Penyerahan DP.4 yang berbentuk kepingan CD dari pemerintah Kabupaten Kudus kepada KPUD telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2007. Kepingan CD DP.4 yang diterima KPUD tidak bisa langsung dicetak untuk diteruskan PPS, namun masih melalui proses edit format formulir, pengelompokan nama formulir berdasarkan alamat (RT/RW) dan memisahkan kolom jenis kelamin laki-laki dan perempuan, baru kemudian dicetak/*print out* untuk diserahkan kepada PPS sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Setelah diadakan cek dan recek diperbaiki pengesahan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008 dilakukan oleh PPS dalam rapat pleno tanggal 25 September 2007.

Daftar pemilih sementara yang telah disahkan, kemudian oleh PPS diumumkan kepada masyarakat, sehingga mudah diteliti. Adapun waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah tanggal 8 s/d 10 Januari 2008. pada saat Daftar Pemilih Sementara diumumkan, masyarakat pemilih diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian/perbaikan terhadap daftar nama-nama tersebut.

Selanjutnya PPS dengan bantuan aparat Desa/Kelurahan dan pengurus RT/RW mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan setelah disyahkan pada tanggal 11 Januari 2008. pengumuman tersebut sampai pada tingkat RT untuk diketahui masyarakat. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan yang dilakukan oleh PPS adalah tiga hari terhitung sejak tanggal 11 s/d 13 Januari 2008. Pada waktu Daftar Pemilih Tambahan diumumkan, PPS menerima pengajuan usul perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya dari pemilih baru dan atau anggota keluarga dapat serta menerima informasi apabila masih terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan, dan PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan apabila usul perbaikan tersebut dapat diterima. Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan paling lambat dilakukan tanggal 14 Januari 2008.

Selanjutnya penyusunan pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar Pemilih Sementara ditambah Daftar Pemilih Tambahan yang telah disyahkan tersebut oleh PPS disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008. Daftar Pemilih Tetap disyahkan oleh PPS dalam rapat pleno PPS, yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS dan diberi cap stempel oleh PPS. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 6 Feb 2008. Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh PPS, PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar.

Rekapitulasi dan penetapan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah Tempat Pemungutan Suara se Kabupaten Kudus dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.7. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus tahun 2008.

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih
1.	Kota	70.730
2.	Jati	72.733
3.	Undaan	51.489
4.	Mejobo	50.519
5.	Jekulo	73.074
6.	Bae	47.190
7.	Kaliwungu	67.320
8.	Dawe	70.807
9.	Gebog	68.491
	Jumlah	573.353

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tahun 2008.

b. Pembuatan Kartu Pemilih

Pemilih terdaftar yang pada hari dan tanggal pemungutan suara akan menggunakan hak pilihnya harus dapat menunjukkan Kartu Pemilih kepada PPS. Oleh karena itu setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan dan diumumkan, kepada pemilih terdaftar diberikan/dibuatkan Kartu Pemilih. Oleh karena itu KPUD dalam membuat Kartu Pemilih dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempersiapkan database yang akurat. Seorang pemilih hanya berhak atas 1 (satu) lembar Kartu Pemilih.

c. Pencalonan

Jadual waktu pencalonan mulai dari pendaftaran calon sampai dengan penetapan pasangan calon tanggal 27 Mei s/d 29 Juni 2006.

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten nomor 18 tanggal 23 Februari 2006 tentang penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008.

Adapun hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2008, seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel. 4.8. Daftar calon kepala daerah/wakil kepala daerah Kabupaten Kudus tahun 2008.

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai/Gabungan Partai	Ket
1.	H. Musthofa dan H. Budiono.	a. PDI Perjuangan. b. Partai Golongan Karya.	
2.	H. M Heru Fathoni, SP Drs. Ngatmin Alimanda.	a. Partai Demokrat. b. Partai Nasionalis Indonesia Marhaenis. c. Partai Pelopor. d. Partai Karya Peduli Bangsa.	
3.	Mansyur, SH H. Agus Darmawan.	a. PAN. b. Partai Bintang Reformasi. c. Partai Perhimpunan Indonesia Baru.	
4.	H.M Amin Munadjat, M.Si H. Akhwan, SH	Partai Kebangkitan Bangsa.	

Sumber : KPUD Kabupaten Kudus tahun 2008.

d. Kampanye

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan, tahapan yang paling rawan adalah pelaksanaan kampanye. Dalam kampanye tentunya masing-masing tim kampanye berusaha untuk merebut dan memperoleh simpati serta dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu tidak jarang tim kampanye berusaha mengerahkan simpatisannya secara besar-besaran dengan harapan dalam pemungutan suara nanti mereka mendapatkan dukungan suara yang besar pula.

Dalam situasi yang demikian itu tidak lepas adanya kemungkinan terjadi benturan kepentingan antar pendukung pasangan calon. Untuk menjaga agar

pelaksanaan kampanye situasi politik tetap kondusif, ketertiban dan keamanan tetap terjaga perlu selalu adanya koordinasi yang baik antara lembaga terkait.

Pelaksanaan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2008.

Tabel. 4.9 : Visi, Misi dan Program yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2008.

Pasangan Calon	Visi	Misi	Program
1. H. Musthofa dan H. Budiyo.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kudus yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi Peningkatan Kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang murah dan berkualitas. 3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang murah dan terjangkau. 4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian jaminan kredit UMKM oleh Pemerintah Daerah. 2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di daerah pinggiran sebagai upaya pemerataan pembangunan ekonomi. 3. Peningkatan manajemen dan permodalan lembaga ekonomi desa. 4. Peningkatan efisiensi pendidikan 9 murah, mudah dan berkualitas) 5. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

			<p>6. Memberikan santunan kepada warga yang meninggal dunia untuk meringankan beban keluarga.</p> <p>7. Pembebasan biaya pengurusan pembuatan KTP dan KK.</p>
<p>2. H.M Heru Fathoni, SP dan Drs. Ngatmin Alimanda.</p>	<p>Terwujudnya Kudus yang Nasionalis, Agamis.</p>	<p>1. Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, professional dan memberikan pelayanan prima.</p> <p>2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang handal dan religious di bidang pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.</p> <p>3. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum.</p> <p>4. Mengembangkan perekonomian yang sehat dan berkeadilan sesuai dengan potensi industri, perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata dalam rangka meningkatkan</p>	<p>1. Studi kelayakan bandara perintis.</p> <p>2. Pembangunan pusat olahraga (Sport Center)</p> <p>3. Pembangunan jalan lingkar selatan.</p> <p>4. Pembangunan sekolah ukir dan border.</p> <p>5. Penghijauan dan konservasi lereng Muria.</p> <p>6. Pembentukan badan usaha daerah penyangga pangan.</p> <p>7. Pembangunan embung logung.</p> <p>8. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan modal dan peralatan bagi pengusaha kecil dan menengah.</p> <p>9. Pemberdayaan Koperasi.</p> <p>10. Penjaminan seluruh kepala keluarga melalui lembaga asuransi.</p> <p>11. Peningkatan dana alokasi umum desa.</p>

		<p>pendapatan masyarakat, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.</p> <p>5. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan yang efektif, efisien berwawasan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan potensi daerah secara kreatif dan inovatif yang didukung kapasitas pemberdayaan masyarakat.</p> <p>6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan social dengan memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin.</p>	
3. Mansyur, SH dan H.Agus Darmawan.	Kudus sebagai kota pusat pertumbuhan.	1. Terwujudnya pembangunan agama melalui pemahaman serta implementasi nilai-nilai agama yang rahmatan lil-alamin dengan mengedepankan sikap tasamuh (toleransi) dan menjunjung tinggi	----

		<p>nilai-nilai kemanusiaan.</p> <p>2. Terwujudnya penguatan basis ekonomi kerakyatan dan jaminan keamanan berinvestasi di semua sektor perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Terwujudnya pembangunan pertanian dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan di bidang konservasi lingkungan hidup.</p> <p>4. Terwujudnya kualitas pendidikan yang ditunjukkan dengan pemberian alokasi dana pendidikan sebesar 20 % lalu diikuti dengan perbaikan sistim manajerial dan peningkatan kesejahteraan tenaga edukatif baik negeri maupun swasta.</p> <p>5. Terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.</p> <p>6. Terwujudnya good and clean governance</p>	
--	--	--	--

		<p>dalam rangka memberikan seluas luasnya pelayanan bagi masyarakat bagi terciptanya daya saing daerah.</p> <p>7. Terwujudnya pembangunan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga mampu menjadi faktor daya saing daerah.</p>	
<p>4. HM Amin Munadjat, M.Si dan H. Ahwan SH.</p>	<p>Kudus yang religius, maju, adil dan sejahtera.</p>	<p>1. Tata Pemerintahan yang baik (good Government) serta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih (clean governance) dan bebas KKN.</p> <p>2. Meningkatkan potensi ekonomi Kabupaten Kudus.</p> <p>3. Infrastruktur yang semakin baik, serta sarana dan prasarana ekonomi.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan penanganan masalah social.</p> <p>5. Masyarakat yang religius.</p> <p>6. Pembangunan berwawasan lingkungan dan tata ruang serta memperhatikan kelestarian fungsi dan</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.</p> <p>2. Pengembangan UMKM melalui subsidi dan pelatihan.</p> <p>3. Menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi.</p> <p>4. Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui produk pertanian organic, pemanfaatan lahan tidur dan diversifikasi pangan.</p> <p>5. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi pedesaan dan perkotaan serta pemberdayaan desa</p>

		<p>daya dukung lahan.</p> <p>7. Meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.</p>	<p>sesuai dengan karakteristik dan potensinya.</p> <p>6. Pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, biaya yang terjangkau dan bea siswa bagi siswa berprestasi.</p> <p>7. Pembinaan generasi muda dan olahraga serta persamaan gender.</p> <p>8. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya dan cagar buaya daerah.</p> <p>9. Membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan dan pendidikan agama.</p> <p>10. Penghijauan, sosialisasi pemanasan global serta penataan tata ruang daerah.</p> <p>11. Penegakan hukum dan perlindungan HAM.</p> <p>12. Pelayanan perijinan yang ramah, mudah, murah dan terpadu.</p>
--	--	---	---

Sumber : KPU Kabupaten Kudus.

e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kudus pada tanggal 12 April 2008, dimulai sejak jam 07.00 WIB. Proses pemungutan suara berjalan lancar sampai pukul 13.00 WIB.

Dan pemungutan suara ditutup ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Setelah rapat pemungutan suara ditutup pukul 13.00 WIB dilanjutkan penghitungan suara. Penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2008 dimulai dengan membuka kotak suara yang berisi surat suara dan mengeluarkan isinya, kemudian satu persatu surat suara dibuka dan dibacakan hasil coblosan para pemilih, hal tersebut dilakukan sampai surat suara habis. Adapun hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel. 4.10 : Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008.

No	Kecamatan	Nama Pasangan Calon				Jumlah
		H Musthofa Wardoyo & H Budiyo	HM Heru Fathoni & Ngatmin Alimanda	Mansyur As'ad & H Agus Darmawan	HM Amin Munadjad & H Akhwan Sukandar	
1	Kota	8.591	2.185	5.395	20.563	36.734
2	Jati	16.181	2.939	2.781	17.553	39.454
3	Undaan	15.350	3.990	1.551	9.445	30.336
4	Mejobo	7.886	3.377	2.476	13.115	26.854
5	Jekulo	14.476	1.437	2.896	15.109	33.918

6	Bae	11.646	1.313	2.186	12.628	27.773
7	Kaliwungu	21.360	1.059	2.068	13.947	38.434
8	Dawe	25.065	1.083	1.898	12.066	40.203
9	Gebog	13.221	957	3.095	13.967	31.240
Jumlah		133.776	18.340	24.346	128.393	304.946

Sumber : KPU Kabupaten Kudus.

Tabel 4.11 Daftar Pemilih Tetap, Suara Sah, Tidak Sah, dan Golput
Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus 12 April 2009.

No	Kecamatan	DPT	Suara Sah	Tidak Sah	Golput
1	Kota	70.730	36.734	3.998	29.998
2	Jati	72.733	39.454	2.765	30.514
3	Undaan	51.489	30.336	1.026	20.127
4	Mejobo	50.519	26.854	1.353	22.312
5	Jekulo	73.074	33.918	1.644	37.512
6	Bae	47.190	27.773	2.184	17.233
7	Kaliwungu	67.320	38.434	2.070	26.816
8	Dawe	70.807	40.112	1.563	29.132
9	Gebog	68.491	31.240	2.082	35.169
Jumlah		572.353	304.855	18.685	249.813

Sumber : KPU Kabupaten Kudus.

4.1.5.2 Pelaksanaan Pilkada di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kudus

Desa Kedungdowo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Merupakan salah satu desa yang ditempati Brak Pabrik Rokok (semacam unit pabrik) yang memberikan lapangan kerja sebagai buruh giling dan batil bagi masyarakat sekitarnya.

Data Pekerjaan Penduduk di desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.12 : Data Pekerjaan Penduduk di desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Buruh Tani	153 orang
2.	Petani	509 orang
3.	Pedagang	160 orang
4.	Pengrajin	4 orang
5.	PNS	131 orang
6.	TNI/POLRI	18 orang
7.	Penjahit	214 orang
8.	Montir	2 orang
9.	Supir	167 orang
10.	Pramuwisata	0 orang
11.	Buruh/Kary Swasta	3.611 orang
12.	Kontraktor	4 orang
13.	Tukang Kayu	36 orang
14.	Tukang Batu	413 orang
15.	Guru Swasta	13 orang
	total	5.435 orang

Sumber : Profil Desa Kedungdowo Tahun 2008.

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah yang terbesar sebanyak 3.611 orang bekerja sebagai buruh /karyawan swasta yang pada umumnya adalah buruh pabrik rokok.

Pelaksanaan Pilkada di desa Kedungdowo mengikuti jadwal kegiatan pilkada tingkat Kabupaten. Sedangkan Data Hasil Perolehan Suara Pilkada Desa Kedungdowo adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.13 : Data Hasil Perolehan Suara Pilkada Desa Kedungdowo.

No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9
1.	H. Musthofa H. Budiyo	145	187	213	169	161	233	284	243	138
2.	HM Heru Fathoni Drs. Ngatmin	5	8	12	8	12	33	13	5	1
3.	Mansyur SH Agus Darmawan	19	9	9	12	2	26	13	21	33
4.	HM Amin Munadjat. H. Akhwan SH	156	170	153	218	269	109	67	107	151
	Jumlah Suara Sah	325	374	387	407	444	401	377	376	323

Tidak Sah	16	8	13	12	11	8	15	17	3
-----------	----	---	----	----	----	---	----	----	---

No	Nama Calon	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	JUMLAH
1.	H. Musthofa H. Budiyo	133	238	14	109	81	2.458
2.	HM Heru Fathoni Drs. Ngatmin	4	4	13	1	12	131
3.	Mansyur SH Agus Darmawan	21	9	10	11	10	205
4.	HM Amin Munadjat. H. Akhwan SH	181	115	178	142	121	2.137
	Jumlah Suara Sah	339	366	325	263	224	4.931
	Tidak Sah	7	8	17	18	10	163

Sumber : PPK Kecamatan Kaliwungu Tahun 2008.

Tabel. 4.14 : Data Partisipasi Pemilih Pilkada di Desa Kedungdowo.

Jml TPS	DPT	Suara Sah	Tidak Sah	Hadir	%	Tidak Hadir
14	5.622	4.931	163	5.094	90.60	528

4.1.5.3 Pelaksanaan Pilkada di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kudus

Desa Tanjungkarang merupakan salah satu desa di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Juga merupakan salah satu desa yang ditempati Brak Pabrik

Rokok (semacam unit pabrik) yang memberikan lapangan kerja sebagai buruh giling, batil dan nyontong/membungkus rokok bagi masyarakat sekitarnya.

Data Pekerjaan Penduduk di desa Tanjungkarang Kecamatan Jati adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.15. Data Pekerjaan Penduduk di desa Tanjungkarang Kecamatan Jati.

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Buruh Tani	43 orang
2.	Petani	59 orang
3.	Pedagang	282 orang
4.	Pengrajin	58 orang
5.	PNS	102 orang
6.	TNI/POLRI	7 orang
7.	Penjahit	15 orang
8.	Montir	15 orang
9.	Supir	32 orang
10.	Pramuwisata	0 orang
11.	Buruh/Kary Swasta	563 orang
12.	Kontraktor	2 orang
13.	Tukang Kayu	103 orang
14.	Tukang Batu	175 orang
15.	Guru Swasta	5 orang
	total	1.461 orang

Sumber ; Profil Desa Tanjungkarang Jati, Tahun 2008.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah yang terbesar sebanyak 563 orang bekerja sebagai buruh /karyawan swasta yang pada umumnya adalah buruh pabrik rokok.

Pelaksanaan Pilkada di desa Tanjungkarang mengikuti jadwal kegiatan pilkada tingkat Kabupaten. Sedangkan Data Hasil Perolehan Suara Pilkada Desa Tanjungkarang adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.16. Data Hasil Perolehan Suara Pilkada Desa Tanjungkarang.

No	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	JUMLAH
1.	H. Musthofa H. Budiyo	91	100	86	109	53	100	539
2.	HM Heru Fathoni Drs. Ngatmin	21	9	41	15	32	62	180
3.	Mansyur SH Agus Darmawan	21	7	15	11	70	27	151
4.	HM Amin Munadjat. H. Akhwan SH	167	252	259	219	85	101	1083
	Jumlah Suara Sah	300	368	401	354	240	290	1953
	Tidak Sah	20	34	20	17	14	21	126

Sumber : PPK Kecamatan Jati.

Tabel. 4.17 : Data Partisipasi Pemilih Pilkada di Desa Tanjungkarang.

Jml TPS	DPT	Suara Sah	Tidak Sah	Hadir	%	Tidak Hadir
6	5.893	1.953	126	2.079	60,26	1.371

4.2 Proses dan Hasil Analisis

4.2.1 Buruh pabrik rokok

Menurut sumber FSP RTMM (Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman) Kabupaten Kudus, jumlah buruh pabrik rokok kurang lebih adalah 110.000 orang tersebar di ratusan industri rokok besar dan kecil dengan urutan 10 besar dan data kasar sebagai berikut :

Tabel 4.18. Data Jumlah Buruh Rokok di Kabupaten Kudus Tahun 2007.

NO	PERUSAHAAN	JUMLAH PEKERJA
1.	Jarum	81.000 orang
2.	Noyorono	11.000 orang
3.	Jambu Bol	4.549 orang
4.	Sukun	6.332 orang
5.	Gentong Gotri	1.060 orang
6.	Pompa	340 orang
7.	Noto Joyo Mulyo	372 orang
8.	Pamor	529 orang
9.	Sidodadi	292 orang
10.	Lainnya	4.526 orang
	Total	110.000 orang

Sumber : FSPSI

Berdasarkan data pada Dinas Perindustrian yang diterbitkan tahun 2007,
data industri rokok adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19. Data Jumlah Buruh Rokok di Kabupaten Kudus Industri Rokok Besar.

No	Nama Perusahaan	Kapasitas/Tahun	Tenaga Kerja	Keterangan
1.	CV Mulyo Raharjo/Pamor	150 jt batang/SKT 450 jt batang/SKM 150 jt batang/SPM	526	
2.	Sukun/Mc Wartono	7.125 jt btg/SKT 4.750 jt btg/SKM	6.322	
3.	PT Wikatama Indah	3.750 jt btg/SKT 4.400 jt btg/SKM	1.941	Group Jarum
4.	PT Filasta Indonesia	3.620 jt btg/SKT 4.500 jt btg/SKM	3.610	Group Jarum
5.	PT Prima Tobacco	420 jt btg/SKT 200 jt btg/SKM	166	Group Jarum
6.	Inter Tobacco Ultra	7.000 jt btg/SKM	275	Group Jarum
7.	Stevania Ultra	5.500 jt btg/SKT 4.600 jt btg/SKM	15.556	Group Jarum
8.	Victory Supra	750 jt btg/SKT	270	Group Jarum
9.	Nojorono	4.800 jt btg/SKT 2.715 jt btg/SKM	10.044	
10.	Nikorama Citra	1.209 jt btg/SKT 1.818,4 jt btg/SKM	187	Group Nojorono
11.	Nikki Super	2.635 jt btg/SKT 1.747 jt btg/SKM	282	Group Nojorono
12.	PT Gentong Gotri	27.961 jt btg/SKT	1.171	
13.	Sidodadi	120 jt btg/SKT 63 jt btg/SKM	218	
14.	Notojoyomulyo	180 jt btg/SKT 60 jt btg/SKM	304	
15.	Jambu Bol	3.524 jt btg/SKT 543.6 jt btg/SKM	3.850	
16.	Chandra Asri Mulia	20 jt btg/SKT 100 jt btg/SKM	35	
17.	Muria mulia	135 jt btg/SKT 90 jt btg/SKM	148	Group Jarum
18.	PT Djarum	21 mily btg/SKT 18 mily btg/SKM	41.407	Group Jarum

19.	PT Djarum Jetak	40 jt btg/cerutu	120	Group Jarum
20.	Klampok	150 jt btg/SKT		
		150 jt btg/SKM	289	
21.	Jati Muria	120 jt btg/SKT	125	Group Jambu Bol
22.	Aroma Tobacco	24 jt btg/SKT		Group Nojorono
		172,8 jt btg/KM	126	
23.	Paring Jaya	72 jt btg/SKT	100	
24.	Tirtonadi	2.180 jt btg/SKT	50	
		24 jt btg/SKM		
25.	Barito	24 jt btg/SKT		
		172 jt btg/SKM	75	
26.	NV Muria	30 jt btg/SKT	30	
27.	Jaya Abadi Perkasa	6 jt btg/SKT	30	
		216 jt btg/SKM		
28.	Kharisma Jaya	12 jt btg/SKT	20	
	Sentosa	250 jt btg/SKM		
29.	Digdoyo Kencono	24 jt btg/SKT	30	
		250 jt btg/SKM		
30.	Batu Hitam Mulia	12 jt btg/SKT	30	
		216 jt btg/SKM		
31.	Janur Kuning	18 jt btg/SKT	55	
		216 jt btg/SKM		
32.	Merah Delima	36 jt btg/SKT	55	
		135 jt btg/SKM		
33.	Mlinjo	60 jt btg/SKT	30	
		100 jt btg/SKM		
34.	Buah dan Langsep	24 jt btg/SKT	30	
		216 jt btg/SKM		
35.	Jaleca	12 jt btg/ SKT	30	
		259,2 jt btg/SKM		
36.	Gold Mine	12 jt btg/SKT	30	
		216 Jt btg/SKM		
37.	Sif Tobacco	2,160 jt btg/SKT	40	
		24 jt btg/SKM		

Industri kecil : 662 Unit Usaha dengan 5762 tenaga kerja.

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Kudus.

Data jumlah pekerja / buruh rokok secara realistis memang tidak mudah untuk didapatkan disebabkan banyak hal antara lain :

1. Status mereka yang merupakan pegawai / pekerja tetap hanya sebagian, sebagian lainnya adalah pekerja tidak tetap yang hanya bekerja apabila dibutuhkan saat mengejar target produksi.
2. Sebagian pekerja tetap statusnya pun berbeda beda, mereka yang mendapatkan gaji tetap bulanan, pekerja harian yang gajinya dibayarkan akhir minggu dan pekerja borong yang dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan, yang jumlahnya paling besar adalah yang paling bawah.
3. Pekerja yang didaftarkan ke FPSI hanyalah sebagian dari jumlah pekerja yang sebenarnya.
4. Mutasi pekerja terjadi setiap saat.
5. Jumlah pabrik rokok skala kecil / sangat kecil terjadi pengurangan dan penambahan setiap waktu sebagian diantaranya dikerjakan oleh keluarga sendiri dan sebagian hanya tinggal nama (tidak aktif) lalu membuat merek baru lagi⁵

Di lingkungan pabrik besar seperti Djarum, Nojorono, Sukun, Jambu Bol, gambaran struktur pekerja pabrik adalah sebagai berikut,

1. Kelompok tertinggi adalah para Direktur dan Manager.
2. Kelompok kedua adalah kepala bagian dan kepala Brak (Brak adalah unit pabrik yang berada di lokasi tertentu), para pengawas atau supervisor,

⁵ Wawancara dengan wantoro, karyawan FPSI Kab Kudus, hari jumat 2 Mei 2008.

operator mesin. dan pekerja tetap yang merupakan staf di kantor maupun di brak.

3. Pekerja harian dan borong, yang sebagian besar bekerja di unit produksi non mesin (sigret kretek tangan). Kelompok pekerja yang terbawah inilah yang jumlahnya paling besar hampir seluruhnya adalah wanita mereka kebanyakan adalah dengan buruh giling, batil dan contong⁶

Realita kehidupan dari para buruh giling dan batil sendiri sangat unik untuk dikemukakan. Buruh giling adalah pembuat rokok sigaret kretek tangan yang bekerja dengan mesin linting rokok sederhana terbuat dari kayu panjang sekitar 40 cm lebar sekitar 20 cm yang dapat melinting rokok kretek satu per satu, begitu satu linting rokok selesai dilinting / giling kemudian ditaruh di tampah (wadah bundar dari anyaman bambu), sewaktu keluar dari mesin giling / linting rokok kretek tersebut belum rapi ujung kiri dan kanannya maka tugas berikutnya adalah merapikan rokok tersebut dengan mengguntingnya sesuai dengan batas panjang kertas rokok atau papir. Pekerjaan menggunting tembakau yang tidak rapi tersebut dinamakan mbatil, pekerjaanya disebut buruh batil.

Satu buruh giling berpasangan dengan satu buruh batil, pasangan tersebut haruslah serasi dan harmonis, agar memperoleh hasil yang maksimal atau sebanyak banyaknya, pekerja tersebut harus rajin dan cekatan. Apabila pekerja giling telah bekerja cepat / cekatan tapi tidak diikuti dengan kecekatan

⁶ Wawancara dengan Suwarno pegawai personalia jarum, minggu 11 Mei 2008.

pekerja batil maka hasilnya pun tidak bisa maksimal, demikian juga kalau pekerja batil pekerjaan batilnya tidak rapi, maka akan disortir, tidak diterima, harus dibongkar dan tidak dibayar. Oleh karena itu pekerja giling yang biasanya lebih berpengalaman mempunyai pasangan sendiri yang saling memahami, seringkali adalah saudaranya sendiri, tetangga dekatnya atau sudah mengetahui wataknya masing-masing⁷

Hasil kerja dihitung dari banyaknya (ribuan) batang rokok yang digiling dan dirapikan. Satu pasang pekerja yang cepat dapat menghasilkan sekitar 8 ribu batang, tiap seribu batang bayarannya rata-rata Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), dalam sehari (8 jam), satu pasang pekerja dapat mengumpulkan bayaran sekitar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), bayaran sekian akan dibagi dua untuk pekerja giling dan batil dengan perbandingan rata-rata $\frac{2}{3}$ untuk pekerja giling dan $\frac{1}{3}$ untuk pekerja batil, misalnya pekerja giling Rp. 32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah), pekerja batil Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Cara pembagian ini juga tidak ada aturan tertulisnya sangat tergantung mereka berdua khususnya pekerja giling, ada juga yang membaginya menjadi dua sama rata. Ada kalanya pekerja batil juga membantu pekerja giling lebih dari satu karena pasangannya tidak masuk kerja, kalau seperti ini bisa jadi pekerja batil bayarannya melebihi pekerja giling.

Setelah batang rokok jadi, kemudian dibawa ke bagian contong, pekerjaan nyontong adalah pekerjaan memasukkan batang rokok kedalam

⁷ Wawancara dengan Bu Fitriyani, pemilik pabrik rokok skala kecil di Kaliwungu, Jumat 9 Mei 2008.

contong atau selop atau bungkus atau pak rokok yang berisi 10 batang, 12 batang atau sesuai isi bungkus. Proses nyontong pada umumnya adalah memberi lapisan plastik pada rokok bagian dalam, kemudian memasukkan ke contong/pak kecil, menutup dengan lem lalu memberi pita cukai. Dari pack kecil kemudian di bungkus dengan pack tanggung yang berisi 10 pack, istilahnya press, jadi satu press rokok berisi 10 pack. Setelah jadi ukuran press, di bungkus lagi dengan ukuran yang lebih besar, istilahnya ball atau boss, satu boss atau satu ball berisi dua puluh press jadi satu ball atau boss berisi 200 pack. Pekerjaan nyontong juga membutuhkan banyak tenaga kerja, mereka berkelompok antara 4 sampai 5 orang berada di sebuah meja besar seukuran meja pingpong (tenis meja), jatah mereka sehari rata-rata 4.000 contong tiap kelompok, kalau dirata-rata satu orang sekitar 800-1000 contong tetapi mereka adalah kelompok kerja yang bisa bagi tugas berbeda-beda. Bayaran yang mereka terima sekitar Rp. 17.500–25.000,-. Para pekerja borong dibagian giling dan batil semuanya wanita tetapi mandornya seringnya laki-laki, satu mandor membawahi sekitar 80 orang. Para pekerja dibagian contong semuanya wanita termasuk mandornya, setiap mandor membawahi 6 meja yaitu sekitar 30 orang.

Apabila mereka bekerja sehari penuh, ada perusahaan yang memberi sekedar uang makan Rp. 1.000–Rp. 2.000,- ada juga yang tidak memberi uang makan tetapi hanya menyediakan minum berupa air putih yang disediakan dalam galon – gallon/dispenser di ruang tertentu. Di perusahaan yang tidak memberi uang makan atau makan siang seperti ini keadaannya lebih

memprihatinkan karena biasanya mereka tidak sempat untuk membeli makan siang karena semua pekerja mengejar targetnya sendiri, kalau misalnya seorang pekerja mau makan siang tetapi pasangannya tidak keluar untuk juga makan siang maka mereka akan sungkan meninggalkan pekerjaan karena pekerjaan akan terbengkalai atau menumpuk, akibatnya menjadi kebiasaan untuk tidak pernah makan siang. Bagi yang mendapat uang makan juga ada kebiasaan untuk tidak menggunakan uangnya untuk makan siang agar biar lebih ngirit/ hemat, sering mereka hanya membeli sekedar minum dan satu jajan seperti bakwan, pisang atau lainnya. Itu dijalannya sepanjang hari dan selama bertahun-tahun.

Agar hasil yang diperoleh bisa maksimal dan pengeluaran hari itu bisa ditekan sekecil-kecilnya, berbagai cara mereka lakukan. Agar dapat menghasilkan linting rokok yang sebanyak banyaknya, mereka harus datang pagi-pagi sekali (juga karena pekerjaan linting adalah produk awal, kalau pekerja linting belum jalan maka pekerja contong belum bisa bekerja), jam 06.00 pagi pekerjaan sudah dimulai dan pabrik sudah buka sejak jam 05.00 pagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti tembakau siap giling, mesing giling rokok, kertas papir, lem, gunting, tampah dan sebagainya.

Agar mereka dapat pagi sekali sampai di pabrik, mereka berangkat dari rumah saat subuh, berombongan dan berjalan cepat (pada masa lalu sebagian besar memakai jarit/kain). Sebagian bersepeda ontel beriringan ratusan jumlahnya dan sebagian lagi menggunakan angkutan umum. Mereka bersepeda kalau jaraknya dapat dijangkau dengan cepat (sekitar lima kilometer), kalau

jarak ke rumah lebih jauh, mereka memilih pakai angkutan umum seperti angkota, izusu, mobil colt bak terbuka dan sebagian memakai truk-truk perusahaan. Agar bayarnya lebih murah biasanya mereka berlangganan dan mau berjejalan dua kali lipat dari daya tampung normal, kadang dilihat rasanya tidak manusiawi. Banyak dari mereka yang rumahnya tidak dilewati jalur angkutan resmi, maka mereka menggunakan angkutan plat hitam (tidak resmi), suatu kali ada penertiban angkota plat hitam merekapun jadi terganggu tidak bisa bekerja, mogok, perusahaan juga kalang kabut akhirnya angkota plat hitam bahkan bak terbuka pun dimaklumi. Pemandangan unik ini dapat dijumpai di jalur-jalur yang dilewati para pekerja pabrik seperti Undaan ke Tanjungkarang Jati, Karang Anyar Demak dan Undaan lewat depan Matahari, Sepanjang jalur Kaliwungu dan Kedungdowo, Jalur Mejobo ke Megawon dan ke jalan Menur dan sebagainya.

Pergerakan mereka yang jumlahnya sangat besar dalam waktu serentak selain cukup merepotkan pemakai jalan, juga memberikan peluang ekonomi bagi lingkungan pabrik, mulai dari titipan sepeda, penjual makanan minuman, barang kebutuhan dapur, sampai berbagai kebutuhan rumah tangga baik yang tunai maupun kredit. Maka bisa dipastikan di sekitar pabrik akan menjadi pasar tiban atau pasar krempyeng yang memenuhi sepanjang pintu keluar masuk pabrik. Harga-harga dipasar tersebut biasanya relative lebih murah, kualitasnya pun biasanya sederhana, bungkusannyapun lebih kecil agar bisa dijangkau. Uang yang harusnya jatah makan siang pada umumnya malah mereka

gunakan untuk nyicil utang kredit apa saja dari para pengkredit di sekitar pintu pabrik. Biasanya yang diambil adalah barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, panci, sepeda atau lainnya yang cicilannya dibayar harian. Walaupun pagi hanya sarapan sekedarnya di rumah, atau di warung sekitar pabrik atau hanya nasi bungkus seribu rupiah, siang hanya minum, ditambah dengan menempuh perjalanan yang cukup melelahkan mereka jalani dengan biasa saja, enak saja dan menyenangkan. Rasa solidaritas mereka juga tinggi, kalau ada teman yang sakit, dengan cepat mereka getok tular untuk mampir menjenguk dan memberikan bantuan sekedarnya. Kekeluargaan yang baik semacam itu adalah salah satu hal yang membuat mereka menikmati. Masa yang cukup berat adalah masa dimana sedang musim banyak orang punya kerja seperti pernikahan atau tetak'an/sunatan, misalnya pada bulan Besar/Dzulhijjah dan Rajab. Hampir tiap hari ada teman atau tetangga yang punya kerja hingga bayaran sehari-hari bekerja keras tidak cukup untuk biaya sosial.

Pekerjaan giling, batil dan contong adalah gambaran dari pekerja yang berada dibagian SKT (sigaret kretek tangan) selain itu ada bagian yang lain yaitu SKM (sigaret kretek mesin). Di bagian SKM sebagian besar sudah memakai teknologi tinggi dari mulai meramu tembakau dengan cengkih dan saus (pemberi rasa), pengaturan kertas, pembuatan rokok semuanya berjalan otomatis, sehingga karyawan yang menangani pekerjaan manual juga hanya sedikit misalnya pengepakan, control kualitas dan sebagainya yang jumlah

karyawannya tidak sampai ribuan, satu orang mandorpun hanya mengkoordinir sekitar 20 orang sesuai kebutuhan.

4.2.2 Buruh Rokok dan Kegiatan Politik

4.2.2.1 Perhatian Kaum Buruh terhadap Kegiatan Politik

Kehidupan para buruh rokok sebagian besar waktu dijalannya di pabrik, dia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat matahari terbenam. Selain itu fokusnya setiap hari adalah bagaimana dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak banyaknya, karena semakin banyak pekerjaan yang dia selesaikan akan semakin banyak rupiah yang dia bawa pulang. Anak dan keluarganya dirumah sering kurang perhatian. Tetapi pada umumnya keluarga sudah maklum.

Karena yang dibutuhkan adalah trampil bekerja, maka mereka menilai sekolah tinggi tidaklah perlu, lulus SMP bahkan SD sudah cukup, akibatnya kemampuan mereka dalam mengelola rumah tangga dan hidup bermasyarakat juga sederhana. Rutinitas yang dia kerjakan adalah pergi kerja di pabrik, masak, makan, tidur dan bekerja lagi besok. Apabila anak sudah cukup dewasa, menikah, punya anak, bekerja lagi dan seterusnya. Masih untung mereka punya banyak teman bergaul sepanjang hari sehingga terjadi proses tukar pengalaman yang lumayan, kecuali yang kurang bisa bergaul.

Karena waktu dan energi mereka telah habis tercurah untuk bekerja dan pendidikan mereka yang rendah maka perhatian terhadap politik juga kurang. Mereka hanya mendengar informasi mengenai partai atau pemilihan dari teman berjalan waktu berangkat atau pulang bekerja. Sebagian dari keluarga yang dirumah dan sebagian dari sabet yang datang untuk mengajaknya. Hanya sebagian kecil dari kaum buruh yang mengambil peran dalam pembicaraan politik, terutama yang pria dan ditingkatan pekerja kelas menengah. Bagi mereka situasi yang diinginkan adalah pekerjaan tetap ada, lancar dan harga-harga jangan naik sukur-sukur ada perbaikan kesejahteraan³³

Bagi para buruh pekerjaan adalah yang terpenting, politik tidak ada hubungannya dengan peningkatan penghasilan mereka, peningkatan penghasilan mereka berasal dari pabrik, apabila pabrik lancar mereka juga akan tetap dapat penghasilan walaupun mereka juga pernah mendengar bahwa saat ini pekerjaan borongan lebih sedikit karena ada banyak imbauan dan larangan merokok oleh pemerintah, tetapi peran pemerintah apalagi pemerintah daerah sepertinya tidak ada hubungannya dengan peningkatan penghasilan mereka menurut mereka yang menentukan adalah pemilik perusahaan, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa bahkan pemerintah hanya memanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan berupa cukai yang sebanyak banyaknya, tidak ada harga cukai turun, yang ada bahwa cukai selalu naik dan itu membuat harga rokok semakin mahal dan permintaan menjadi berkurang.

³³ Wawancara dengan Asfiah buruh contong pabrik rokok, hari Sabtu 3 Mei 2008.

Bagi mereka kerja ya kerja, politik dan pilihan pemimpin itu masalah lain lagi dan untuk yang itu mereka menyadari mereka punya hak pribadi seperti slogan bebas dan rahasia.

Berkaitan dengan Sarikat Pekerja (SPSI), mereka pada umumnya tahu bahwa sarikat pekerja adalah organisasi yang mengurus mereka tetapi mereka tidak tahu apa SPSI telah berjasa terhadap mereka, yang ia tahu SPSI menarik iuran dari perusahaan atas nama mereka dan memotong pendapatan mereka seperti premi dan THR (tunjangan hari raya) untuk kegiatan organisasi yang dia tidak tahu peruntukannya. SPSI tidak bisa meningkatkan produksi pabrik dan membuat penghasilannya meningkat ³⁴.

4.2.2.2. Upaya Para Calon Merebut Suara Buruh Rokok

Jumlah buruh rokok di Kudus yang sedemikian banyak sangat menarik perhatian para calon dan menjadi target mendulang suara, berbagai strategi telah disiapkan agar bisa menggaet orang-orang penting di perusahaan sehingga bisa membawa gerbongnya ke salah satu calon.

Salah satu calon yang sejak awal mengincar suara kaum buruh rokok adalah Mansyur As'ad, Ayahnya Moh As'ad adalah ketua SPSI bidang RTMM (Rokok Tembakau Makanan dan Minuman) tingkat Kabupaten sekaligus Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat. Seorang tokoh SPSI RTMM yang sudah menjadi pengurus sejak puluhan tahun juga sangat dikenal di Kudus sebagai

³⁴ Wawancara dengan Kasmonah, mandor buruh rokok, selasa 6 Mei 2008.

pengurus sepakbola (Persiku) selama beberapa periode. Mansyur adalah juga pengurus SPSI di tingkat Jawa Tengah bidang Pengupahan. Berharap dengan posisinya itu semua kaum buruh rokok akan berada di genggamannya³⁵

Strategi dimulai dengan menitipkan Mansyur sebagai pengurus Partai Demokrat Kabupaten Kudus dan jabatan yang diperolehnya adalah sekretaris. Saat persiapan masa pencalonan Mansyur sebagai salah satu pengurus Partai Demokrat bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati, lobi-lobi telah dilakukan termasuk menghadirkan Pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, uang juga telah keluar banyak. Tapi ternyata ketua Partai Demokrat juga berniat mencalonkan diri sehingga terjadi perpecahan. Selanjutnya Mansyur berniat mencalonkan diri lewat PPP, kebetulan PPP juga sedang tidak solid karena pertentangan antara ketua DPC HJ. Maesyaroh dan MPC (musyawarah pimpinan cabang), sejumlah dana telah dikeluarkan untuk rapat-rapat tetapi akhirnya PPP betul-betul pecah dan kepengurusan DPC dibekukan oleh DPD PPP Jawa Tengah.

Angin segar datang setelah adanya kabar dibolehkannya calon independen, menginspirasi Mansyur As'ad untuk menggunakan kekuatan massa buruh rokok untuk mendukung pencalonannya, namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada dan tidak dapat segera terbentuk, Mansyur mengurungkan niatnya menggunakan jalur independen, saat itu stiker dan baliho Mansyur sebagai calon bupati juga sudah diluncurkan. Moh As'ad juga

³⁵ Wawancara dengan Tony Kusuma, Manajer Tim Pemenangan Mansur.

telah berhasil melobi KPU yang awalnya merencanakan hari pelaksanaan Pilkada dilaksanakan hari Minggu dirubah menjadi hari sabtu. As'ad punya skenario, kalau Plkada dilaksanakan pada hari Sabtu atau hari kerja maka para buruh rokok (buruh harian) sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan akan dapat diusahakan mendapatkan premi (berupa uang pengganti upah sehari sebesar Rp. 21.000,-). Premi ini bisa keluar dan dibayarkan apabila ada kesepakatan oleh Tripartit (Sarikat Pekerja, Disnaker dan Pengusaha). Apabila tidak ada tuntutan dari dari serikat pekerja yang punya *power*, maka premi inipun tidak akan bisa dibayarkan karena pengusaha pasti tidak akan dengan mudah mengeluarkan uang yang sedemikian banyak. Apabila dihitung 100.000 pekerja saja, maka harus dikeluarkan oleh pengusaha uang sebanyak Rp. 21.000 x 100.000 = Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Setelah berhasil melobi KPU, As'ad juga berhasil melobi pengusaha dan Disnaker agar bisa dikeluarkan persetujuan Tripartit untuk membayarkan premi untuk hari sabtu saat Pilkada kepada semua buruh.

Mansyur As'ad bertambah keyakinannya untuk bisa mengendalikan massa buruh. Keberhasilannya merubah hari Pilkada dari hari minggu ke hari sabtu menambah keyakinannya untuk bisa mengandalkan jaringan serikat buruh khususnya buruh rokok.

Setelah tidak jadi maju lewat jalur independen, Mansyur melakukan lobby-lobby untuk mencari kendaraan politik dari partai-partai dan membentuk koalisi. Upayanya berhasil dengan menggaet PAN yang bersedia menjadi wakil

Bupati dan dua partai lain yang masing-masing mempunyai satu kursi di DPRD yaitu Partai Bintang Reformasi dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Untuk dua partai yang punya masing-masing satu kursi tersebut harus dikeluarkan dana sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah untuk masing-masing (yang merupakan satu paket dukungan meliputi dukungan formal yang merupakan syarat pencalonan, dukungan massa, dukungan juru kampanye termasuk hiburan saat kampanye).

Perjalanan semakin mantap karena secara formal jumlah syarat dukungan yaitu tujuh kursi DPRD telah terpenuhi. Program penggalangan massa pun dirancang, Tim kampanye dibentuk terdiri dari 9 orang . Secara umum target yang diharapkan masuk adalah kaum buruh rokok, massa PAN dan simpatisan yang digarap sehingga sampai jumlah tertentu. Dalam kegiatan penyusunan program penggalangan suara ini, mulai terlihat adanya ketidak sinkronan antara As'ad, Tim Kampanye dan Calon Wakil Bupati Agus Darmawan.

As'ad sebagai ketua SPSI sangat yakin bahwa suara kaum buruh rokok akan dapat diperoleh lewat struktur serikat pekerja. Dari kalangan buruh dikumpulkanlah para mandor, karena dianggap mereka inilah yang biasa mengawasi pekerjaan para buruh dan paling tahu identitas para buruh. Para mandor tersebut disosialisasi, dibayar dan ditugasi untuk mengawasi para buruh saat pencoblosan. Satu mandor bisa mengawasi sampai 100 orang, setiap hari sosialisasi menghabiskan dana sekitar lima belas juta rupiah.

Dalam kenyataan, kegiatan sosialisasi tidak menyentuh langsung para buruh secara individu hanya sekedar sampai pada individu setingkat mandor. Para pejabat perusahaan ditingkat manajer juga ternyata telah punya hubungan dengan calon-calon yang berbeda karena walaupun bersifat pribadi. Hubungan antara mandor dengan pekerjanya ternyata tidak sekuat yang diduga. Dalam masalah ini pekerja tidak mau patuh pada ajakan mandor karena secara resmi perusahaan telah mengatakan bersifat netral . Kesetiaan para pekerja lebih kepada pemilik perusahaan bukan kepada yang lain.

SPSI dimata para buruh tidak lagi diterima positif sebagai pihak yang memperjuangkan para buruh bahkan sebagian keberadaan SPSI dianggap negatif karena iuran SPSI dianggap memotong gaji buruh. Memang mereka mengakui bahwa As'ad sering dapat menjembatani demo buruh rokok dengan pengusaha seperti beberapa kali terjadi di pabrik jambu bol, tetapi menurut mereka itu sudah seharusnya dan setiap kali dia menyelesaikan masalah diapun akan mendapat imbalan yang tidak sedikit. Struktur dalam SPSI yang diajak bekerjapun tidak bekerja dengan motivasi tinggi ingin memenangkan calon dari pengurus SPSI, tetapi motivasinya lebih karena mencari keuntungan materiil sesaat dari calon, istilahnya “ dipremo “ (hal ini karena para pengurus dan karyawan di kantor SPSI juga mengetahui kalau As'ad juga biasa mendapatkan imbalan-imbalan dari pengusaha untuk mencapai keputusan-keputusan tertentu, imbalan- imbalan tersebut hanya mengalir ke kantong ketua saja sedangkan para

pengurus pada level bawah tidak mendapat apa-apa).³⁶ Usaha SPSI untuk mengusahakan premi pada hari pelaksanaan pilkada dianggap suatu hal yang wajar karena sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan. Para buruh menganggap uang premi bukan jasa dari As'ad karena uangnya adalah dari perusahaan.

Pada saat pemantapan kader dirasakan ada banyak kejanggalan dan hambatan, para mandor tidak sanggup untuk mengawasi pekerjanya karena lokasi tempat tinggal para mandor tidak selalu dekat dengan tempat tinggal para pekerja selain itu para pekerja juga jumlahnya terlalu banyak dan tinggalnya terpencar-pencar. Untuk mengatasinya Tim Pemenangan menyarankan agar memakai jalur tenaga SPSI tetapi untuk memenangkan pertarungan di TPS. TPS yang dibidik cukup seperempat dari 1.074 TPS agar terjangkau, suara yang ditarget cukup 150.000 – 200.000 agar lebih efisien. Diperkirakan biayanya sekitar 3 milyar. Tetapi syaratnya Sabet yang berada ditingkat TPS harus dipersiapkan dengan matang, mereka nanti harus setor ke Tim, peta wilayah yang berhasil digarap di lingkup TPSnya ini juga agar uang yang dibawa dapat dipertanggung jawabkan. TPS yang digarap juga harus TPS yang mengambang, bukan kandang calon lain. Cara ini diusulkan karena hasil survei secara acak ternyata suara buruh rokok sudah demikian terpecah. Tetapi cara ini tidak disukai oleh As'ad karena dianggap meragukan kemampuannya untuk mengendalikan para buruh rokok.³⁷

³⁶ Wawancara dengan Budi Yuwono, pemerhati Pilkada dan aktivis di Kudus.

³⁷ Wawancara dengan Tony Kusuma, Manajer Tim Pemenangan Mansur.

Selain Tim Mansyur As'ad, calon-calon lain tidak ada yang masuk kepabrik menemui para buruh. Calon yang punya basis massa sangat kuat seperti PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa lebih memilih untuk memanfaatkan sabet-sabetnya ditingkat bawah, di Desa bahkan di tingkat RT, mereka lebih mengandalkan penggalangan massa dari rumah kerumah.

4.2.3 Fakta Perilaku Pemilih Buruh Rokok

Sebagai implikasi dari kebebasan dalam menentukan pemimpin daerahnya adalah munculnya berbagai kemungkinan variasi motivasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Tentu saja masing-masing peserta pemilih sangat subjektif dalam menilai dan menentukan pilihan politiknya berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Karena itu, dalam penelitian ini bermaksud untuk merekam berbagai pola perilaku pemilih sekaligus menemukan variasi stimulus politik sebagai dasar perilaku pemilih. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dua pola umum perilaku pemilih sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh Lipset³⁸, perilaku pemilih terdiri atas pemilih yang memberikan suara (*voting*) dan pemilih yang tidak memberikan suara (*non-voting*). Sebagaimana tujuan penelitian yang dirumuskan pada bab satu dalam rancangan penelitian ini, maka berikut akan dipaparkan temuan penelitian yang meliputi dua hal, yakni upaya menemukan berbagai variabel yang memengaruhi perilaku pemilih buruh

³⁸ Umbo Ape, 2008, " *Sosiologi Politik Kontemporer* " Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm 203

rokok, kemudian menganalisis faktor determinasi dari beberapa variabel tersebut untuk menemukan variabel yang lebih dominan atau yang memiliki pengaruh yang paling besar.

4.2.3.1. Pemilih yang memberikan suara.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor internal. Secara eksternal perilaku pemilih merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dan lingkungannya. Sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Karena itu, pertanyaan utama yang perlu diajukan untuk memahami sekaligus mencari makna politik di balik, pilihan pemilih Buruh Rokok adalah faktor-faktor apakah yang memengaruhi pemilih buruh rokok dalam menentukan politiknya ? Cukup banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku pemilih buruh rokok. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik (Visi Misi calon), tetapi ada pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari partainya. Bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Menurut Nursal (2004, hlm 56), bahwa variabel-variabel inti yang memengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elite, identifikasi

kepartaian, sistem sosial, media massa, dan aliran politik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap informan, diperoleh beberapa preferensi perilaku pemilih buruh rokok di Kabupaten Kudus yang dikelompokkan dalam enam kategori. Keenam stimulus politik yang menjadi pertimbangan utama pemilih dalam memberikan hak pilihnya yakni juru kampanye/sabet/tim sukses, pertimbangan insentif , isu kampanye (*campaign issue*), identifikasi figur (*figure Identification*), identifikasi parpol pengusung (*party Identification*), dan kelompok penekan (*pressure groups*).

1. Juru Kampanye / Tim Sukses.

Juru kampanye yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak hanya sekedar tim kampanye sebagaimana yang terdaftar di KPUD yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik. Melainkan juga, juru kampanye dimaksudkan kepada siapa saja yang aktif dalam menyampaikan program-program pasangan calon, baik pada saat masa kampanye maupun di luar masa kampanye yang telah ditentukan. Juru kampanye baik yang resmi maupun tidak resmi, berjenjang dari tingkatan kabupaten sampai pada pelosok-pelosok desa. Tentu saja dari distribusi tim sukses tersebut memiliki hubungan atau ikatan emosional dengan konstituen di mana mereka berada.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ikatan emosional

yang berhasil dibangun oleh kandidat kepada konstituen di Kabupaten Kudus tidak terlepas dari kinerja maksimal dari para tim sukses.³⁸. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa yang menyebabkan pemilih mengetahui tentang berbagai hal yang berkaitan dengan figur adalah informasi dari para tim sukses. Di samping tim sukses berfungsi menjembatani kandidat dengan pemilih, tim sukses juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam memengaruhi pemilih atas dasar ikatan emosional antara tim sukses dengan para pemilih. Hal serupa juga terjadi di pilkada lain sebagaimana penelitian perilaku pemilih di kabupaten Bombana dan pemilihan Gubernur Sultra , pada Pilbup Bombana 2005 pengaruh juru kampanye menduduki posisi ketiga (20,53 %), sementara pada Pilgub Sultra 2007 menduduki posisi yang kedua setelah identifikasi figur (28,03 %)³⁹

Salah seorang informan yang diwawancarai mengatakan bahwa dirinya menyadari tentang keterbatasannya dalam mengenal pasangan calon yang tampil, tetapi karena informasi yang diperoleh dari juru kampanye membuat dirinya menentukan pilihannya atas dasar pertimbangan tim sukses yang dikenalnya. Ia menambahkan bahwa tim sukses yang ia kenal itu merupakan teman kerja suaminya yang juga merupakan tetangga terdekatnya⁴⁰

Bagi kalangan buruh rokok hampir semua informasi yang diterima

³⁸ Wawancara dengan Hj. Noor Hani'ah, Ketua DPC PDIP Kudus.

³⁹ Umbo Ape, 2008 “ *Sosiologi Politik Kontemporer* “ Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm 218.

⁴⁰ Wawancara dengan Mastonah, buruh pabrik rokok di Tanjungkarang, Sabtu, 5 Juli 2009.

adalah berasal dari lingkungan sekitar atau para sabet karena kesibukan bekerja dan pendidikan yang relative rendah menyebabkan mereka berada pada pihak yang pasif, informasi yang dia dapatkan tergantung pada siapa yang dekat dengannya seperti suami, saudara, atau para tetangga atau siapa yang mendekatinya yaitu para juru kampanye yang datang dan masuk ke rumah-rumah, sebagian lagi informasi didapat dari teman kerja yang sudah digarap lebih dahulu. “ saya tahu ya dari suami dan dari tetangga yang jagong di sekitar rumah “⁴¹. Perilaku pemilih perempuan yang pasif seperti ini sama dengan hasil penelitian Catur Suratnoaji pada perilaku pemilih perempuan : penelitian saya menunjukkan, perempuan cenderung mengonfirmasikan pikiran politiknya pada orang terdekat, suami atau ayahnya. Dengan merujuk kepada keduanya sesungguhnya itu pilihan lelaki, bukan perempuan ⁴²

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan bahwa juru kampanye sangat berpengaruh dalam memengaruhi pemberian suara pemilih. Eksistensi juru kampanye sebagai pengumpul suara (*vote getter*) cukup signifikan dalam pemilihan Bupati / Wakil Bupati Kudus tahun 2008. Berdasarkan berbagai informasi di atas jika dikaji dalam tataran teori, menunjukkan bahwa pendekatan Michigan's cukup signifikan digunakan dalam meneropong perilaku politik pemilih buruh rokok di Kabupaten

⁴¹ Wawancara dengan Mafuatun, buruh pabrik rokok di Kedungdowo, 7 Mei 2008.

⁴² Catur Suratnoaji, 23 Juli 2007, Disertasi “ *Kuasa Budaya Patriarkhi Dalam Membentuk Jaringan Komunikasi Politik Perempuan Jawa Pada Pemilu Legislatif* “ Surya online, 17 Mei 2008,

Kudus. Dalam perspektif psikologis, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku politik pemilih seseorang. Kajian utama perspektif ini meliputi tiga yakni, aspek ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu politik, orientasi terhadap kandidat, dan dalam penelitian Ini Juru kampanye juga merupakan bagian dari analisis pendekatan ini, karena pada initinya dari keempat variabel di atas ditentukan oleh faktor sosialisasi baik yang dilakukan oleh kandidat, partai politik, maupun oleh juru kampanye.

2. Pertimbangan Insentif

Fenomena yang menarik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah maraknya politik uang. Realitas ini tidak hanya menarik diperbincangkan, tetapi juga telah menjadi amunisi utama dan *modus operandi* digunakan oleh para calon. Fenomena ini terbentuk di samping karena akibat tuntutan aspek legal juga karena pendekatan pragmatis yang ditempuh oleh kandidat. Berdasarkan UU. No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang kewenangan partai politik melakukan seleksi bagi bakal calon. Kewenangan yang dimiliki oleh partai politik memberikan ruang terjadinya negosiasi menyangkut kontribusi calon kepada terhadap partai politik.

Menyikapi situasi ini, para kandidat pun mengambil sikap yang sama, yakni berpikir pragmatis. Mereka menyediakan dana secara (*massive*) untuk dapat lolos dalam seleksi pencalonan di tingkat internal partai.

Bahkan, sikap pragmatis tersebut digunakan dalam meraih suara dari pemilih dengan cara menebarkan janji-janji yang berupa uang maupun dalam bentuk hadiah lainnya. Dalam kondisi masyarakat pemilih yang masih sangat terbatas baik dalam aspek ekonomi maupun politik, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pemilih. Dalam penelitian ini faktor tersebut disebut sebagai insentif/hibah politik.

Pertanyaan yang menarik ketika membahas insentif/hibah politik dalam ((*event*) pemilihan adalah benarkah rakyat hanya butuh uangnya tetapi tidak peduli pada pemimpinnya? Jawaban dari teka-teki ini adalah selain berputar pada kondisi ekonomi dan kesadaran politik rakyat, perlu pula diperhatikan faktor *trust* (kepercayaan) rakyat terhadap para pemimpin daerah selama ini. Belum terwujudnya *clean governance* dan banyaknya pejabat maupun wakil rakyat yang tersangka korupsi, dapat melahirkan sikap apatisme rakyat terhadap pemimpin yang berkompetisi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2008.

Apatisme menjelma dalam berbagai bentuk, mulai dari tidak mau mengenal calon terlebih lagi mendengar program yang ditawarkan, sikap acuh, tidak peduli dengan hak pilihnya, hingga tidak mau datang ke TPS untuk memilih. Sikap apatis tersebut, tampak signifikan yang ditunjukkan pada besarnya jumlah peserta pemilih di Kabupaten Kudus yang tidak menggunakan hak pilihnya di bilik suara 12 April 2008 lalu, yakni sebanyak 248.813 orang atau sebesar 43,47 persen. Fenomena ini sering

disebut sebagai golongan putih (Golput).

Bukan hanya itu, pendidikan politik pemilih masih sangat kurang menyentuh sampai pada kalangan masyarakat paling bawah, sehingga makna dari rekrutmen politik lokal belum dipahami secara maksimal. Hal ini berimplikasi pada motivasi pemilih dalam penentuan pilihannya yang tidak didasarkan pada hakikat dari rekrutmen politik lokal itu sendiri. Masyarakat dengan keterbatasan informasi politik lebih pragmatis dalam merespon perhelatan politik yang sedang bergulir.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa sikap dan perilaku pragmatis menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pilkada. Pragmatisme yang dimaksud berupa perilaku pemberian suara atas dasar kepentingan sesaat yang dinilai secara rasional menguntungkan. Salah seorang informan penelitian mengungkapkan bahwa “ motivasi saya sebagaimana umumnya masyarakat di sini memilih karena ada yang bersedia memberikan imbalan, jadi siapa yang mau memberikan imbalan, itu yang kita pilih”⁴³

Selama proses penelitian dilakukan, informasi tentang imbalan yang diberikan untuk menarik calon pemilih cukup santer dilontarkan oleh pemilih di Kabupaten Kudus. Informasi yang diperoleh dari tim sukses salah satu pasangan calon mengamini sinyalemen tersebut. Menurutnya imbalan tersebut memang ada, hitungannya antara sepuluh sampai dua

⁴³ Wawancara dengan Warsinah, buruh pabrik rokok di Tanjungkarang, Minggu, 6 Juli 2008.

puluh ribu perorang dikalikan jumlah berapa ribu suara yang diinginkan untuk mencapai jumlah aman⁴⁴. Hal serupa ditemukan pada pilkada Jawa Barat, 13 April 2008, pada tanggal 9 April 2008, 147 warga kampung Bantarpanjang, kecamatan Warudoyong, kota Sukabumi mendapat amplop berisi uang sepuluh ribu rupiah dengan pesan agar memilih salah satu peserta pilkada (Kompas ,10 April 2008). Ini juga sesuai dibandingkan penelitian perilaku pemilih di kabupaten Pati dimana faktor yang paling dominan memengaruhi kehadiran pemilih adalah karena ada tidaknya kompensasi material⁴⁵

Informasi di atas mengindikasikan adanya pergeseran *locus money politics*, yakni semula isu ini hanya melibatkan sejumlah anggota DPRD (sistem parlemen), kini beralih ke para pemilih. Isu-isu tentang money politics di tingkat elite ternyata tidak hilang dari permukaan pesta politik lokal yang digelar secara langsung dewasa ini, meskipun sebagian masyarakat tetap menganggap hal ini sebagai politik uang (*money politics*), sebagian lainnya menganggap pemberian seperti ini sebagai hal yang wajar DPD KNPI Kudus malah meminta masyarakat Kudus untuk menganggap money politics sebagai amal, Ketua DPD KNPI Kudus Ali Ikhsan menyampaikan bahwa alasan kenapa dirinya menganjurkan agar menganggap money politics sebagai amal, karena alasan memilih itu

⁴⁴ Wawancara dengan Aji Mulyo, pemerhati Pilkada, Minggu, 25 Mei 2008.

⁴⁵ Surandim Achmad, 2007, tesis “ *Perilaku Pemilih Masyarakat Pedesaan Dalam Pilkada Langsung Di Kabupaten Pati* “, MIP Undip, hlm 108,

urusan hati nurani (Jawa Pos Radar Kudus, 11 April 2008), sementara dari kalangan politisi menyebutnya sebagai ongkos politik.

Mengenai kebenaran isu ini, hanya Allah Maha Mengetahui, karena begitu sulitnya membuktikan proses *money politics* di depan meja hijau. Karena itu, dalam penelitian ini faktor tersebut disebut sebagai insentif/hibah politik. Hibah politik adalah pemberian yang tampak secara sukarela, namun di balik pemberian itu memiliki konsekuensi yang berupa reward dalam bentuk pemberian dukungan (suara). Modus operandi *money politics* pun bervariasi, mulai dari bentuk halus berupa sumbangan fasilitas umum, sampai pemberian yang terang-terangan seperti baju kaos dan lain sebagainya, dan yang lebih menarik lagi adalah adanya pemberian uang tunai dalam bentuk uang konsumsi, uang ojek, uang pengganti kerja sampai pada uang dukungan (*buying voters*).

Kendati secara normatif *money politics* sukar dibuktikan, tetapi secara riil di lapangan realitas tersebut dapat dikatakan sebagai *money politics*. Menurut Teten Masduki, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana dikutip oleh Mubarok (2005, hlm 32), bentuk politik uang tergantung pada sistem Pemilu yang diterapkan. Ada empat bentuk politik uang yang dimaksud, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye, dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).

Dari beberapa informasi tersebut di atas menunjukkan semakin pragmatismya pemilih dalam menentukan perilaku politiknya. Hal ini tentu saja beralasan bagi masyarakat pemilih, karena masyarakat telah bosan dengan berbagai janji-janji politik, sehingga insentif yang berupa uang ataupun pemberian lainnya menjadi jalan alternatif dan pilihan yang rasional. Selain sikap pesimis pemilih terhadap para politisi maupun terhadap sistem politik pada umumnya yang terimplementasi dalam perilaku pragmatis, juga disebabkan oleh pendidikan dan penyadaran politik bagi masyarakat pemilih yang masih kurang. Pendidikan politik pemilih yang dilakukan masih sifatnya sangat umum, yakni berkisar pada penjelasan proses pemilihan sebagaimana dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Pendidikan politik khususnya di kalangan grass roots, belum menyentuh pada aspek penyadaran akan substansi dari perhelatan politik lokal yang diselenggarakan melalui Pilkada langsung, apalagi terhadap para buruh rokok yang telah menghabiskan waktu dan tenaganya untuk bekerja.

3. Isu Kampanye

Secara resmi jadwal kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Kudus dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2008 sampai pada tanggal 8 April 2008 atau selama 14 hari. Setelah pelaksanaan kampanye selama dua minggu tersebut, maka dinyatakan sebagai masa tenang dimana tidak ada lagi kegiatan kampanye,

masa tenang yang dimaksud selama 3 hari setelah berakhirnya proses kampanye. Namun, pemahaman masyarakat tentang isu kampanye tidak hanya pada saat tahapan kampanye digelar masing-masing pasangan calon, tetapi isu kampanye dipahami sebagai segala sesuatu yang berupa janji politik para kandidat termasuk sebelum masa kampanye.

Kampanye merupakan proses penyampaian program dari masing-masing pasangan calon melalui pesan-pesan politik yang bertujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku pemilih. Perubahan yang dimaksud tentu diupayakan dari ,tidak memilihnya menjadi memilihnya. Pada kesempatan kampanye para kandidat menyampaikan visi misinya yang diarahkan menyentuh kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Pemilih yang masih menaruh harapan besar terhadap visi misi para kandidat tentu akan menjadi pertimbangan utama bagi pemilih.

Isu politik atau program kandidat pada dasarnya bukanlah suatu yang terpisah dari masyarakat. Artinya, untuk memahami program kandidat tidak cukup hanya mengamati persoalan-persoalan politik yang sedang berkembang, melainkan harus dilihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap program yang ditawarkan. Apakah pemilih mempunyai perhatian besar atau sebaliknya, apakah bersikap positif atau justru bersikap negatif. Dengan demikian, kesadaran politik pemilih dalam menyikapi berbagai jualan politik para kandidat menjadi sangat penting dalam menentukan pilihannya.

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa masyarakat kaum buruh rokok di Kabupaten Kudus sangat memperhatikan isi dari janji kampanye calon Bupati, tetapi yang dapat diingat adalah isu-isu yang sangat praktis dan tidak jlimet. “ yang saya ingat adalah janji dari Musthofa untuk memberikan bantuan kematian kepada warga yang meninggal sebesar tiga juta rupiah, KTP gratis dan berobat gratis di puskesmas “⁴⁶ Sebagian percaya setelah diperdebatkan antar mereka, sebagian lagi masih ragu karena ini belum pernah terjadi, tetapi tetap saja isu ini menarik dibandingkan dengan yang lain yang janji kampanyenya tidak praktis dan sulit untuk diingat. “ kalau nanti jadi kan bisa ditagih “⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas, senada dengan hasil olahan data yang menunjukkan bahwa isu kampanye memiliki kontribusi yang tinggi dalam memengaruhi perilaku politik pemilih. Tampaknya, isu kampanye baik yang disampaikan melalui forum dialog monologis 'atau dialogis ataupun melalui arak- arakan atau konvoi, melalui selebaran, cukup berhasil meraih simpati pemilih untuk menentukan pilihannya atas dasar program yang ditawarkan. Hubungan isu-isu politik dan penilaian kandidat dengan perilaku pemilih juga dikaji oleh Gerald Pomper dalam karyanya berjudul *Voter's Choice : Verieties of American Electoral Behavior* (1973) dengan membandingkan tiga kali hasil penelitiannya pada pemilu 1956,1964 dan 1972, Pomper mengemukakan dalam

⁴⁶ Wawancara dengan Wardatun, buruh pabrik rokok di Tanjungkarang, Sabtu, 12 Juli 2008.

⁴⁷ Wawancara dengan Kaenah, buruh pabrik rokok di Tanjungkarang, Minggu, 13 Juli 2008.

salah satu kesimpulannya sebagai berikut : “ bahwa posisi isu-isu politik dalam menentukan voting meningkat tajam baik dampaknya secara langsung terhadap pemilih maupun secara tidak langsung melalui penilaian kandidat (Asfar, 2006 hlm 69).

Sebagian masyarakat pemilih juga masih melihat isu kampanye hanya sekedar janji ataupun sekedar promosi politik semata. Isu kampanye pada dasarnya seelalu bernada ingin melakukan perubahan, namun perubahan yang diinginkan oleh masyarakat belum juga dirasakan. Dengan demikian, jika isu kampanye yang disampaikan oleh calon tidak terealisasi dengan baik, maka sudah pasti masyarakat akan pesimis dengan janji-janji politik atau isu kampanye pada momen-momen pemilihan berikutnya, khususnya pada Pemilu 2009 ke depan.

4. Identifikasi Figur

Pemilihan Bupati Kudus secara langsung merupakan sejarah baru bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah dapat juga disebut sebagai pemilihan perorangan, bukan pemilihan partai politik, hanya saja dalam proses pencalonannya melalui seleksi partai politik yang memiliki persentase kursi di legislatif yang sesuai dengan perundang-undangan. Karena itu, harapan dari momentum ini adalah terpilihnya figur yang berkualitas, sehingga mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tentu dengan melihat sosok calon pemimpin yang kapabel dan visioner.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemilih buruh pabrik di Kabupaten Kudus juga melihat calon karena ikatan emosional terhadap figur sebagai hasil sosialisasi dan pencitraan diri oleh kandidat. Sebagaimana yang dituturkan oleh informan bahwa masyarakat kita di sini memilih karena melihat calonnya. Proses sosialisasi dan pencitraan diri yang dilakukan sejak lama dan menyentuh sampai ke pelosok-pelosok desa merupakan modal dasar bagi kemenangan pasangan Musthofa-Budiyono, karena lebih awal menanamkan ikatan emosional kepada pemilih di Kabupaten Kudus. Kebetulan pada bulan Desember 2008 Kota Kudus mengalami musibah banjir yang cukup parah diantaranya tiga kecamatan yang terparah adalah Kecamatan Undaan, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kaliwungu. Diantara para calon yang paling menonjol untuk menunjukkan kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah banjir adalah Musthofa. Hasil ini senada dengan hasil penelitian dalam pilkada Gubernur Sultra “ Variabel identifikasi figur merupakan stimulus politik yang paling dominan memengaruhi perilaku politik pemilih pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sultra 2007 (Ambo Upe,2008 hlm 210). Selain itu Musthofa juga melakukan pencitraan diri dengan kunjungan ke pasar-pasar dan rumah sakit, sehingga di lingkungan masyarakat dia cukup dikenal. Meskipun tidak semua anggota masyarakat mengetahui program calon, tetapi masyarakat merasa dihargai dengan adanya kunjungan-kunjungan

sembari berjabat tangan kepada masyarakat pemilih⁴⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan emosional yang dibangun antara kontestan dengan konstituen cukup ampuh memengaruhi para pemberi suara. Masyarakat lebih mengarahkan pilihannya atas dasar pertimbangan figur baik sebagai hasil sosialisasi secara langsung oleh si calon maupun sosialisasi yang dilakukan oleh para juru kampanye. Dari informasi di atas jika ditelaah dalam perspektif teori yang digunakan, menunjukkan bahwa tujuan yang diinginkan masyarakat pemilih tidak hanya berupa ganjaran materi/lahiriah, melainkan juga ganjaran non materi yang berupa penghargaan. Kunjungan para kandidat sembari berjabat tangan merupakan penghargaan yang cukup berarti bagi masyarakat di tingkat paling bawah.

Hasil penelitian Betty Gama dan Nunun Tri Widarwati menyatakan : Komunikasi interpersonal antara kandidat dan para pemilih merupakan strategi untuk memenangkan kampanye. Karena dengan adanya pertemuan langsung itulah para pemilih dapat melihat wajah dan karakter dari kandidat secara dekat. Berkaitan dengan hal tersebut faktor-faktor epistemic kandidat kepala daerah terhadap perilaku pemilih cenderung tinggi. Hal ini disebabkan karena para pemilih mengutamakan karakter kandidat yang baik dan patut dicontoh perilakunya.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Lasmindar, buruh pabrik rokok di Tanjungkarang, Rabu, 2 Juli 2008.

⁴⁹ Betty Gama dan Nunun Tri Widarwati, 2007, “ *Hubungan Antara Kampanye Kandidat Kepala Daerah dan Perilaku Pemilih Partisipasi Politik Wanita* “ Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol 2 No 1, Januari 2008 hlm 78, <http://puslat2petra.ac.id>, 17 Mei 2008.

Informan lainnya juga melihat idenifikasi figur sebagai stimulus politik yang sangat signifikan dalam mendapatkan simpati masyarakat. Informan kali ini tampaknya sangat mengetahui perjalanan politik masing-masing calon menuju bursa pencalonan Bupati /Wakil Bupati.

Jika informasi tersebut ditelaah lebih jauh, maka mengandung makna bahwa fenomena "sambang desa" merupakan "amunisi" yang sangat signifikan dalam mencari muka dari masyarakat pemilih. Fenomena sambang desa memiliki wujud yang bervariasi, tergantung oleh kemasan oleh siapa dan untuk siapa manuver ini diberlakukan. Untuk kali ini semua kandidat mestinya punya waktu sosialisasi yang cukup adil karena tidak ada calon incumbent, dimana bupati Moh Tamzil tidak mencalonkan diri lagi tetapi ikut dalam pencalonan Gubernur Jawa Tengah, bedanya adalah sebagian pasangan calon sudah mantap sebagian yang lain baru terbentuk. Kongkritnya, fenomena sambang desa yang berupa kunjungan kepada korban banjir, keluarga yang sedang kena musibah, keluarga-keluarga yang punya kerja, pengajian, atau apapun kegiatannya dimana disitu ada banyak orang berkumpul, sangat penting untuk dihadiri.

Beberapa responden juga menyampaikan bahwa pencitraan diri masing-masing kandidat harus disosialisasikan dengan baik sampai tingkat yang paling kecil yaitu lingkungan RT dan lingkungan kerja seperti pasar, perusahaan, tempat nongkrong dan sebagainya, tempat - tempat

yang menjadi basis calon tertentu harus selalu dijaga dan dinetralisir dari “ kabar buruk “ mengenai calonnya dan “ kabar baik” dari calon lain. Dikalangan buruh rokok telah juga tersebar pencitraan buruk mengenai salah satu calon yang berasal dari serikat buruh bahwa As’ad (ayah dari Mansyur) sebagai ketua SPSI RTMM hidup dalam kemewahan dari gajinya yang berasal dari memotong gaji kaum buruh rokok, siapa yang menyebarkan isu–isu ini tidak diketahui dan tidak ada upaya dari pihak Mansyur untuk mengkonter dan membersihkan namanya, “ pihak As’ad lebih mementingkan pendekatan kepada pemilik pabrik dari pada langsung kepada kaum buruh, padahal suara adalah milik kaum buruh secara perorangan, pemilik pabrik dalam kenyataan tidak ada yang berani memaksa kaum buruh “⁵⁰ Keadaan ini sangat berbeda dengan masa pemilihan Bupati Moh Tamzil dahulu, dimana peran As’ad sangat penting dalam lobi–lobi dan dan pendanaan, tapi dulu Bupati masih dipilih oleh DPRD.

Pencitraan diri juga harus dijaga sampai “ hari terakhir “ , dikalangan aktivis pilkada pada minggu terakhir, beredar kabar ada bocoran dari orang dalam bahwa diantara para calon yang tes IQ nya paling rendah adalah Mansyur, ini semakin memperburuk citra Mansyur.

5. Identifikasi Partai

⁵⁰ Wawancara dengan Budi Yuwono, pemerhati Pilkada dan aktivis di Jati, Minggu, 11 Mei 2008.

Berdasarkan konfigurasi partai politik pengusung masing-masing pasangan calon, realitas politik lokal di Kudus menunjukkan bahwa, partai sebagai mesin politik tampaknya cukup berpengaruh. Menjelang pelaksanaan Pilkada Kudus beberapa partai mengalami kondisi kurang solid. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai terbesar mengalami masalah karena calon yang mendapat rekomendasi dari DPP PKB Gusdur adalah bukan calon yang memenangkan konvensi calon Bupati yang digelar DPC PKB Kudus. Akibatnya para pendukung calon yang memenangkan konvensi menjadi kecewa. Calon yang mendapat rekomendasi DPP PKB adalah Amin Munadjat mantan Bupati Kudus sebelum Moh Tamzil yang sekarang, sedang wakilnya adalah Akhwan Sukandar Ketua DPC PKB yang baru menjabat, sedangkan pemenang konvensi partai adalah Asyrofi Masyitho yang saat ini menjadi Ketua DPRD. Beredar di kalangan bawah bahwa ini adalah ulah Arifin Junaidi, Bendahara DPP PKB Gusdur yang dituding menjadi calo dan pembisik Gusdur (Arifin Junaidi adalah orang Kudus). Partai Persatuan Pembangunan juga sedang tidak solid, karena Ketua DPC Hj Maesyarah sedang digoyang oleh MPC (Musyawarah Pimpinan Cabang) sehingga organisasi tidak berjalan dan kepengurusan DPC dibekukan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah). Di Partai Demokrat juga terjadi perebutan kekuatan antara Ketua dengan Sekretaris yang masing – masing ingin maju sebagai calon, akhirnya Ngatmin Alimanda. sang ketua maju

bersama Heru Fathoni dan sang sekretaris Mansyur maju sendiri sebagai Calon Bupati bersama Ketua PAN Agus Dharmawan.

Dua partai yang solid adalah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Walaupun calon yang mendapat rekomendasi dari DPP PDI P adalah bukan kader dari DPC (Musthofa adalah anggota DPRD Jawa Tengah), tetapi Ketua DPC yang saat itu menjadi wakil Bupati yaitu Hj. Noor Haniah tidak melakukan perlawanan tapi setia untuk melaksanakan rekomendasi dari DPP sehingga mesin politik PDI Perjuangan kompak berjalan. Partai Golkar juga cukup solid, Ketua Partai Golkar Budiyono mempunyai jaringan yang kuat khususnya di wilayah Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Dawe, Budiyono berasal dari keluarga terpandang dari Kecamatan Kaliwungu yang beberapa generasi melahirkan para pejabat di lingkungan Kabupaten Kudus, diantaranya yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Kudus, Pak Badri Hutomo adalah keluarga dekatnya. Di wilayah Dawe Pak Budiyono juga punya beberapa kerabat yang menjadi kepala desa, termasuk mantan Kepala Desa Dukuh Waringin Sunaryo yang saat ini menjadi anggota DPRD dari Golkar. Dukungan pengaruh dan finansial mereka tidak perlu diragukan lagi.

Mereka yang memilih atas dasar pertimbangan partai pengusung beranggapan bahwa partai calon dianggap mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri adanya pengaruh yang signifikan antara pilihan politik pemilih dengan identifikasi terhadap

partai politik pengusung calon.

Forum Refleksi dalam kajiannya menyatakan : Secara teoritis dan juga praktis, partai politik diyakini menjadi salah satu faktor yang banyak memengaruhi pilihan politik individu. Semakin kuat ikatan seseorang dengan partai politik tertentu semakin kuat pula kecenderungannya untuk mendukung setiap keputusan politik yang dibuat partai politik tersebut, termasuk untuk mencalonkan seseorang sebagai kepala daerah ⁵¹. Kondisi partai yang solid sangat mempengaruhi kepercayaan pada partai pengusung. Hasil wawancara dengan informan lainya bahwa dirinya berpendapat “ kalau mengurus partainya sendiri saja tidak becus bagaimana dia akan mengurus rakyat .”⁵² Menurut informan lainnya, partai politik masih cukup signifikan karena secara struktural partai politik mempertaruhkan citranya dalam memenangkan kandidat yang diusungnya “ partai besar pasti tidak akan sembarang mengusung calonnya kalau nanti gagal, partai pasti ikut malu”⁵³

Pada sisi lain, ditemukan informan yang melihat partai politik dari aspek pragmatismenya saja. Kedua informan ini melihat bahwa masyarakat memilih atas dasar partai itu karena pertimbangan partai pengusung pasangan calon berasal dari partai besar citra partai politik yang demikian dianggap oleh masyarakat pemilih yang bakal memenangkan pasangan

⁵¹ Forum Refleksi, 29 Juli 2006, “ *Beberapa Fenomena Pilkada Di Indonesia* “ www.salehawal.co.nr, 17 Mei 2008.

⁵² Wawancara dengan Jaslan, keluarga buruh rokok di Tanjungkarang, Jumat, 9 Mei 2008,

⁵³ Wawancara dengan Jumini, buruh batil di Tanjungkarang, Jumat, 9 Mei 2008.

calon yang diusungnya⁵⁴

Hal yang senada dengan sikap pragmatise pemilih di atas, informan kali ini mengungkapkan bahwa partai politik tetap saja mempunyai kemampuan dalam perolehan suara pada Pilkada, meskipun disadari bahwa masyarakat kini tidak lagi memilih partai. Akan tetapi, citra dan nama besar partai tertentu dapat mengarahkan pilihan pemilih. Salah satu pertimbangan masyarakat memilih dengan melihat calon dengan argumentasi bahwa partai calon , adalah partai besar⁵⁵

Menurut Nimmo , pemilih dipengaruhi oleh faktor identikasi partai digolongkan sebagai pemberi suara yang reaktif. Konsep Nimmo tersebut, berkaitan pendekatan sosiologis dengan pendekatan psikologis. Bagi Nimmo, identifikasi partai berkaitan dengan pengelompokan sosial. Sementara dalam pendekatan psikologis berkaitan dengan sosialisasi partai politik yang sejak lama telah tertanam dimasyarakat sejak pemilihan-pemilihan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan ikatan emosional fungsionaris partai politik atau yang telah berhasil duduk di kursi legislatif. Hanya saja menurut Nursal , perilaku reaktif yang didasarkan pada identifikasi partai politik memiliki kecenderungan semakin berkurang.⁵⁶

Dengan demikian, dari kedua stimulus politik di atas memiliki kontribusi'dalam memengaruhi perilaku pemilih masyarakat buruh rokok

⁵⁴ Wawancara dengan Suryati dan Mamik, buruh pabrik rokok di Tanjungkarang, Jumat, 9 Mei 2008.

⁵⁵ Wawancara dengan Rondhi, karyawan pabrik rokok di Tanjungkarang, Minggu, 13 Juli 2008.

⁵⁶ Umbo Ape, 2008, “ *Sosiologi Politik Kontemporer* “ Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta hlm 219.

dalam pilkada Kudus.

6. Kelompok Penekan.

Semangat Pilkada yang diselenggarakan secara langsung telah memberikan kesempatan bagi masyarakat sebagai pemilih untuk lebih bebas menentukan pilihannya. Namun, dalam kenyataannya proses politik lokal ini tidak hanya berhubungan dengan pemilihan umum saja, melainkan berkaitan dengan munculnya realitas baru, yakni lahirnya kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*). Realitas inilah yang dimaksudkan sebagai fenomena premanisme politik yang kehadirannya selalu berboncengan bersama dengan *event-event* politik baik nasional maupun lokal.

Tekanan-tekanan struktural atau paksaan dari pihak kelompok penekan juga menempati urutan dalam menentukan pilihan pemilih. Tekanan yang dimaksud baik berupa tekanan secara halus (mobilisasi) maupun dalam bentuk paksaan. Dalam bentuk mobilisasi, pilihan pemilih didasarkan pada pengarahan yang diberikan oleh seorang tokoh di lingkungan terdekatnya, baik lingkungan tetangga, organisasi, pekerjaan ataupun dari kelompok-kelompok lainnya yang tidak mungkin dapat ditolak.

Sebagaimana hasil penelitian Suwondo pada perilaku pemilih di Kodya Lampung pada Pemilu 1997, ia menyimpulkan bahwa para responden baik yang berasal dari PPP, Golkar maupun PDI cenderung

berorientasi paternalistik dan kurang mandiri dalam menentukan semua keputusan yang hendak diambilnya. Para pemilih masih memandang para pemimpin sebagai figur yang harus dipatuhi, dipanuti segala tindakan dan perilakunya⁵⁷.

Kemudian yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah faktor tekanan yang dimaksud berpengaruh terhadap pembentukan perilaku pemilih buruh rokok di Kabupaten Kudus ? Tampaknya, fenomena hadirnya kelompok-kelompok penekan dalam Pilkada Kudus 2008 tidak dapat dipandang sebelah mata, dalam artian faktor ini memiliki pengaruh terhadap arah pemberian suara pemilih. Dalam penjelasan Lipset sebagaimana yang dikutip oleh Asfar, hal ini dimasukkan dalam kategori *group pressures to vote* dan *cross pressures*.⁵⁸

Khususnya pemilih di Kabupaten Kudus kelompok penekan yang dirasakan berpengaruh berasal dari lingkungan terdekat seperti suami, adik, kakak atau tetangga, ini sangat berkaitan dengan sikap pemilih yang sebagian besar adalah wanita adalah bersikap pasif, pasrah, tidak mau berakibat repot dan ini dimanfaatkan sekali oleh sabet – sabet dilingkungan terbawah. Tekanan dari struktur serikat pekerja juga ada seperti yang telah direncanakan oleh kelompok Mansyur dengan menggunakan tangan para mandor, tetapi dalam kenyataan tidak banyak berpengaruh terhadap pilihan

⁵⁷ Adman Nursal, 2004, “ *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye DPR, DPD, Presiden* “ PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 56.

⁵⁸ Umbo Ape, 2008, “ *Sosiologi Politik kontemporer* “ Prestasi Pustaka Publisher, hlm 235.

para buruh . Berdasarkan hasil wawancara mendalam dari salah seorang informan diperoleh data bahwa tekanan dari serikat pekerja hanya berpengaruh sampai tingkatan mandor saja , tidak sampai di karyawan terendah. Perusahaan tidak akan berani untuk tidak netral dan kami tidak akan dipecat kalau mengabaikan serikat pekerja dalam masalah ini ⁵⁹ Walaupun demikian ini juga sudah termasuk sebagai pressure group, soal seorang buruh rokok mengalami ketakutan atau tidak tergantung dari kemampuannya mengatasi tekanan dan sekali lagi sangat tergantung dengan orang – orang yang diajak bicara atau yang menjadi teman pergaulannya sehari – hari. Yang merasa dirinya rentan dan sangat takut itu akan berpengaruh terhadap pekerjaannya yang adalah menyangkut sumber kehidupannya tentu tidak mau mengambil resiko.Karena itu, demi rasa aman tidak boleh tidak kecuali memilih kandidat yang dimaksudkan oleh kelompok penekan. Dalam konteks seperti ini, seorang pemilih memilih pasangan calon berdasarkan pertimbangan meminimalisasi resiko sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan rasional.

Secara umum, faktor tekanan dari kelompok penekan menjadi salah satu instrumen yang mampu memengaruhi perilaku politik pemilih di Kabupaten Kudus.. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden penelitian menunjukkan bahwa *pressure groups* merupakan salah satu faktor yang mampu mengarahkan pilihan politik pemilih buruh rokok.

⁵⁹ Wawancara dengan Isniwati,mandor batil pabrik rokok di Kedungdowo, Minggu, 11 Mei 2008.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa fenomena penekanan dari pihak-pihak tertentu dalam momentum pemilihan tidak pernah hilang hanya saja yang membedakan adalah kadar, tingkat dan besarnya pengaruh yang ditimbulkan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan persepsi dan sikap dari masyarakat sebagai pemilih. Jika pemilih memiliki persepsi dan keteguhan sikap, maka kehadiran kelompok-kelompok penekan tidak akan mampu berpengaruh secara signifikan, meskipun realitas ini begitu sulit lenyap dari perhelatan politik khususnya di daerah. Hal ini terjadi karena wilayah geografis atau kawasan kekuasaan dalam politik lokal dapat terjangkau dengan mudah, sehingga hubungan antara kontestan dan konstituen memungkinkan terjadinya hubungan secara vertikal yang sangat sarat dengan adanya penekanan, baik yang dimobilisir maupun secara intimidasi.

Dari empat variabel ; juru kampanye/tim sukses, isu kampanye, identifikasi figure dan identifikasi partai, menunjukkan adanya korelasi yang cukup signifikan jika dianalisis dalam perspektif psikologis. Betapa pun pendekatan ini banyak penganutnya, bukan berarti pendekatan ini lepas dari kritikan. Titik sentral yang menjadi objek kritikan adalah hubungan antara sikap dan perilaku Apakah benar sikap seseorang secara otomatis memengaruhi perilakunya? Sebab belum tentu atau tidak dapat dipastikan seorang pemilih yang sikapnya menyukai kandidat atau partai pengusungnya dalam memilih akan sesuai dengan posisi sikapnya.

Pendekatan psikologis secara implisit atau eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang hampa. Pemilih diibaratkan wayang yang tidak memiliki kehendak bebas kecuali atas kehendak dalang. Dalang dalam konteks ini adalah kandidat, partai politik, isu-isu politik, ataupun juru kampanye. Dengan demikian, jika keempat faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Maschab Michigan relevan dengan pendekatan psikologis, maka yang menjadi persoalan menarik dalam analisis ini adalah bagaimana menjelaskan fenomena yang menunjukkan adanya variasi perilaku pemilih pada suatu kelompok yang secara psikologis memiliki kesamaan karakteristik.

Kelemahan analisis dengan menggunakan pendekatan psikologis dalam mengkaji variabel yang mengkonstruksi perilaku politik pemilih adalah dengan adanya fenomena yang disebut *split voting* (dukungan yang menyilang). Fenomena *split voting* merupakan pilihan rasional pemilih. Dalam studi *voting behavior*, pemilih rasional biasanya menggunakan kalkulasi untung rugi dalam menentukan pilihan politiknya. Kalkulasi demikian sangat berkaitan dengan kandidat yang menawarkan program-program ataupun imbalan sesuai dengan preferensi politik masing-masing pemilih. Dengan demikian, analisis dari keempat konstruk perilaku politik tersebut tetap dalam ranah pendekatan rasional.

Sementara kedua faktor berikutnya (insentif/hibah politik dan

kelompok penekan) sangat relevan dikaji dalam perspektif rasional atau pilihan rasional. Imbalan materi maupun non materi yang berikan kepada pemilih merupakan pilihan yang dalam pendekatan rasional disebut sebagai pilihan rasional, karena pemilih sedang mengkalkulasi keuntungan semaksimal mungkin (*maximum gained*). Begitu pula sebaliknya, pemilih senantiasa menghindari berbagai resiko dari tindakannya itu, dalam artian pemilih memilih alternatif tindakan yang mendahulukan keselamatan. Karena itu, ketika pemilih menentukan pilihannya atas dasar tekanan dari *pressure groups*, adalah rasional dalam perspektif ini.

4.2.3.2 Pemilih yang tidak memberikan suara (Golput).

Pada setiap ajang pemilihan baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum legislatif, dan pemilihan umum tingkat lokal, perilaku pemilih hanya menunjukkan dua kemungkinan besar yakni memberikan hak pilihnya pada salah satu calon atau sebaliknya yang dikenal dengan istilah golongan putih (Golput). Golongan putih telah menjadi fenomena politik yang menarik di Indonesia sejak tahun 1970-an. Hal ini terjadi karena golongan putih tidak hanya diartikan sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tetapi telah menjadi gerakan politik (*political movement*) yang dimotori oleh Arief Budiman yang menyuarakan kritikan pedas terhadap rezim Orde Baru yang dinilai dalam pelaksanaan Pemilu tidak demokratis . Para pencetus golongan. ini menyerukan agar

para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, karena mereka memandang memilih berarti mengabsahkan proses Pemilu.

Memilih atau tidaknya seseorang sangat dipengaruhi oleh stimulus politik sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Lindenfeld menemukan faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, sehingga orang tersebut bersikap apatis. Sedangkan Milbarth menemukan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pertama, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Misalnya, seringkali orang ikut dalam diskusi-diskusi politik, melalui media massa, ataupun diskusi informal. Kedua, karena faktor karakteristik seseorang yang berwatak sosial, politik, ekonomi, dan aktivitas politik lainnya. Ketiga, faktor karakteristik sosial seseorang yang menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama. Keempat, faktor situasi atau lingkungan politik seseorang yang kondusif. Sebaliknya, orang menghindari diri dari kehidupan politik menurut Rosenberg disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Pada kondisi demikian orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. Kedua, karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan, karena partisipasi politiknya tidak

akan memengaruhi proses politik. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, orang menganggap bahwa tidak ada hasil yang dapat diperoleh dari partisipasi politik⁶⁰.

Hasil wawancara mendalam terhadap beberapa informan diperoleh informasi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pemilih tidak memberikan hak pilihnya kepada salah satu pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus adalah karena pemilih yang bersangkutan tidak mendapat imbalan dari salah satu pasangan calon baik imbalan secara langsung maupun melalui perantara, berupa barang atau pun uang tunai dan lain sebagainya sehingga masyarakat dalam hal ini buruh rokok merasa tidak memiliki keuntungan dari proses pemilihan tersebut. Imbalan itu menjadi harapan alternatif karena harapan yang menunjukkan perubahan tidak kunjung datang⁶¹. Fenomena ini mirip dengan hasil penelitian perilaku pemilih masyarakat pedesaan dalam pilkada langsung di kabupaten Pati 24 Juli 2006 dimana ketidakhadiran pemilih sebagian besar disebabkan karena tidak adanya kompensasi material.⁶²

Sementara itu, ada pula argumentasi informan yang cukup menarik yang mendasari pemilih tidak memilih yaitu masyarakat tidak mau memihak kepada

⁶⁰ Maran, Rafael R, “ *Pengantar Sosiologi Politik* “ Rineka Cipta, Jakarta, hlm 243

⁶¹ Wawancara dengan Anna, buruh rokok di Tanjungkarang, Minggu, 20 Juli 2008.

⁶² Surandim Achmad, Tesis “ *Perilaku Pemilih Masyarakat Pedesaan dalam Pilkada di Kabupaten Pati* “ MIP Undip, hlm 108.

salah satu calon ⁶³ . Hal ini tampaknya menarik diperhatikan oleh karena di tengah hiruk-pikuk Pilkada dengan kondisi politik yang memanas menyebabkan masyarakat terpolarisasi pada kubu-kubu tertentu. Di samping itu, masyarakat menganggap memilih sebagai bentuk segmentasi sosial. Padahal, pemilihan dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

Berdasarkan hasil wawancara, ada sebagian kecil responden yang tidak memberikan hak suaranya pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus 2008. Alasan pemilih tidak memilih pun bervariasi. Ada yang tidak memilih karena tidak mendapat kartu pemilih dan ada pula yang tidak datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya pada 12 April 2008 lalu karena merasa tidak memperoleh keuntungan dari hajatan tersebut, bahkan masih terdapat pemilih yang bersikap apatis dengan menganggap bahwa memilih atau tidak itu sama saja.

Manifestasi dari persepsi yang demikian adalah berkurangnya keterkaitan antara para kandidat dengan massa sebagai masyarakat pemilih. Tindak lanjut dari persepsi seperti ini melahirkan sikap bahwa ikut pemilihan atau tidak sama saja, dalam artian tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam menentukan nasib masyarakat yang lebih baik. Secara konkrit dari sikap demikian adalah pemilih tidak bersedia datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya atau yang disebut sebagai Golput.

Memilih (*voting*) atau tidaknya (*non voting*) seseorang merupakan

⁶³ Wawancara dengan Mundasih, buruh rokok di Tanjungkarang, Minggu, 20 April 2008.

pilihan politik atau perilaku politik yang nampak. Menurut Lipset ⁶⁴, kelompok pemilih akan memiliki tingkat pemberian suara yang tinggi jika: (1) kepentingan mereka sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah; (2) mereka memiliki akses terhadap informasi tentang relevansi keputusan-keputusan politik dengan kepentingan mereka; (3) mereka terkena tekanan sosial yang mendorong pemberian suara; (4) mereka tidak berkeinginan untuk memilih partai-partai politik yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengamat politik, menunjukkan adanya realitas yang disebut dengan *ghost voters*, seperti pemilih yang sudah meninggal, tidak dapat dicari alamatnya karena sudah pindah, atau tercatat sebagai pemilih tidak hanya di satu tempat. Mengapa fenomena Golput penting disoroti dalam penelitian ini? Tentu saja hal ini menjadi domain analisis yang sangat penting, mengingat semangat demokrasi lokal dewasa ini dititikberatkan pada partisipasi pemilih. Kualitas dan kuantitas pemilih merupakan variabel penting dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas sebagai hasil kerja demokratisasi.

Sementara itu menurut Norris, ⁶⁵ menurunnya tingkat partisipasi pemilih berkaitan dengan turunnya tingkat kepuasan terhadap *performance* pemerintah, sementara Franklin melihat penurunan tingkat partisipasi pemilih berkorelasi dengan penurunan *trust* para pemilih terhadap para

⁶⁴ Umbo Ape, 2008, " *Sosiologi Politik Kontemporer* " Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta hlm 246.

⁶⁵ Marijan, Kacung, 2006, " *Demokratisasi di daerah, Pelajaran dari Pilkada Langsung* ", Pustaka Ereka, Surabaya, hlm 56.

politisi

Jika ditelaah lebih jauh kajian Norris dan Franklin tersebut, maka ditemukan relevansinya dengan kondisi real pemilih di Kabupaten Kudus. Para pemilih berargumentasi bahwa siapa pun yang duduk di dalam pemerintahan sulit untuk dipercaya karena tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah diucapkan pada momen suksesi. Atas dasar argumentasi tersebut, pemilih memiliki sikap sinis terhadap para politisi yang dinilai hanya mengobral janji dan hanya tinggal "isapan jempol" belaka.

Hal yang senada dengan pernyataan di atas, menurut pakar politik bahwa fenomena Golput sangat signifikan dengan tingkat kekecewaan masyarakat terhadap proses perhelatan politik selama ini. Kekecewaan ini ditujukan kepada pemerintah dan partai politik. Sehingga siapa pun yang tampil sebagai kandidat ataupun partai politik apapun yang menjadi pengusungnya tidak lagi mampu memengaruhi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. Fenomena ini akan terus berlanjut pada momen pemilihan umum tahun 2009 mendatang .

Hendra Manurung menganalisis ; rangkaian pemilu yang diselenggarakan langsung secara berurutan di tahun 2004, menggoreskan catatan bahwa semakin banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilu legislatif, sedikitnya hanya 84 persen pemilih terdaftar yang menggunakan suaranya. Kemudian, pada pemilu presiden, partisipasi masyarakat semakin menurun menjadi 78,23 persen. Pada pemilu presiden

putaran kedua, tingkat partisipasi pemilih semakin melorot menjadi 76,63 persen. Fenomena ini seakan menguatkan argumentasi Anthony Giddens (Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives, 1999), haruskah kita menerima kenyataan, bahwa keberadaan lembaga-lembaga demokrasi semakin tidak dibutuhkan, pada titik dimana demokrasi justru semakin mengemuka dalam masyarakat. Kenyataannya, fenomena apatisme masyarakat terhadap pemilu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara yang jauh lebih maju dan dewasa kehidupan demokrasinya, ditemukan penurunan antusiasme politik yang cukup besar. Giddens menyebutnya sebagai paradoks demokrasi (paradochial of democracy). Ketika demokrasi menyebar ke seluruh dunia, justru di negara-negara yang demokrasinya sudah maju muncul kekecewaan atas proses dan keberlangsungan demokrasi. Kepercayaan terhadap para politisi semakin merosot, seiring dengan meningkatnya masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (golput). Semakin banyak orang tidak tertarik pada politik parlemen yang dipenuhi dengan “politik dagang sapi”, terutama kelompok pemilih muda. Untuk kasus di Indonesia, apatisme masyarakat muncul akibat kekecewaan, karena tidak adanya perubahan signifikan bagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat reformasi tahun 1998, harapan masyarakat akan perubahan begitu mengemuka. Namun, kepentingan elit penguasa sama sekali tidak membawa harapan dan tidak bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat kemudian putus asa dan kehilangan kepercayaan pada politisi. Keberadaan partai politik sebagai

salah satu faktor utama untuk membangun kepercayaan konstituennya, seharusnya menumbuhkan harapan adanya perubahan signifikan yang berkelanjutan. Mayoritas parpol terbukti hanya menyentuh konstituennya saat menjelang pemilu maupun pilkada, dengan tujuan pragmatis dan visi serta misi jangka pendek dalam upaya meningkatkan jumlah suara, dimana setelah pemilu, peran parpol pun menghilang dari ingatan masyarakat. Jika perilaku parpol demikian tidak berubah, maka besar kemungkinan apatisme masyarakat pada Pemilu 2009 akan meningkat tajam⁶⁶

Dalam penelitian ini ditemukan paling tidak ada tiga alasan seseorang tidak ikut dalam Pilkada 2008. Pertama, alasan administratif, misalnya tidak mendapat surat undangan, atau belum memperoleh kartu pemilih. Kedua, alasan individual, misalnya sedang bekerja, ada keperluan pribadi di saat hari pemilihan tanggal 12 April 2008 lalu. Ketiga, alasan politis, yakni menganggap Pilkada tidak ada gunanya dalam meningkatkan kehidupan lebih baik.

Melihat beragamnya faktor yang menyebabkan pemilih tidak memberikan hak pilihnya, maka pertanyaan yang menarik dalam menganalisis perilaku Golput adalah mengapa seseorang pemilih tidak ikut memilih dalam Pilkada. Secara teoritis dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan sebagaimana teori-teori mengenai perilaku

⁶⁶ Hendra Manurung, Jumat 6 Juli 2007, “ *Kebudayaan dan Pemilu 2009* “ Departemen Pertahanan RI, www.dephan.go.id, 17 Mei 2008.

pemilih (*voter behavior*). Penjelasan ini memusatkan perhatian pada individu. Besar kecilnya partisipasi pemilih (*voting turnout*) dilacak pada sebab-sebab dari individu pemilih. Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.

Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. Ketiga, teori ekonomi politik yang sering disebut dengan pendekatan rasional. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan munculnya fenomena Golput dalam Pilkada Kudus khususnya pemilih di kalangan kaum buruh rokok pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan

kecenderungan perilaku pemilih yang terjadi pada Pemilu-pemilu di tingkat nasional, yakni Golput aktif dan Golput pasif. Golput aktif muncul dari kesadaran pemilih yang disebabkan oleh bangkitnya sikap kritis dan apatis. Golput aktif merupakan protes bahkan dimaknai sebagai *punishment* dari proses politik yang sedang berjalan. Pemilih Golput yang kritis, cenderung tidak memilih karena melihat kandidat yang tampil diyakini tidak mampu melakukan perubahan yang signifikan. Sedangkan pemilih Golput yang apatis, cenderung, kecewa dan jenuh dengan "pesta obral janji", baik yang dilakukan oleh kandidat maupun dari pengalaman pemilihan sebelumnya. Sedangkan Golput pasif, tidak, didasarkan pada kesadaran atau tidak memiliki keterkaitan dengan makna politis. Golput tipe ini disebabkan oleh pemilih tidak mendapat kartu pemilih, berada di tempat lain ataupun karena tidak mengetahui proses pemilihan.

4.2.4. Harapan Kaum Buruh Rokok pada Para Kandidat.

Greenstain menjelaskan alasan bahwa sikap merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik seseorang yaitu disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, yang meliputi *pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut ; *kedua* , sikap merupakan fungsi penyesuaian diri artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang dijadikan panutan; *ketiga*, sikap

merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.⁶⁷

Sikap kaum buruh rokok dalam kegiatan pilkada tidak lepas dari kepentingan kaum buruh rokok yang merupakan cerminan dari ungkapan identitas dan harapan-harapannya. Tidak banyak kaum buruh yang dapat mengungkapkan harapan dan keinginannya dengan kata-kata apalagi tertulis, namun hasil dan realita kehidupan kiranya lebih banyak daripada seribu kata.

Hampir semua informan menekankan harapannya untuk dapat bekerja dengan lancar, artinya setiap hari masih dapat bekerja memproduksi rokok, jam kerja tidak dikurangi dan tidak terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). “ harapan saya, pabrik tetap berjalan, saya masih tetap dapat bekerja. Kalau pabrik berhenti dari mana saya dapat uang untuk belanja sehari-hari, tabungan tidak punya, modal tidak punya, ketrampilan ya hanya nglinting rokok”⁶⁸

Kekhawatiran akan kelangsungan pekerjaan disebabkan oleh berbagai informasi yang mereka dengar dan mereka rasakan seperti jumlah produksi yang mulai dikurangi, hari kerja yang dulunya enam hari dari senin sampai sabtu sekarang menjadi lima hari dengan sabtu menjadi hari libur, bahkan ada yang hanya empat hari kerja dengan alasan produksi dikurangi.

Sejak awal tahun 2008, ada kecenderungan produksi rokok kretek mulai

⁶⁷ Asfar, Mohammad, 2006 “ *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004* “ Pustaka Eureka Surabaya, hlm 59.

⁶⁸ Wawancara dengan Asfiah, buruh rokok di Kedungdowo, tanggal 3 Mei 2008.

menurun, pabrik rokok besar seperti Jarum dan Noyorono telah mengurangi hari kerja untuk seluruh karyawannya, pabrik kelompok sedang seperti Gentong Gotri telah mengurangi jam kerja dan produksinya hingga para buruh giling hanya aktif sampai dengan jam 10.00 pagi, sedangkan Jambu Bol bahkan hanya mempekerjakan karyawannya dua hari dalam satu minggu dan tidak mampu membayar THR (tunjangan hari raya). Di pabrik rokok Jambu Bol sepanjang Januari sampai Juni 2008 telah terjadi dua kali demonstrasi besar yang memacetkan jalan raya Kudus – Pati, karena lokasi pabrik berada di kiri kanan jalur pantura Kudus-Pati desa Ngembal Rejo Bae Kudus. Tuntutan buruh adalah minta kepastian kalau masih dipekerjakan supaya diberi uang tunggu, kalau di PHK mereka minta diberi pesangon.

Dikalangan pabrik kecil dan sangat kecil, buruh yang kena PHK juga sudah banyak namun kurang mendapat perhatian, yang sangat disayangkan oleh para buruh dari perusahaan kecil adalah munculnya persaingan baru antara pabrik rokok besar dan kecil dimana pabrik besar menurut mereka ingin menumpas pabrik rokok kecil dengan cara legal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008, digunakan untuk melakukan penugasan dari pemerintah sekurang-kurangnya untuk mengurangi cukai palsu, sosialisasi peraturan dibidang cukai dan pemetaan industri rokok. Jumlah alokasi dana yang diperoleh Kabupaten Kudus tahun 2008 adalah Rp. 17,2 milyar. Sebagai akibat dari operasi penertiban pabrik rokok yang tidak patuh membayar cukai, lebih dari seratus

pabrik kecil ditutup, ada yang disegel, ada yang ditangkap. Akibat dari penutupan ini semakin banyak buruh yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan nafkah untuk keluarganya. Ini adalah tindakan legal tetapi dianggap juga permainan pabrik besar yang mendorong penumpasan terhadap pabrik kecil, mengapa kok tidak dilakukan pembinaan secara bertahap lebih dahulu dengan prioritas melindungi para pekerja dan keluarganya.

Kaum buruh rokok menginginkan para kandidat mengetahui permasalahan mereka, memikirkan solusinya juga apabila akan menetapkan larangan merokok, agar mereka tetap dapat hidup dan menghidupi keluarganya. Mereka tidak yakin para kandidat memperjuangkan hal ini termasuk kandidat dari serikat buruh Mansur As'ad, buktinya tidak ada program atau isu kampanye yang memuat permasalahan ini, tidak ada yang secara idealis akan memperjuangkan hal ini selanjutnya para buruhpun tidak punya ikatan psikologis dengan semua kandidat.

Beban hidup yang berat dan mahal selanjutnya mendorong kaum buruh untuk mengungkapkan harapannya agar kandidat yang terpilih adalah orang yang mempunyai program untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Program dan janji kampanye yang terlalu umum dan abstrak juga sulit dimengerti, dan tidak bisa ditagih apa sudah dilaksanakan apa belum. “ kalau bisa pilih pejabat yang mengerti kondisi rakyat kecil, memperjuangkan sembako murah, bensin jangan naik “⁶⁹

“ saya pilih Mustafa karena janji kampanyenya lebih mudah diingat, pemberian

⁶⁹ Wawancara dengan Mastonah buruh pabrik rokok di Tanjungkarang, tanggal 5 Juli 2008.

bantuan kematian, KTP gratis dan KK gratis, kalau terpilih kan dapat ditagih “⁷⁰

Bagi para buruh rokok, masalah angkutan atau transportasi adalah salah satu pengeluaran yang cukup besar. Di Kudus ongkos angkota (dengan kendaraan Suzuki Carry atau Colt Diesel) standar adalah Rp. 3000,-, untuk jarak Terminal sampai Simpang Tujuh sekitar 5 kilometer, kalau lebih dekat dapat berkurang sedikit kalau lebih jauh juga harus tambah. Dengan penghasilan yang mulai berkurang karena pengurangan produksi mereka rata-rata hanya membawa pulang uang Rp. 8.000- Rp. 15.000,-, dengan biaya transport sebesar itu pulang pergi, uangnya akan habis di transportasi. Oleh karena itu mereka bersedia berdesak-desakan, ada yang berdiri, dipangku, satu kursi untuk dua orang, jongkok, duduk dipintu dan sebagainya agar dapat membayar hanya separohnya. Colt bak terbuka untuk sayuran atau ternakpun menjadi sarana transportasi untuk mereka, yang penting murah dan cepat sampai. Pernah dilakukan operasi lalu lintas terhadap angkutan plat hitam (bukan omprengan resmi) dan bak terbuka yang digunakan angkutan buruh pabrik, maka terjadilah pemogokan dan protes dari para buruh, polisi dan pemerintah dianggap tidak mengerti permasalahan mereka. Sejak saat itu operasi lalu lintas untuk hal seperti ini tidak dilakukan lagi.

Diantara sesama kaum buruh rokok sendiri, terdapat kesenjangan antara buruh pabrik rokok skala besar seperti Jarum dan Noyorono dengan buruh pabrik rokok skala kecil. Gaji dan kesejahteraan mereka relatif lebih tinggi dari yang lain, ini antara lain disebabkan karena kedua perusahaan tersebut sudah dikelola

⁷⁰ Wawancara dengan Jumini, buruh rokok di Kedungdowo, tanggal 9 Mei 2008.

dengan baik dan terikat dengan berbagai aturan ketenagakerjaan, sedangkan di perusahaan-perusahaan kecil, tenaga mereka digunakan saat perusahaan membutuhkan dan besarnya upah adalah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Harapan mereka pemerintah maupun serikat pekerja dapat mengusahakan agar hak mereka dapat distandarkan dengan perusahaan besar, misalnya mendapatkan THR menjelang hari raya idhul fitri, pesangon yang dapat menjadi modal kerja apabila terkena PHK, ongkos persalinan, dan lainnya.

Daerah Tangkajene Kepulauan adalah daerah yang sebagian warganya pada Januari 2008 lalu turut terkena banjir karena termasuk daerah yang rendah khususnya wilayah bagian selatan, ada sebagian warga yang terpaksa mengungsi bersama warga Jetiskapuan desa sebelah baratnya, mereka mengungsi di balai desa dan terminal cargo depan terminal bis Kudus, Mereka terkesan saat ada kandidat yang datang menengok mereka dan berharap punya bupati yang peka terhadap rakyatnya yang sedang terkena musibah dan bersedia turun ke lokasi agar tahu sendiri dan dapat merasakan kesulitan yang dialami oleh rakyatnya.

Dalam wawancara mendalam ada juga informan yang menyoroti banyaknya pejabat yang korupsi seperti disiarkan di televisi dan menyayangkan korupsi yang dilakukan oleh mantan ketua DPRD Heris Paryono yang merugikan uang negara milyaran rupiah, “ piro wene mas, dadi ketua DPRD durung rong tahun kok wis nukoni sawah-sawah pinggir dalan kene kecekel kabeh “ (baru sebentar belum ada dua tahun menjadi ketua DPRD kok sudah sanggup membeli

tanah-tanah pinggir jalan raya disini semua).⁷¹ Mereka berharap kandidat yang terpilih nanti berperilaku jujur, tidak korupsi, tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagian dari responden, saat ditanya mengenai aspirasi atau harapannya terhadap kandidat, mereka tidak tahu apa yang dapat dilakukan oleh bupati, tidak dapat membedakan antara wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan tidak tahu apakah suara mereka dalam pilkada itu penting atau tidak, karena ini adalah pilkada yang pertama. Mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang jelas oleh petugas. Akhirnya mereka akan mencoblos kalau ada yang mengajak dan tergantung siapa yang memberi sugu (uang). Pada masa yang akan datang mereka berharap mendapatkan sosialisasi agar dapat mengenal identitas calon, programnya dan pentingnya suara mereka dalam pemilihan.

⁷¹ Wawancara dengan Kaenah, buruh rokok di Tanjungkarang, tanggal 5 Juli 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Simpulan.

Pertama : Menjawab tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam Pilkada Kudus tahun 2008, berturut- turut adalah *pertama* faktor juru kampanye atau tim sukses atau sabet, hal ini sangat dipengaruhi oleh sikap buruh rokok yang cenderung pasif dalam kegiatan politik, sebagian besar mereka adalah kaum wanita, waktunya sebagian besar digunakan untuk bekerja dan mereka cenderung tidak ingin terlibat konflik sehingga suara mereka tergantung orang –orang yang ada di sekitarnya seperti suami, saudara atau tetangga atau yang dapat memanfaatkannya. Disini para sabet bisa selalu memonitor perkembangan dan perubahan sikap konstituen yang menjadi targetnya, mengabarkan berita buruk dari calon lain dan meng counter apabila ada berita jelek mengenai calonnya. Faktor *kedua* adalah insentif atau hibah politik atau apapun namanya. Ini sangat erat kaitannya dengan sikap pragmatis saja, mereka kurang percaya apakah Pilkada akan membawa perubahan pada masa

depan menjadi lebih baik toh janji politik pada masa kampanye adalah hal yang biasa, besok setelah menjadi pejabat mereka akan mendapat uang yang banyak dari berbagai proyek dan upeti dari perusahaan-perusahaan besar, maka kalau saat kampanye mereka membagi-bagikan uang atau lainnya itu adalah hal yang wajar, mereka tidak menganggap itu money politik atau menjual suara tetapi seperti bantuan sosial, kepedulian terhadap masyarakat kecil atau lainnya. Kalau tidak memberikan apa-apa itu malah dianggap pelit. Faktor *ketiga* adalah identifikasi calon, mereka akan memilih calon yang menurut kabar perilakunya baik dan mau turun dan berkunjung ke lingkungan masyarakat bawah, sebagian besar mereka belum pernah bertemu apalagi kenal dengan para calon, tetapi perbincangan di masyarakat tentang calon yang aktif berdialog dengan masyarakat sangat berkesan. Demikian juga sebaliknya sedikit saja kelemahan calon tertentu akan cepat berkembang tak terkendali karena informasinya hanya lewat perbincangan. Calon dari pengurus serikat pekerja mestinya punya keuntungan tersendiri karena sudah cukup dikenal tetapi kualitasnya justru sangat diragukan, dengan tidak adanya calon incumbent, maka masa perkenalan dari calon punya waktu yang relative sama. Faktor *keempat* adalah isu kampanye atau visi misi calon. Visi Misi dan janji kampanye calon yang terlalu panjang

tidak akan dibaca, diingat dan dimengerti oleh kaum buruh, janji kampanye yang praktis dan bisa ditagih kalau nanti terpilih seperti dana sosial kematian, akte lahir gratis, KTP gratis akan mudah diingat, mereka tidak bakal percaya janji yang terlalu muluk yang sulit untuk dijelaskan. Faktor *kelima* adalah identifikasi partai, calon dari partai besar seperti PDIP, Golkar, PKB maupun PPP mempunyai pengaruh karena sudah dikenal tetapi faktor partai yang solid lebih menonjol, bagi mereka bagaimana akan memerintah kalau ngurus partainya saja tidak becus. Partai yang sedang tidak solid juga berpengaruh pada macetnya mesin partai. Faktor *keenam* adalah kelompok penekan. Sebagian besar mereka adalah perempuan dan merupakan pekerja kelas bawah, yang sangat rentan pada mobilisasi dan tekanan. Pada mulanya penulis menganggap kelompok penekan yang paling dominan adalah serikat pekerja karena ketua serikat pekerja punya target, ternyata para pekerja tidak takut pada serikat pekerja yang ditakuti bukan serikat pekerja tetapi pemilik perusahaan, sedangkan pemilik perusahaan berkomitmen netral. Kelompok penekan yang lebih dominan adalah para sabet disekitarnya yang tidak membebaskan mereka berpikir dan menentukan sendiri pilihannya. Keterbatasan terhadap akses informasi dan ekonomi membuat mereka mudah dimobilisasi.

Kedua : Kaum buruh khususnya buruh rokok mempunyai pendapat bahwa antara pekerjaan dengan pilihan politik adalah masalah yang berbeda, buruh rokok adalah pekerjaan sedangkan pilihan politik seperti dalam pemilu atau pilkada adalah hak individu, dalam kaitan dengan serikat pekerja mereka tidak percaya kalau serikat pekerja dapat memperjuangkan aspirasi mereka, mereka lebih percaya kalau nasibnya ditentukan oleh pemilik perusahaan. Kalau ada orang dari serikat pekerja yang mengklaim dia menguasai suara kaum buruh hal semacam ini tidak perlu digubris. Suara kaum buruh rokok tidak dapat dilepaskan dari lingkungan tempat tinggalnya, suaminya, saudaranya, kyainya dan lain sebagainya.

Ketiga : Akibat dari kelemahan ekonomi, pendidikan, fisik dan lainnya partisipasi politik kaum buruh rokok tidak sepenuhnya bisa mandiri, menjaga harmoni, kerukunan daripada membuka konflik dengan kiri kanan memudahkan mereka untuk dimobilisasi, untunglah para pemilik perusahaan bersikap netral dalam politik sehingga tidak menambah beban mereka.

Keempat : Memenangkan pertarungan dalam pilkada, dibutuhkan kondisi terbaik dari semua aspek yang saling menunjang, strategi yang tepat sesuai dengan situasi nyata dilapangan sangat menentukan. Saat ini strategilah yang utama, kebutuhan dana untuk konsolidasi dan insentif bagi pemilih harus dihitung dengan baik

dan mengalir dengan efisien efektif sampai hari pelaksanaan, walaupun uang sudah keluar milyaran, sebagian besar tahapan sudah dilalui dan dibiayai, tetapi satu hari menjelang pelaksanaan uang habis dan para sabet tidak terbiayai, maka upaya yang dilakukan berbulan bulan akan sia-sia. Memelihara para sabet yang dapat dipercaya, terlatih, teruji kesetiaannya lewat partai, dan dicukupi kebutuhannya sampai hari pelaksanaan adalah upaya yang paling efektif.

Kelima : Beberapa aspirasi yang menjadi harapan kaum buruh rokok terhadap para kandidat dalam pilkada Kudus adalah sebagai berikut : *Pertama*, Agar kandidat memperjuangkan dengan cara apapun agar buruh rokok dapat tetap bekerja dengan lancar, artinya setiap hari masih dapat bekerja memproduksi rokok, jam kerja tidak dikurangi dan tidak terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). *Kedua*, dalam melaksanakan operasi kepatuhan terhadap aturan cukai rokok, hendaknya petugas tidak dengan mudah memutuskan untuk menutup pabrik-pabrik yang melanggar, tapi lebih dulu memikirkan nasib para buruhnya dari mana mereka cari penghidupan *Ketiga*, dengan semakin banyaknya aturan dan kampanye larangan merokok para pemimpin juga memikirkan solusinya , agar mereka tetap dapat hidup dan menghidupi keluarganya. *Keempat*,

memperjuangkan agar kebutuhan pokok dan transportasi yang mereka butuhkan sehari-hari tetap terjangkau. *Kelima*, buruh pabrik kecil mengharap untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan setara dengan buruh pabrik besar. *Keenam*, kandidat yang terpilih hendaknya peka terhadap rakyat yang sedang terkena musibah dan mau turun langsung ke lapangan. *Ketujuh*, kandidat yang terpilih hendaknya berperilaku jujur, tidak korupsi dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. *Kedelapan*, agar sebelum pelaksanaan pilkada seperti ini mereka mendapatkan sosialisasi yang jelas.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis teoretik dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka terdapat dua ragam implikasi sebagai bagian akhir dari penelitian, yakni implikasi teoretik dan implikasi praktik. Pada tataran teoretik, implikasi penelitian ini berupa ketertarikan antara temuan teoritik dalam perilaku politik pemilih buruh rokok dengan teori-teori yang digunakan. Secara empirik, pada titik tertentu mengukuhkan teori yang ada pada titik selanjutnya sifatnya mengembangkan teori formal.

5.2.1. Implikasi Teoretik

Setelah mengetahui pola perilaku politik pemilih buruh rokok dan berbagai faktor yang memengaruhinya sebagai dasar preferensi pemilih di Kabupaten Kudus, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka analisis berikutnya dilanjutkan pada upaya penemuan model yang menjadi substansi dalam perilaku politik pemilih baik yang terimplementasi dalam pemberian suara maupun yang tidak memilih.

Tentu saja upaya menemukan konsepsi tentang makna perilaku politik pemilih buruh rokok dalam menentukan hak pilihnya berkaitan dengan seperangkat perspektif teoretis yang digunakan sebagai *starting point* dalam menganalisis hasil temuan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian sebelumnya pada umumnya hanya mengungkap konfigurasi pemberian suara organisasi peserta pemilu (OPP), tentu saja hal ini cukup beralasan. Pemilihan umum di masa Orde Baru sering dianggap hanya sebagai partisipasi semu (*pseudo participation*) yang oleh Huntington sebagai partisipasi yang dimobilisasi. Sehingga kedalaman makna politik di balik tindakan para pemilih tidak ditemukan. Letak substansi dari perilaku pemberian suara adalah apa sebenarnya yang mendasari seseorang dalam memberikan suaranya? Apakah seseorang yang tidak memilih dan yang memilih akan mendapat perlakuan kebijakan yang berbeda, tentu saja tidak, karena ketika pemerintah terpilih tidak lagi menjadi milik sebuah kelompok atau golongan, melainkan seluruh

masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan alasan mendasar pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dari berbagai varian stimulus politik yang menjadi motivasi pemilih menentukan pilihannya, ternyata dapat disatukan oleh misi visi pemilih. itu sendiri. Faktor atau variabel yang dapat dijadikan sebagai kategorisasi pemilih pada pola yang sama adalah masalah waktu pencapaian tujuan. Berbagai varian stimulus politik yang ditemukan tampaknya hanya sekedar instrumen pencapaian tujuan, sehingga model konfigurasi tidak stabil atau tidak permanen. Orientasi waktu pencapaian tujuanlah yang menyebabkan adanya konfigurasi pemilih pada pola yang sama.

Disadari atau tidak, manusia sebagai insan politik (*zoon politicon*) dalam aktivitasnya baik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok, senantiasa memiliki tujuan masing-masing. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, manusia terikat oleh nilai, norma, dan kaidah di mana mereka berinteraksi. Durkheim melihat realitas ini sebagai fakta sosial, yang dimaksudkan untuk mengatur pola perilaku manusia. Lain halnya Weber, tindakan manusia sebagai sesuatu yang memiliki makna subjektif. Individu dipandang sebagai makhluk yang kreatif, sehingga mampu melakukan tindakan sesuai makna dan tujuan yang diinginkannya. Sementara itu, paradigma perilaku melihat perilaku atau tindakan manusia atas dasar

stimulus dan respon. Pandangan behavioris dalam kehidupan politik terkait dengan proses sosialisasi masa lalu yang memungkinkan adanya perulangan (*reinforcement*) perilaku.

Dalam konteks penelitian ini, ketiga payung utama sosiologi di atas, perlu dielaborasi lebih jauh dalam melihat realitas perilaku politik pemilih buruh rokok dalam Pilkada langsung sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik pemilih buruh rokok dalam pemilihan secara langsung sangat kompleks dan relatif tidak permanen, sangat kondisional. Perilaku politik pemilih bukan merupakan realitas yang berdiri sendiri, tidak pula sebagai perilaku yang berada pada ruang hampa. Dengan lain perkataan, perilaku politik pemilih sangat berkaitan dengan stimulus dan pertimbangan subjektif dalam merespon faktor stimulus yang diperolehnya.

Sebagaimana karya Weber bahwa tindakan sosial merupakan tindakan penuh makna yang menjadi dasar atau orientasi tindakan individu. Dari orientasi tindakan tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan kadar rasionalitas yang dikandungnya atau yang disebutnya sebagai *the degree of rationality*.⁷² Weber menyatakan bahwa suatu tindakan rasional terjadi ketika seorang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (*means*) yang dinilai tepat untuk

⁷² Umbo Ape, 2008, " *Sosiologi Politik Kontemporer* " Prestasi Pustaka Pblisher, Jakarta, hlm 258.

mewujudkannya sesuai dengan situasi yang ada. Tindakan rasional merupakan metode pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan cara yang diperhitungkan lebih tepat.

Dengan begitu, sintesa teoritis yang didasarkan pada realitas *locus* penelitian menunjukkan bahwa, perilaku politik pemilih buruh rokok di Kabupaten mencirikan model diakronik, yaitu rasionalitas perilaku pemilih dengan mempertimbangkan jarak waktu pencapaian tujuan. Derajat rasionalitas tersebut, tersusun dalam tiga rentang waktu, yakni rasionalitas retrospektif, rasionalitas pragmatis-adaptif, dan rasionalitas prospektif.

Model rasional retrospektif, yaitu kemampuan pemilih untuk memilih berdasarkan penilaiannya pada penampilan kontestan pada masa yang lalu, walaupun dalam pilkada ini tidak ada calon incumbent tetapi perilaku partai, caleg maupun pejabat yang mengingkari janji adalah hal yang biasa. Perilaku memilih retrospektif (*retrospective voting*) tidak ubahnya seperti memberikan ganjaran atau hukuman kepada kontestan. Pemilih memberikan ganjaran jika ia merasakan adanya perbaikan terhadap nasibnya dan kepentingannya selama masa berkuasa sang kontestan. Sebaliknya, pemilih akan memberikan hukuman berupa memilih kontestan lain atau bahkan tidak memilih (Golput), jika dirasakannya nasib dan kepentingannya tidak berubah atau bertambah buruk. Rasionalitas retrospektif diarahkan pada figur dan partai politik, khususnya kepada

calon yang berasal dari pengurus serikat pekerja yaitu Mansyur As'ad.

Rasionalitas yang kedua adalah rasionalitas pragmatis-adaptif dan level inilah yang banyak digandrungi pemilih oportunistis. Tipe rasionalitas ini didasarkan atau disesuaikan pada stimulus politik yang muncul pada momen pemilihan. Pragmatis adaptif disebabkan oleh beberapa hal, seperti politik uang dan termasuk memilih posisi aman dari kelompok penekan. Politik uang dalam berbagai bentuk manifestasinya, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pragmatisme politik. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang agak *soft* agar tidak terkesan membeli suara (*buying voters*).

Perilaku pragmatisme-adaptif muncul akibat pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar "isapan jempol" akhirnya mendorong pemilih menjadi pragmatis (*pragmatic voting*). Belum lagi adanya anggapan, siapa pun yang berkuasa tidak akan mampu melakukan perubahan signifikan. Rasionalitas model ini tidak mengikuti tradisi model prospektif (masa depan) dan tidak pula didasarkan pada model retrospektif (pandangan masa lalu). Melainkan sifatnya fleksibel dan kondisional. Atau dengan lain perkataan model pragmatis-adaptif, yaitu perilaku pemilih yang diorientasikan pada waktu sekarang, pemilih hanya semata melihat kepentingan sesaat.

Derajat rasionalitas perilaku pemilih paling tinggi berdasarkan

semangat dan makna pilkada langsung adalah rasionalitas prospektif. Model rasionalitas yang dimaksudkan adalah perilaku pemilih yang didasarkan pada orientasi masa depan yang lebih panjang (*prospective voting*). Perilaku pemilih dengan model prospektif dalam menentukan pilihannya didasarkan pada visi misi kandidat, rekam jejak kandidat (*track record*), integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan. Motivasi utama atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemilih dari pemberian suaranya pada salah satu pasangan calon yaitu menginginkan pemimpin yang benar-benar dengan dianggap kapabel dalam menjalankan roda pemerintahan yang *good governance and clean governance*. Rasionalitas prospektif juga dikenal sebagai pemilih yang tergolong reformis atau pemilih visioner.

Rasionalitas politik pemilih baik yang terimplementasi sebagaimana pola 1 (memilih) maupun perilaku politik yang mengikuti pola 2 (Golput) merupakan perilaku yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Karena itu, domain pertimbangan utamanya sangat ditentukan oleh tujuan dari tindakan para pemilih. Perilaku politik yang didasarkan pada waktu pencapaian tujuan inilah yang disebut dengan rasionalitas diakronik. Secara metodologis, rasionalitas diakronik bertindak sebagai variabel antara (*intervening variables*). Stimulus politik yang berupa identifikasi figur, identifikasi partai politik, isu kampanye, juru kampanye, dan *pressure groups* tidak secara langsung memengaruhi perilaku politik pemilih, melainkan terlebih dahulu melewati atau melalui variabel antara

yakni visi misi pemilih yang menjadi pertimbangan utama dalam mencapai tujuan politiknya yang dalam penelitian ini disebut sebagai rasionalitas diakronik.

Rasionalitas diakronik yang dimaksudkan penulis sejalan dengan pandangan Lasswell tentang makna perilaku politik seseorang. Dalam ungkapannya menyebutkan, "*politics is who get what, when, and how*" (politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Dari ungkapan tersebut, Ia menjelaskan dua hal penting yaitu: (1) perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan tersebut, dibentuk oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian, dan (2) perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu⁷³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola perilaku politik pemilih dalam pemilihan secara langsung terdiri atas pola perilaku pemilih yang memberikan hak suaranya dan pola perilaku pemilih yang tidak memberikan hak suaranya (Golput). Pola perilaku tersebut, dikonstruksi atau dipengaruhi oleh enam varian stimulus politik, yakni faktor juru kampanye/tim sukses/ sabet, isu kampanye, insentif/hibah politik, identifikasi figur, identifikasi partai, dan adanya tekanan dari *pressure groups*.

Berbagai varian stimulus politik tersebut, pada prinsipnya tetap dipertimbangkan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian,

⁷³ Ibid, hlm 263.

makna dari perilaku politik pemilih Buruh rokok di Kabupaten Kudus pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2008, pada dasarnya adalah pilihan rasional. Atau dengan lain perkataan, apapun yang menjadi stimulus politik yang diberikan kepada pemilih, namun yang menjadi pertimbangan utamanya adalah kapan tujuan pemilih itu tercapai. Perilaku politik pemilih di Kabupaten Kudus selalu diorientasikan dengan tujuan pribadinya yang diperoleh dari masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Pertimbangan subjektif inilah dalam penelitian ini disebut dengan rasionalitas diakronik.

Rasionalitas perilaku politik pemilih yang dimaksud, terbagi atas tiga segmen rasionalitas, yakni meliputi rasionalitas prospektif, rasionalitas pragmatisadaptif, dan rasionalitas retrospektif. Dari ketiga segmentasi rasionalitas perilaku politik pemilih buruh rokok di Kabupaten Kudus, merupakan perpaduan dari segmentasi retrospektif yang meliputi identifikasi figur, juru kampanye dan partai politik, rasionalitas pragmatis yang meliputi varian insentif/hibah politik dan kelompok penekan. Sementara segmentasi rasionalitas prospektif juga telah cukup kuat yaitu penilaian atas janji kampanye atau visi misi calon.

5.2.2. Implikasi Praktik

Menyikapi model perilaku pemilih buruh rokok yang masih sangat

sarat dengan perilaku retrospektif dan pragmatis utamanya menyangkut realitas kapitalisme Pilkada, maka ada beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi praktis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Demokrasi :

Perlunya bersama-sama meningkatkan kesadaran politik kaum buruh dengan pendidikan politik yang sehat agar ia lebih memahami hak-haknya dan pentingnya menggunakan hak-hak politiknya untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik.

2. Bagi Partai Politik :

Kondisi kehidupan para buruh yang lemah, perlu diperjuangkan secara nyata agar menjadi lebih sejahtera, adanya perlindungan akan hak – hak pekerja, tambahan ketrampilan dan peningkatan pengetahuan, tidak malah menjadi mangsa empuk untuk dijadikan objek mendukung suara murah dan mudah. Jangan biarkan mereka lemah. Partai Politik yang berada di lingkungan masyarakat yang sebagian besar terdiri dari para buruh pabrik sebaiknya memasukkan dalam programnya agenda yang akan dilakukan untuk konsumsi para buruh pabrik, melindungi kaum buruh, memperjuangkan kelangsungan dan kemajuan perusahaan agar para buruh bisa tetap bekerja serta pendidikan dan bantuan alternative bagi kaum buruh yang rentan terhadap PHK. Memberikan perhatian akan kelangsungan hidup perusahaan dan kemajuan perusahaan harus juga dilakukan secara seimbang dengan perlindungan kaum buruh, hal ini kelihatannya masih kurang diperhatikan

sehingga ada persepsi bahwa pemerintah dan partai politik hanya cenderung mengejar pemasukan dan keuntungan dari adanya pabrik tersebut, memelototi kalau ada pabrik yang berkembang dan memperoleh untung besar, mencari sumbangan, sponsor dan lain sebagainya. Contoh nyata adalah tari menarik kepentingan dalam penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau, dana ini sebagian adalah untuk penegakan hukum atas pelanggaran cukai tembakau, operasi cukai malah mengakibatkan puluhan pabrik rokok kecil ditutup, hal ini mengakibatkan ratusan sampai ribuan buruh rokok tidak bekerja, darimana mereka memberi makan keluarganya ? tidak ada reaksi dari partai politik.

3. Bagi Serikat Pekerja :

Pandangan kaum buruh bahwa serikat pekerja sebagai pemotong gaji buruh harus dirubah. Serikat Pekerja harus mereformasi diri, tidak lagi menjadikan kaum buruh sebagai objek tapi menjadikan kaum buruh sebagai subjek gerakan dan kegiatan serikat buruh. Pengurus Serikat Buruh sendiri perlu memperbaiki sistemnya agar lebih transparan sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi, misalnya melakukan nego-nego tertentu dengan pengusaha.

4. Bagi Penyelenggara Pilkada :

Agar dapat dibuat suatu sistem yang fair agar informasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu/pilkada yang sehat sampai pada para buruh yang waktunya sangat terbatas, juga pengetahuannya sangat minim serta rawan terhadap intimidasi dan mobilisasi. Itu berarti butuh waktu sosialisasi yang cukup, atas peran serta semua komponen yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya KPUD tapi juga Pemerintah. Peran para pengusaha yang cenderung netral dalam hal ini memberikan peluang yang baik bagi penyelenggara pilkada untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Taufiq, 2006, “**Modul Metode Penelitian Sosial**” Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Adman Nursal, 2004, “**Political Marketing, Strategi memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden**”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Affan Gaffar, 1992, “**Javanese Voters** “ Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Ambo Upe, 2008, “ **Sosiologi Politik Kontemporer** “ Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Amzulian Rifa’i, 2003, “ **Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah** “ Ghalia Indonesia Jakarta.
- Anonim, 26 Nopember 2004, “ **Arah Baru Perilaku Pemilih Kita** “ Freedom Institute No.30/XXXIII/20, www.freedom-institut.org/id, 30 September 2007,
- Anonim, 8 September 2007, “ **Perilaku Pemilih Pada Pilkada Serang Banten 2005** “ The Habibi Center, www.habibiecenter.or.id, 17 Mei 2008.
- Aulia, Andri, 22 April 2008, “ **Memetakan Pemilih dalam Pilgubsu** “ Tekongan.com, 17 Mei 2008.
- Awal, Saleh, 29 Juli 2006, “ **Beberapa Fenomena Pilkada di Indonesia** “ www.salehawal.co.nr. 17 Mei 2008,
- Budiarjo, Miriam, 1992, “ **Dasar-dasar Ilmu Politik** “ PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2003,” **Analisis Data Penelitian Kualitatif** “ Rajagrafindo Jakarta Indonesia.

- Burhanuddin, 5 Januari 2008, “ **Reliabelitas Teori “ Reward and Punishment “ dan perilaku pemilih Depok “** Media Indonesia, burhanuddin blog archive, 17 Mei 2008
- Carlton Clymer Rodee dkk, 2006, “ **Pengantar Ilmu Politik “** Rajagrafindo Jakarta.
- Faruk, Umar, 6 Maret 2008, “ **Mengkaji Perilaku Pemilih Dalam Pilkada “**, Pontianak Pos, www.pontianakpost.com, 17 Mei 2008,
- Firmansyah, 2007, “ **Marketing Politik “** Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- Hamidi, 2004, “**Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis, Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian**”, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Hartono, 2001, “**Bagaimana menulis Tesis, Petunjuk komprehensif tentang isi dan proses**”, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Jeff Haynes, 2000, “ **Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga “** Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Joko J. Prohatmoko, 2003, “**Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi**”, LP2I, Semarang.
- _____, 2005, “**Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia**”, LPDM Universitas Wahid Hasyim, Semarang.
- Kirk dan Miller, Bogdan dan Taylor dalam Moloeng, 2001, “ **Metodologi Penelitian Kualitatif “** Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1974. “ **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan “** Gramedia Jakarta.
- _____, Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008.
- _____, Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilu Bupati an Wakil Bupati Kudus Tahun 2008.

- Kudus dalam Angka, 2007, Badan Pusat Statistik, www.kuduskab.go.id, 1 Oktober 2008.
- Kumba, Adi Sukmono, 27 Maret 2008, “ **Pencitraan dan Realitas Politik** “ Fajar on line, www.cetak.fajar.go.id, 17 Mei 2008,
- Lipset, Seymour Martin, 2007 “ **Political Man Basis Sosial Tentang Politik** “ Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Malarangeng, Rizal, 24 Agustus 2004, “ **Hukum Liddle** “ Freedom Institut, www.freedom-institut.org.id, 17 Mei 2008,
- Malarangeng, Andi, 24 April 1997, “ **Rasionalitas Pemilih dan Prospek Demokrasi** “ Republika on line, www.apakabar@clark.net, 17 April 2008,
- Mas’oed, Mochtar dan Colin Mac. Andrews, 1991, “**Pengantar Perbandingan Sistem Politik**”, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Marijan, Kacung 2006. “ **Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari pilkada Langsung** “ Pustaka Eureka, Surabaya.
- Manurung, Hendra, 6 Juli 2007, “ **Kebudayaan dan Pemilu 2009**” Departemen Pertahanan RI, www.dephan.go.id , 17 Mei 2008,
- Moleong, Lexy, J 1997. “ **Metode Penelitian Kualitatif**. “ PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mubarok, M. Mufti, 2005. “ **Suksesi Pilkada, Jurus Memenangkan Pilkada Langsung** “ Java Pustaka, Surabaya.
- Mujani, Saiful, 2004, “ **Survei dan Perilaku Pemilih** “ Freedom Institut, 30 September 2007
- Mujani, Saiful, 2008, “ **Pak Bill dan Studi Perilaku Politik** “ Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Musfiqon, M, 13 Mei 2008, “ **Membangun Brandmarking Cagub** “ www.jawapos.co.id, 17 Mei 2008
- Radar Kudus, 2008, “ **Pilkada Kudus Jadi Ajang Judi ?** “ Jawa Pos Radar Kudus, Halaman 1, Sabtu 15 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Angka Golput Bisa Capai 43 Persen** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm1, Rabu 19 Maret 2008.

- Radar Kudus, 2008, “ **DPT Pilbup Kudus 573.353 Orang** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1 , Kamis 20 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Jangan Tamak Uang** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Kamis 20 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Makin Terang-terangan Dukung Calon** “, Jawa Pos Radar Kudus, hlm1, Jumat 21 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Pembekuan Dinilai Selamatkan PPP** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm1, Minggu, 23 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Cabup dan Cawabub Diintimidasi** “ Jawa Pos Radar Kudus,hlm 1, Rabu 26 Maret 2008.
- Radar Kudus,2008, “ **Penuh Janji di Kampanye Pertama** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Kamis, 27 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **KPUK Larang Kampanye Berbahaya** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Jumat 28 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Pasangan Calon Pilih Pisah Lokasi : Mansur Naik Andong, Wawan Pengobatan Masal** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Minggu, 30 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Awas, Angka Golput Meningkatkan** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Senin 31 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Hujan dan Angin Sertai Kampanye AMAN** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Senin 31 Maret 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Jor-joran Hadiah dari Mustofa** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Selasa 1 April 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Konsisten Usung Putra Asli Kudus** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Rabu 2 April 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Gus Dur tegaskan Kudus Harus AMAN** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Jumat 4 April 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Masih Terbesar Dalam Pengumpulan Massa** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Sabtu 5 April 2008.

- Radar Kudus, 2008, “ **Ada Serangan Fajar Segera Laporkan** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Selasa 8 April 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Dengan Trio Macam, Mansyur-Wawan Bersatu** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Senin 7 April 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Anggap Money Politics Sebagai Amal ?** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Jumat, 11 April 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Mustofa Siap Pimpin Kudus, Golput Tembus 43,54 Persen** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Minggu 13 April 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **Djambu Bol Kembali Digugat Buruh** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Kamis, 17 April 2008.
- Radar Kudus, 2008, “ **AMAN Tuntut Diulang ; Pemungutan Suara di Dua Kecamatan** “ Jawa Pos Radar Kudus, hlm 1, Sabtu 19 April 2008.
- Rafael Raga Maran, 2007, “ **Pengantar Sosiologi Politik** “ Rineka Cipta, Jakarta.
- Rifai, As, 28 April 2008, “ **Teori Dasar Pilkada Dan Kekalahan Incumbent** “ Radar Sulteng on line, www.radarsulteng.com, 17 Mei 2008
- Riyanto, Joko, 21 Maret 2007, “ **Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Jateng** “ Suara Merdeka, www.suaramerdeka.com, 17 Mei 2008.
- Sastroatmojo, Sudiyono, 1995, “ **Perilaku Politik** “ IKIP Semarang Pres, Semarang.
- Situngkir, Hokki, 2004, “ **Stabil Evolusioner Partai Politik di Indonesia Studi Kasus Menjelang PEMILU 2004** “, Bandung
- Sujianto, Rahmat, 23 Juli 2007, “ **Bagi Hasil Cukai Dorong Daerah Lebih Peduli** “ Bisnis Indonesia on line, <http://web.bisnis.com>, 18 Juni 2008.
- Upe, A, Selasa, 20 Maret 2007, “ **Eksistensi Pemilih Ditengah-tengah Bayangan Kampanye Pilkada** “ Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Sumut, 17 Mei 2008.
- US, Tiarsa R, “ **Tim Sukses** “ www.pikiranrakyat.com, 27 Februari 2007.
- Utomo, Tri Widodo W, 2000, “ **Sistim Politik Indonesia, Sebuah Pengantar** “ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung.

Varma,SP, 2003, **“Teori Politik Modern”**, Raja Garfindo Persada, Jakarta.

_____, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

_____, Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

_____, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

_____, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

_____, Undang-undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilu.

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

1. Nama : Mohammad Sholihin.
2. Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 11 Maret 1961.
3. Agama : Islam.
4. Alamat : Jl. RA Mlati RT 07/RW I , Mlati Kidul
Kudus.
Telepon 0291.440737/HP 08122884987.
5. Pendidikan :
 - a. SD Tanwirul Qulub Demaan Kudus 1973.
 - b. SMP Muhammadiyah Kudus 1976.
 - c. SPG Negeri Kudus 1979/1980.
 - d. D1 IKIP Jurusan PMP/Kn Semarang 1982.
 - e. D2 UT Jurusan PMP 1992.
 - f. D3 IKIP Semarang Jurusan PPKn 1996.
 - g. S1 IKIP Semarang Jurusan PPKn 1998.
6. Pekerjaan :
 - a. Guru PPKn SMP 1 Kudus Tahun 1983 – 2004.
 - b. Guru/Kepala SMP 2 Jati Kudus 2004 – sekarang.
7. Keluarga :
 - a. Nama Ayah ; Munthoha (Alm)
 - b. Nama Ibu : Mastinah.
 - c. Nama Istri : Sunarsih.
 - d. Nama Anak : 1. Suryo Solinar.
2. Candra Solinar.

RINGKASAN HASIL TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN	HASIL WAWANCARA
<p>Buruh Rokok Alamat Tanjung Karang jati Kudus. Brak : Tanjung.</p>	<p style="text-align: center;">Tentang Identitas Figur</p> <p>Saya tahu calon dari omong omong dan dari gambar yang ditempel di tembok – tembok, bahwa calonnya ada empat pasang Mustofa, Pak Amin, Mansur dan Pak Heru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang saya dengar itu pak Mustofa dari PDIP, dulu sudah pernah nyalon tapi tidak jadi, rumahnya dekat situ Ngloram katanya, sedangkan Pak Amin mantan Bupati sebelum pak Tamzil dia dicalonkan dari PKB, kemudian yang berikutnya Mansur anaknya pak As’ad ketua SPSI, lalu pak Heru katanya dari Undaan saya kurang tahu. - Yang saya dengar Mansur itu anaknya pak As’ad ketua SPSI, saya juga pernah dengar Mansur pernah datang ke Pabrik, tapi yang dikumpulkan hanya perwakilan sampai dengan mandor, sedangkan pak As’ad sendiri kurang begitu disukai karena SPSI nyatanya hanya memotong gaji karyawan tapi perjuangannya tidak jelas. Dan lagi yang nyalon ini kan anaknya yang belum pernah berjasa pada buruh. - Calon yang kelihatannya baik ya ada dua pak Mustofa dan pak Amin Munajat itu kata orang – orang. <p style="text-align: center;">Tentang Identifikasi Partai Pengusung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saya tahu itu Mustofa dan Budiyono adalah calon dari PDIP dan Golkar, Pak Amin dari PKB, Mansur dari PAN dan Heru dari Demokrat. - Saya tidak anggota partai, saya milih tidak karena asal partai tapi orangnya. <p style="text-align: center;">Tentang Janji Kampanye/Visi misi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Janji kampanye Mustofa yang saya dengar adalah akan memberikan dana kematian bagi warga yang kesusahan sebesar tiga juta dan berobat gratis, yang lain saya tidak tahu, ndak pernah ikut kampanye. - Janji itu akan ditepati apa tidak saya ndak yakin itukan buth dana yang sangat besar, tapi kan mudah diingat

besuk kalau jadi tinggal menagih.

- Harapan masyarakat kecil adalah barang – barang jangan naik, jangan korupsi dan yang penting keadaan aman orang kecil tetap bisa bekerja.
- Saya tidak pernah mendatangi kampanye, itu suami dan tetangga yang pernah ikut , saya ndak tahu. Kampanye Mustofa di Kaliwungu ada hadiah nya, ada yang dapat sepeda motor, sepeda, televisi dan jam dinding.
- Mengenai sanga ikut kampanye, ada yang dapat dan ada yang tidak, tergantung yang mengajak, ada bosnya ada sabetnya, ada yang dapat kaos dan uang bensin tiga puluh ribu.

Tentang Juru kampanye/sabet.

- Kalau disekitar sini rata-rata Mustofa, kelompok Mustofa banyak saya hanya ngikut saja, bapaknya ikut kelompoknya Mustofa. Dikalangan orang pabrik ada yang mengajak ke Mansur tapi pada ndak mau, toh bukan pabrik yang nyuruh, jadi kita ya bebas saja tergantung pribadi masing – masing.
- Jurkam atau sabet yang berpengaruh ya dari Mustofa, didatangi terus , ada kumpulan terus, orang – orang sini banyak yang ikut, kita ndak enak dengan mereka kalau kita ikut kampanye dari calon lain.
- Dari serikat pekerja dan Mansur As'ad hanya memberitahukan kalau Mansur minta dukungan dari pekerja, tapi kita ndak pernah dikumpulkan secara langsung.
- Uang saku dari pabrik itu bukan untuk mencoblos Mansur, itu uang pengganti karena Sabtu libur tidak bekerja, itu premi dari perusahaan.
- Aku tidak tahu kalau itu usaha dari sarikat pekerja, menurut saya itu sudah wajar karena harusnya kita dapat bekerja dapat uang tapi diliburkan dipakai pilkada.

Tentang Pemberian/Hibah politik.

- Ya. Beberapa waktu sebelumnya kita dapat beras dua kilo lalu kita ada yang memberi amplop uang jajan sepuluh ribu.
- Kalau tidak ada yang memberi dan ndak ada yang

	<p>mengajak, ya enak dirumah saja, mengerjakan pekerjaan lain,</p> <ul style="list-style-type: none">- orang-orang juga pada dapat. <p>Tentang kelompok penekan/Pressure Groups</p> <ul style="list-style-type: none">- Kalau dianggap menekan ya tidak, Cuma ewuh kalau kita ndak sama dengan kiri kanan.- Yang kadang kata-katanya agak kasar itu anak-anak muda tapi ditujukan pada orang lain, yang mendukung calon lain.- Tidak karena mereka tidak akan berani.- Tidak , pabrik itu netral tidak boleh membawa-bawa partai. <p>Tentang harapan kaum buruh terhadap kandidat</p> <ul style="list-style-type: none">- Supaya bisa memperjuangkan agar para buruh dapat tetap bekerja karena sekarang banyak PHK, produksi dikurangi, kalau berhenti buruh makan apa.- Pemimpin yang diharapkan adalah yang jujur, mikirkan kesejahteraan masyarakat, tidak mikirkan dirinya sendiri saja.- Supaya bupati terpilih memperjuangkan nasib kaum buruh rokok yang tidak punya, barang-barang jangan naik, angkutan jangan naik.
--	---

Pedoman Wawancara.

Untuk Buruh Rokok

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Apakah ikut memilih dalam Pilkada ? Apa alasannya ?

.....

I. Tentang Identitas Figur.

1. Apakah mengetahui calon Bupati/Wakil Bupati yang ikut Pilkada ?

.....

2. Dari manakah mereka mengetahui/dapat informasi ?

.....

3. Seberapa jauh mengenal identitas calon ?

.....

4. Apakah mengetahui ada calon yang berasal dari serikat pekerja ?

.....

5. Bagaimana penilaiannya mengenai calon dari serikat pekerja ?

.....

6. Manakah calon yang paling berkesan ? apa alasannya ?

.....

II. Tentang Identifikasi Partai.

1. Apakah mengetahui dari manakah asal partai dari para calon ?

.....

2. Apakah memilih berdasarkan asal partainya ?

.....

3. Apa alasannya ?

.....

Apakah karena partainya besar ? Apa alasannya ?

.....

Apakah karena partainya kecil ? Apa Alasannya ?

.....

Apakah karena partainya bernuansa keagamaan ?

.....

Apakah karena dipandang dapat menyalurkan aspirasinya ?

.....

4. Apakah informan adalah anggota partai tertentu / mendukung partai tertentu ?

III. Tentang Isu Kampanye.

1. Apakah mengetahui janji kampanye/isu kampanye/visi misi masing – masing calon.?

.....

.....

2. Dari mana memperoleh informasi itu ?

.....

3. Manakah yang paling berkesan ?

.....

4. Apakah percaya janji kampanye akan ditepati ? Apa alasannya ?

.....

5. Apa program yang diinginkan oleh para buruh ?

.....

6. Pernahkah mendatangi kampanye calon, siapa yang mengajak, apa yang mendorong untuk datang ?

.....

IV. Tentang Juru Kampanye/Sabet/Tim sukses..

1. Jurkam/sabet dari calon manakah yang mengajaknya ?

.....

2. Manakah yang paling berpengaruh ?

.....

3. Apa alasannya ?

.....

4. Apakah ada sabet dari serikat pekerja yang datang

?.....

V. Tentang Pemberian/Insentif/Hibah Politik.

1. Apakah menerima sesuatu pemberian berkaitan dengan Pilkada ?

.....

2. Apakah menerima pemberian uang dari pabrik ?

.....

3. Apakah mengetahui uang itu dari usaha serikat pekerja ?

.....

4. Apakah ada sabet yang memberikan sesuatu imbalan ?

.....

5. Kalau ya, berupa apa, berapa banyak ?

.....

6. Apakah akan tetap nyoblos kalau tidak ada yang memberi ?

Mengapa ?

VI. Tentang Kelompok Penekan /Pressure Groups.

1. Apakah ada yang menekan untuk memilih calon tertentu ?

.....

2. Apakah ada tekanan tertentu dari sabet ?

.....

3. Apakah akan ada sanksi dari serikat pekerja ?

.....

4. Apakah ada ancaman tertentu dari pabrik ?

.....

VII. Harapan Terhadap Kandidat.

1. Apa harapan kaum buruh terhadap kandidat ?
.....
2. Masalah-masalah apa yang minta diperjuangkan?
.....
3. Pemimpin yang bagaimana yang diharapkan?
.....
4. Dukungan apa yang diharapkan dari Bupati terpilih untuk kehidupan kaum buruh?

Untuk Tokoh Masyarakat :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

I. Tentang Keadaan Buruh Rokok.

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pekerjaan buruh rokok ?
.....
2. Bagaimanakah pola kehidupannya ?
.....
3. Bagaimanakah kesejahteraannya ?
.....
4. Apakah ada perbedaan antara buruh rokok pabrik besar dan pabrik kecil ?

5. Bagaimanakah peran buruh rokok dalam kehidupan bermasyarakat ?

.....

6. Bagaimana pendapat anda mengenai masa depan buruh rokok ?

.....

7. Siapa yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihannya saat pilkada ?

II. Tentang Sikap Perusahaan Rokok dalam Kegiatan Pilkada.

1. Bagaimana sikap politik perusahaan dalam kegiatan pilkada ?

.....

2. Apakah ada upaya perusahaan untuk membawa kaum buruh ke calon tertentu ? ...

III. Tentang Serikat Pekerja Pabrik Rokok (SPSI-RTMM).

1. Bagaimanakah upaya serikat pekerja mensejahterakan buruh rokok ?

.....

2. Apakah ada kegiatan khusus dari organisasi serikat pekerja berkaitan dengan pilkada ?

.....

..

3. Bagaimana cara serikat pekerja memobilisir buruh rokok ?

.....

4. Seberapa besar organisasi serikat pekerja mendukung pencalonan Mansur ?

IV. Tentang Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati.

1. Bagaimana pendapat anda mengenai potensi para kandidat ?

.....

2. Bagaimana strategi para kandidat memenangkan pilkada ?

.....

3. Apa upaya para kandidat merebut suara kaum buruh ?

.....

V. Tentang Partai Politik Pengusung Para Kandidat.

1. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi parpol pengusung para calon ?

2. Bagaimana strategi parpol dalam memenangkan pilkada ?

.....

3. Apakah ada upaya parpol memobilisir suara kaum buruh rokok ?

.....

4. Bagaimana parpol mengefektifkan mesin politiknya untuk kemenangan pilkada ? .

VI. Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pilkada.

1. Bagaimana pendapat anda mengenai proses pelaksanaan pilkada ?

.....

2. Bagaimana pendapat anda mengenai golput ? Apa penyebabnya ?

.....

3. Apa saja strategi kemenangan yang ternyata berhasil ?

.....

4. Apa penyebab dari kekalahan para calon ?

.....

5. Kemana masuknya suara kaum buruh rokok ?

.....

6. Apa bentuk-bentuk politik uang yang anda ketahui ?

.....

Lampiran 1.
JURNAL PENELITIAN TESIS.

Lokasi : Desa Kedungdowo dan Desa Tanjungkarang.
Kecamatan : Kaliwungu dan Jati.
Kabupaten : Kudus.
Judul : PERILAKU PEMILIH BURUH ROKOK DALAM PILKADA
KUDUS TAHUN 2008.

No.	Uraian Kegiatan	Waktu	Lokasi	Hasil Wawancara
1.	Wawancara dengan R Tony Kusuma, Manajer Tim Kampanye Mansur.	Rabu 30 April 2008.	Rumah Tony, Mlati Norowito Gang 8.	Hasil perolehan suara Pilkada, evaluasi seluruh kegiatan Pilkada Kudus.
2.	Wawancara dengan Wantoro, Pegawai FSPSI Kabupaten Kudus.	Jumat 2 Mei 2008.	Rumah Wantoro, Jetak Kembang.	Keadaan buruh rokok di Kudus, Serikat Buruh dan Pilihan Politik buruh rokok dalam Pilkada.
3.	Wawancara dengan Asfiah buruh contong pabrik rokok di Kedungdowo.	Sabtu, 3 Mei 2008	Rumah Asfiah, Kedungdowo.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada Kudus.
4.	Konsultasi dan wawancara dengan Pak Triko, sekretaris KPUD kabupaten Kudus.	Senin 5 Mei 2008.	Kantor KPUD Kudus, Jl. Ganesa III, Purwosari.	Data-data Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2008.
5.	Wawancara dengan Abdul Manan, Ketua PPK Kecamatan Kaliwungu.	Selasa 6 Mei 2008.	Kantor Kec. Kaliwungu, jalan raya Kudus-Jepara.	Data-data Pilkada Kecamatan Kaliwungu dan Desa Kedungdowo.
6.	Wawancara dengan Kasmonah, mandor pabrik rokok di Tanjungkarang.	Selasa 6 Mei 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Mobilisasi buruh rokok dalam Pilkada, Pilihan politik kaum buruh rokok dan peranan serikat pekerja.

7.	Wawancara dan melengkapi data di Kec. Kaliwungu dengan PakImam Peg. Bagian pemerintahan.	Rabu, 7 Mei 2008	Kantor Kec. Kaliwungu Jalan raya Kudus-Jepara.	Melengkapi profil Kecamatan dan Desa serta pabrik rokok di Kecaamatan Kaliwungu.
8.	Wawancara dengan Mafuatun, buruh pabrik rokok di Kedungdowo.	Kamis 8 Mei 2008.	Rumah, Desa Kedungdowo.	Keadaan buruh rokok, perhatian terhadap Pilkada, aspirasi buruh rokok dan pilihan politiknya dalam Pilkada 2008.
9.	Wawancara dengan Bu Fitri, pemilik pabrik rokok skala kecil di Kedungdowo.	Jumat, 9 Mei 2008.	Rumah, Kedungdowo.	Keadaan buruh rokok, pekerjaan, gaji, cara kerja, kehidupannya, serta pilihan Politiknya.
10.	Wawancara dengan Jumini, buruh rokok di Kedungdowo.	Jumat, 9 Mei 2008.	Rumah, Kedungdowo.	Keadaan buruh rokok, perhatian terhadap Pilkada, aspirasi buruh rokok dan pilihan politiknya dalam Pilkada 2008.
11.	Wawancara dengan Jaslan keluarga buruh rokok di Kedungdowo.	Jumat, 9 Mei 2008.	Rumah, Kedungdowo.	Keadaan buruh rokok, perhatian terhadap Pilkada, aspirasi buruh rokok dan pilihan politiknya dalam Pilkada 2008.
12.	Wawancara dengan Wantoro, pegawai FSPSI Kudus.	Sabtu, 10 Mei 2008.	Rumah, Jetak Kembang.	Data pabrik rokok, karyawan dan serikat pekerja.
13.	Wawancara dengan Hj. Haniah SH, Ketua DPC PDIP Kab. Kudus.	Sabtu, 10 Mei 2008.	Rumah, Jati.	Upaya partai dalam pemenangan Pilkada Bupati dan upaya memperoleh suara dari kaum buruh rokok.
14.	Wawancara dengan Budi Yuwono,	Minggu, 11 Mei 2008.	Rumah, Jati.	Evaluasi kekalahan Mansur, PKB, kemenangan Mustofa dan

	pemerhati Pilkada dan keluarga Mansur.			suara serikat buruh.
15.	Wawancara dengan Suwarno, personalia Jarum Kudus.	Minggu, 11 Mei 2008.	Rumah, perumahan Jarum.	Strata pekerja, jumlah pekerja dan peran perusahaan dalam Pilkada Bupati 2008.
16.	Wawancara dengan Hadi Siswanto, karyawan bulanan perusahaan rokok Jarum Kudus.	Senin 12 Mei 2008.	Rumah, Mlati Kudus.	Tokoh-tokoh karyawan, keterlibatan dalam kegiatan Pilkada dan sikap perusahaan selama Pilkada.
17.	Wawancara dengan Aji Mulyo, pemerhati Pilkada.	Minggu, 25 Mei 2008.	Rumah, Kedungdowo.	Evaluasi pelaksanaan Pilkada, peranan sabet dan tim sukses di Kedungdowo dan Kecamatan Kaliwungu.
18.	Wawancara dengan Camat Jati Hendro Martoyo.	Selasa, 1 Juli 2008.	Kantor Kec Jati.	Evaluasi Pilkada di Kec. Jati, Pabrik rokok di Jati, warga buruh rokok di Jati dan Tanjungkarang.
19.	Wawancara dengan Lasmindar, buruh rokok di Tanjungkarang.	Rabu, 2 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada.
20.	Wawancara dengan Mastonah, buruh rokok di desa Tanjungkarang.	Sabtu, 5 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada
21.	Wawancara dengan Jupri Edi, keluarga buruh rokok di Tanjungkarang.	Minggu 6 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pilkada di desa Tanjungkarang.
22.	Wawancara dengan Wardatun, buruh rokok di Tanjungkarang.	Sabtu, 12 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada
23.	Wawancara	Minggu,	Rumah,	Keadaan buruh rokok,

	dengan Kaenah, buruh rokok di desa Tanjungkarang.	13 Juli 2008.	Tanjungkarang.	aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada
24.	Wawancara dengan Suryati dan Mamik, buruh rokok di desa Tanjungkarang.	Minggu, 13 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada
26.	Wawancara dengan Rondhi, karyawan pabrik rokok di Tanjungkarang.	Minggu, 13 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada
27.	Wawancara dengan Anna, buruh rokok di Tanjungkarang.	Minggu, 20 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada
28.	Wawancara dengan Mundasih, buruh rokok warga Tanjungkarang.	Minggu, 20 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada
29.	Wawancara dengan Sandi, karyawan Jarum di desa Tanjungkarang.	Selasa, 22 Juli 2008.	Rumah, Tanjungkarang.	Keadaan buruh rokok, aspirasi dan pilihan politik dalam Pilkada
30.	Wawancara dengan Suhardi, bagian perindustrian kantor Perindakop Kabupaten Kudus.	Rabu, 23 Juli 2008.	Kantor Perindakop Kabupaten Kudus, Komplek perkantoran Mejobo Kudus.	Melengkapi data industri rokok besar sampai kecil di Kabupaten Kudus.

